

Naskah Akademik

SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

sebagai
HARI NASIONAL
PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA



Naskah Akademik

SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

sebagai
**HARI NASIONAL
PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA**



**Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2022**

Disusun oleh:

Sri Margana

Julianto Ibrahim

Siti Utami Dewi Ningrum

Satrio Dwicahyo

Ahmad Faisol

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DIY

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses sejarah yang panjang dari ratusan peristiwa penting sejak tumbuhnya akar kolonialisme di Indonesia pada awal abad ke-17 hingga akhir masa Perang kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Peristiwa-peristiwa penting itu telah melahirkan tokoh-tokoh sejarah yang telah dikukuhkan sebagai para pahlawan bangsa dan juga sebagian kecil dari peristiwa itu telah diperingati sebagai hari-hari besar nasional. Hal ini menunjukkan perhatian negara terhadap sejarah bangsanya. Sekalipun demikian, masih banyak sekali peristiwa sejarah penting yang menjadi bagian dari proses terbentuknya NKRI ini yang belum mendapatkan pengakuan yang layak oleh negara, seperti halnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949, yang

dalam historiografi Indonesia dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Peristiwa ini penting tidak hanya karena Tentara Nasional Indonesia telah berhasil mengalahkan tentara Belanda namun peristiwa ini merupakan wujud nyata dari semangat persatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali kedaulatan negara.

Peristiwa ini juga memiliki implikasi internasional yang luas karena berhasil meyakinkan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mendesak Belanda agar kembali ke meja perundingan. Desakan PBB ini kemudian direspon dengan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 di Den Haag, Negeri Belanda yang diikuti oleh delegasi dari Indonesia Belanda dan para negara-negara lain yang ditunjuk oleh PBB. Akhirnya KMB ini melahirkan kesepakatan berupa pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Sebuah pengakuan

yang kemudian menjadi landasan penting untuk tahap penegakan kedaulatan secara lebih luas lagi di antara bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Berawal dari Serangan Umum ini, kedaulatan negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus ini ditegakkan kembali.

Semoga peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dapat diperingati sebagai Hari Besar Nasional dengan sebutan sebagai HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA dan menjadi Hari Besar Nasional yang dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif oleh seluruh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Penulisan naskah ini telah melibatkan sejarawan-sejarawan profesional dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang telah memiliki reputasi yang luas dalam penelitian dan penulisan sejarah.

Sebagai penutup kami juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menjadi Kementerian Pemrakarsa, tidak lupa kepada kementerian dan lembaga Republik Indonesia, Komunitas sejarah, Swasta dan Pemerintah Daerah yang telah mendukung pengusulan peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara.

Yogyakarta, 7 Januari 2022
Kepala Dinas Kebudayaan DIY

Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A.
NIP. 19721209 199903 2 004

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan | 1

Bab II

Kajian Teoretis dan Praktik Empiris | 9

Bab III

Evaluasi dan Analisis Keputusan Presiden Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait | 77

Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis | 93

Bab V

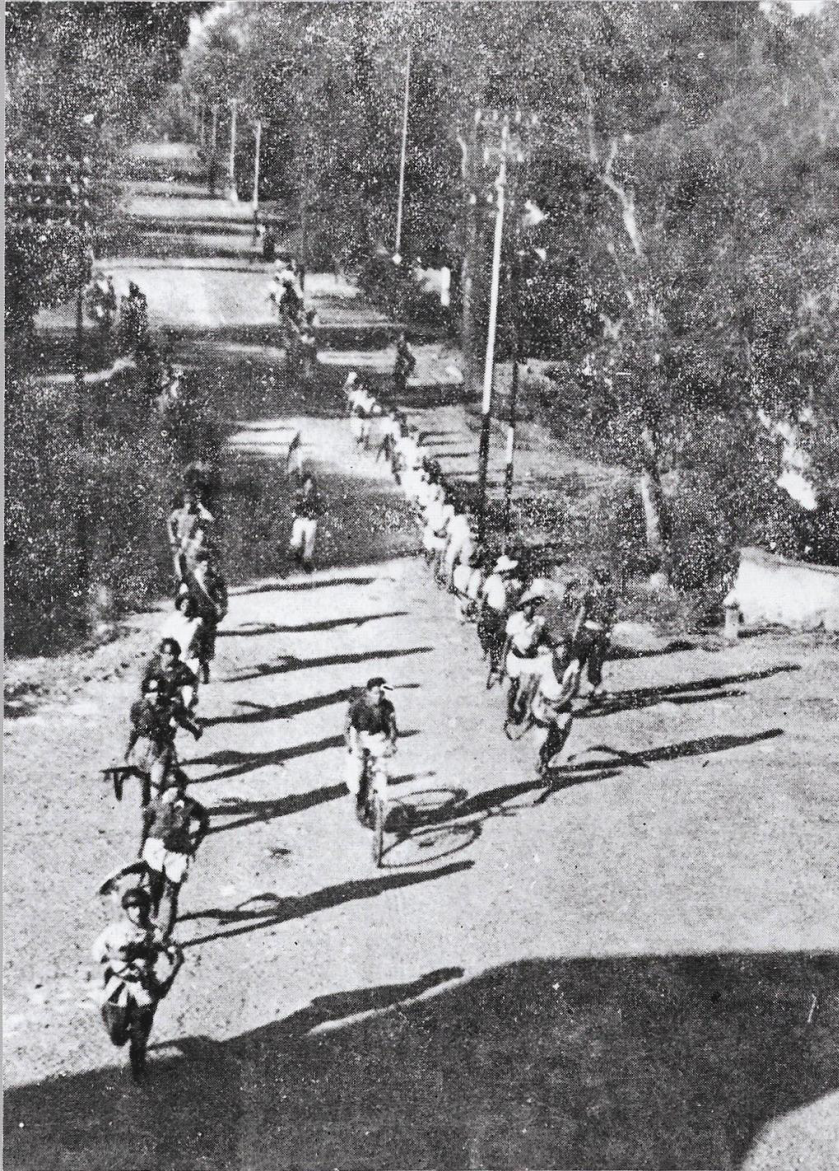
Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Keputusan Presiden | 115

Bab VI

Penutup | 117

Daftar Pustaka | 121

Lampiran | 127



Pasukan TNI yang berlari mulai memasuki kota Yogyakarta. (1949-6-29/IPHHOS)

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Soekarno tentang JASMERAH (Jangan Sekali-sekali Meninggalkan Sejarah) selalu relevan sepanjang zaman sebagai ajakan reflektif atau cermin kehidupan bagi perjalanan suatu bangsa untuk memperbaiki kesalahan, membangun semangat, dan meneguhkan kembali tekad dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa menuju masa depan yang gemilang di bawah naungan NKRI. Peristiwa sejarah perlu terus dimaknai ulang oleh setiap generasi, agar ia tidak mati sebagai masa lalu semata tetapi dapat tetap hidup, menginspirasi, dan selalu relevan dengan kebutuhan dan perubahan zaman

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah sebuah peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberhasilan para *founding fathers* di bawah kepemimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Syafruddin Prawiranegara, dan tokoh-tokoh penting lainnya, berhasil mengajak seluruh komponen bangsa, dari TNI, Kepolisian, laskar, ulama, santri hingga rakyat biasa telah bahu membahu merebut kembali Ibu kota negara yang telah dikuasai oleh penjajah. Keberhasilan

ini telah meyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan.

Historiografi tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ada selama ini telah mereduksi peran tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta tokoh-tokoh penting lainnya dan cenderung menonjolkan serta mengkultuskan perorangan sebagai tokoh sentral. Oleh karena itu sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 harus diubah dan menempatkan peran tokoh-tokoh utama dimaksud pada posisi yang semestinya.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakkan dan pengakuan kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar, karena peristiwa ini membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Serangan ini membuka jalan dilakukan pembahasan kembali kedudukan Indonesia yang telah menyatakan diri merdeka, tetapi pada sidang keamanan PBB tidak diakui oleh Belanda dan belum mendapatkan pengakuan luas dari negara-negara lain. Kedaulatan ke dalam hal ini berdampak dengan kembalinya negara kesatuan yang dahulunya terpecah menjadi negara federal yang merupakan bentukan Belanda.

Perbedaan serangan ini dengan serangan yang lain adalah pada sisi momentum yang tepat, dimana akan diselenggarakan sidang PBB sehingga dapat memberikan penguatan perjuangan diplomasi Indonesia di ranah internasional. Serangan umum ini menjadi dasar politik dan diplomasi untuk menghentikan rangkaian upaya sepihak dari Belanda, untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II serta pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville.

Serangan Umum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa (di antaranya para Laskar Sabrang yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, dan Bali) serta dalam pelibatangannya telah melibatkan berbagai komponen bangsa lainnya, dari rakyat biasa, pelajar, pejuang, Keraton, TNI, dan Kepolisian, sehingga menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam rangka menyukseskan tujuan untuk menunjukkan penegakan kedaulatan negara paska proklamasi.

Serangan Umum ini merupakan rangkaian panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sampai dengan pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda, dan kembalinya tekad komponen bangsa untuk meninggalkan federalisme kembali ke NKRI.

Rangkaian tersebut diawali pada saat Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengangkat dan menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pasukan sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan mengendalikan keadaan. Belanda sebagai bagian dari pasukan sekutu memanfaatkan kesempatan untuk dapat kembali mengambil alih Hindia Belanda.

Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Indonesia melalui Amanat 5 September 1945.

Pada tanggal 4 Januari 1946, Ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta atas usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Perpindahan ini disebabkan karena pasukan sekutu mulai melakukan aksi teror terhadap para pejabat negara Republik Indonesia dan beberapa diantaranya mengalami percobaan pembunuhan. Jakarta sebagai ibu kota negara tidak lagi kondusif untuk menjalankan pemerintahan. Tawaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta diterima oleh Soekarno;

Pada tanggal 7 Februari 1946, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai membahas situasi di Indonesia yang bergejolak. Pada tanggal 15 November 1946, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Kedua pihak menyetujui gencatan senjata. Dalam perjanjian ini Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi, walaupun telah menyetujui gencatan senjata, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947;

Pada tanggal 17 Januari 1948, diadakan Perjanjian Renville untuk mengakhiri Agresi Militer Belanda I. Republik Indonesia mengalami semakin banyak kerugian karena Belanda menguasai banyak wilayah di Jawa dan Sumatera setelah Agresi Militer Belanda I. Kabar Agresi Militer Belanda II untuk merebut Ibu kota negara Republik Indonesia Yogyakarta telah diketahui oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kedua pemimpin menyelenggarakan sidang kabinet untuk menyusun berbagai skenario untuk menyelamatkan Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948. Keputusan sidang kabinet tersebut adalah:

- a. Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang akan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran;
- b. Menunjuk Menteri Luar Negeri, A.A. Maramis, dan pejabat Konsulat Indonesia di India Dr. Soedarsono dan A.M. Palar, untuk membentuk pemerintahan darurat di luar negeri (New Delhi India), jika PDRI gagal dilaksanakan;
- c. Memerintahkan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menangani dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban di Ibu kota negara jika Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda. Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga diperintahkan untuk memantau perkembangan politik di dalam dan di luar negeri tentang nasib Indonesia, dan melaporkannya kepada Presiden. Hal ini dilakukan pada saat Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengunjungi Soekarno di tempat pengasingannya di Menumbing, Bangka;
- d. Presiden, wakil presiden, beserta para menteri memutuskan untuk bertahan di ibu kota negara dan melanjutkan perjuangan secara diplomatik;
- e. Memerintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk melakukan siasat perang gerilya.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II di Ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sejak itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada. Seperti rencana sebelumnya, pada tanggal 22 Desember 1948, PDRI di Bukit Tinggi didirikan

dan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara itu Panglima Besar Jenderal Soedirman memutuskan keluar dari ibu kota dan berjuang melalui perang gerilya. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949, terjadilah serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI.

Pada awal bulan Februari 1949, berita tentang Sidang PBB yang membahas nasib Indonesia didengar oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Untuk mendukung perjuangan diplomatik di tingkat internasional ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan idenya kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman agar dilakukan serangan umum dari segala penjuru yang melibatkan seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, yaitu TNI, Kepolisian, laskar, dan seluruh komponen masyarakat.

Pada tanggal 1 Maret 1949, pukul 6 pagi setelah sirene tanda berakhirnya jam malam berbunyi, pasukan TNI yang didukung seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, yaitu Kepolisian, laskar, dan seluruh komponen masyarakat menyerang Yogyakarta dari segala penjuru. Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita perebutan kembali Ibu kota Yogyakarta tersebut disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio.

Keberhasilan pasukan TNI bersama seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, termasuk Kepolisian, laskar dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam merebut kembali kota Yogyakarta ini membawa pengaruh besar. Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia akhirnya mengetahui keadaan Indonesia yang sebenarnya dan berbalik memihak Indonesia. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita serangan ini untuk mendesak Belanda agar kembali berunding dengan Indonesia.

Situasi di Indonesia yang tidak kunjung membaik membuat Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi ekonomi terhadap Belanda. Belanda setuju untuk kembali berunding dengan Indonesia. Belanda dan Indonesia menyetujui Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949, dengan hasil menyetujui gencatan senjata, mengembalikan pemimpin Negara Indonesia ke Yogyakarta, dan mengadakan Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 24 Juni 1948, Syafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 29 Juni 1949, Ibu kota Negara Republik Indonesia resmi kembali ke Yogyakarta. Mandat ini dikembalikan pada tanggal 30 Juni 1949 setelah proses pengembalian

Yogyakarta sebagai Ibu kota Republik Indonesia selesai.

Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada Konferensi Meja Bundar dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut adalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda, diberikan oleh Ratu Belanda kepada Mohammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

B. Identifikasi Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedaulatan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemudian kedaulatan tersebut tidak diakui secara sepihak oleh Belanda ditandai dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II, pelanggaran Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, yang selanjutnya menjadikan kedaulatan Negara Indonesia, pada level internasional dan nasional menjadi tidak diakui. Serangan Umum 1 Maret menjadi titik balik dimana Kedaulatan Negara ditegakkan, pada level internasional dan nasional, melalui Penyerahan Kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang menunjukkan bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang terlibat, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta tokoh-tokoh penting lainnya dan masing-masing memiliki peranan penting sampai akhirnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret memberikan dampak yang besar dalam pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Peringatan terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret dapat memperbaiki sejarah lama,

yang hanya cenderung menonjolkan serta mengkultuskan seseorang sebagai tokoh sentral, dan belum mencerminkan fakta sejarah yang sesungguhnya.

C. Tujuan Penulisan Naskah Akademik

Tujuan pokok penulisan naskah akademik ini adalah:

1. Menuliskan kembali sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang lebih didasarkan pada fakta-fakta yang kredibel dan otentik yang menempatkan para tokoh-tokoh utama dalam peristiwa itu pada peran yang semestinya.
2. Menjadi landasan akademik untuk mengusulkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
3. Peringatan Peristiwa Serangan Umum 1 Maret akan dapat mengingatkan kembali masyarakat Indonesia, bahwa akan selalu ada ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Makna pokok peringatan peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa, UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan NKRI sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Metode

Naskah akademik ini dituliskan menggunakan metode sejarah kritis. Dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber primer berupa arsip, foto, kesaksian tokoh dan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku dan artikel yang telah ditulis sebelumnya. Sumber-sumber itu diuji secara kritis kemudian dimanfaatkan untuk penulisan naskah akademik.

Naskah akademik ini disusun atas lima bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan metode penulisan naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949. Bagian berikutnya adalah tentang kajian teoritis dan praktik empiris dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Dimulai dengan tinjauan historiografis berupa buku-buku yang telah ditulis oleh para sejarawan

professional sebelumnya. Banyaknya kajian historis dan akademis yang telah dilakukan terhadap peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini. Kajian-kajian itu juga menjadi bukti yang kuat bahwa peristiwa ini layak diangkat sebagai peristiwa besar nasional.

Pada bagian ketiga menjelaskan tentang evaluasi dan analisis Keputusan Presiden terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada. Selain itu, pada bagian ini juga digambarkan *timeline* peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada bagian keempat disajikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Serangan Umum 1 Maret 1949 bagi penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada bagian kelima membahas tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Keputusan Presiden. Sebagai penutup, akan disajikan kesimpulan dan juga rekomendasi bagi pemerintah untuk mengangkat peristiwa Serangan Umum 1 Maret ini sebagai hari besar nasional, dengan sebutan “Hari Penegakan Kedaulatan Negara”. Selain itu, juga terdapat lampiran berupa rancangan peraturan Keputusan Presiden.

Bab II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Serangan Umum oleh Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap kedudukan markas militer Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dalam kajian akademis ini dianalisis berdasarkan teori *Center of Gravity* (CoG), yaitu sebuah serangan militer yang massif untuk menikam jantung kekuatan musuh. Pada saat serangan itu dilakukan Yogyakarta menjadi *Center of Gravity* dimana seluruh kekuatan militer Belanda dipusatkan. Serangan ini dimaksud untuk merebut kembali Kota Yogyakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang telah diambil alih oleh Belanda melalui sebuah serangan militer yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan terhadap CoG musuh juga diadopsi oleh militer pejuang Vietnam untuk merebut kota Saigon (Ho Chi Minh City) yang saat itu menjadi CoG dari kekuatan militer Prancis yang mejajajah Vietnam pada masa itu.

Bagi pihak Indonesia Kota Yogyakarta juga merupakan CoG karena selain menjadi ibukota negara, ia juga menjadi pusat untuk mereposisi kekuatan politik dan militer. Merebut kembali Kota Yogyakarta menjadi kunci strategis untuk menunjukkan eksistensi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 kepada dunia internasional.

Tinjauan Historiografi Serangan Umum 1 Maret 1949

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Serangan yang berlangsung selama 6 jam di Yogyakarta berhasil menunjukkan kembali eksistensi Indonesia ke dunia internasional. Selain itu peristiwa tersebut juga mampu menyatukan kembali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Karya historiografi merupakan salah satu jalan untuk mengetahui betapa pentingnya Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat ini telah terbit karya-karya yang berusaha merekonstruksi berlangsungnya Serangan Umum 1 Maret dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam tulisan ini telah ditemukan sekitar 30 karya. Karya-karya tersebut ditulis oleh penulis yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari sejarawan, militer, wartawan, budayawan, dan lainnya. Selain merekonstruksi Serangan Umum 1 Maret 1949 dari berbagai perspektif, karya-karya tersebut juga mencoba melakukan analisis-analisis yang menarik.

No	Nama Pengarang	Judul Buku	Kota & Tahun Terbit	Penerbit
1	SESKOAD	<i>Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya</i>	Jakarta (1991)	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tim Lembaga Analisis Informasi	<i>Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949</i>	Yogyakarta (2000)	Media Presindo
3	Batara R.Hutagalung	<i>Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia</i>	Yogyakarta (2010)	LKiS
4	Dharmono Hardjowidjono, dkk.	<i>Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Kedua)</i>	Yogyakarta (1984)	Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Tempat Perjuangan Bangsa

5	Julius Pour	<i>Doorstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer</i>	Jakarta (2010)	Kompas
6	George McTurnan Kahin	<i>Nasionalisme & Revolusi Indonesia</i>	Jakarta (2013)	Komunitas Bambu
7	Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagjo Toer, dan Ediati Kamil	<i>Kronik Revolusi Indonesia Jilid I-V 1949</i>	Jakarta (2014)	KPG
8	Dr. A.H.Nasution	<i>Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I-11</i>	Jakarta (1979)	Disjarah AD dan Angkasa Bandung
9	R. Ridhani	<i>Letnan Kolonel Soeharto: bunga pertempuran serangan umum 1 Maret 1949</i>	Jakarta (2010)	Pustaka Sinar Harapan
10	Bakarudin	<i>Serangan Umum 1 Maret 1949: "schaak maat" untuk Belanda: strategi Letkol Soeharto hancurkan Belanda</i>	Surabaya (2010)	Yayasan Kajian Citra Bangsa
11	Paguyuban Wehr Kreise III (Organization)	<i>Paguyuban Wehr Kreise III Yogyakarta dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949</i>	- (2006)	Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, Paguyuban Wehr Kreise III, 1986
12	Moehkardi	<i>Akademi Militer Yogya di dalam perjuangan pisik 1945-1949</i>	Jakarta (1977)	PT. Inaltu Jakarta
13	G.Dwipayana dan Ramadhan K.H.	<i>Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya</i>	Jakarta (1989)	PT. Citra Lamtoro Gung Persada
14	Julianto Ibrahim	<i>Dinamika Sosial Politik Masa Revolusi Indonesia</i>	Yogyakarta (2014)	Gadjah Mada University Press
15	Asvi Warman Adam	<i>Menguak Misteri Sejarah</i>	Jakarta (2010)	Kompas Media Nusantara

16	Ali Sastroamidjojo	<i>Tonggak-tonggak di Perjalananku</i>	Jakarta (1974)	PT. Kinta
17	Abu Bakar Lubis	<i>Kilas Balik Revolusi 1945-1949, kenangan pelaku dan saksi</i>	Jakarta (1992)	Penerbit UI
18	Sri Margana, dkk	<i>Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949</i>	Yogyakarta (2017)	Dinas Kebudayaan DIY
19	Colin Wild dan Peter Carey	<i>Gelora Api Revolusi; Sebuah Antologi Sejarah</i>	Jakarta (1986)	British Broadcasting Corporation (BBC) Seksi Indonesia/ Gramedia
20	Rosihan Anwar	<i>Kisah – kisah Zaman Revolusi</i>	Jakarta (1975)	Sinar Harapan
21	Manai Sophiaan	<i>Apa yang Masih Teringat</i>	Jakarta (1991)	Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
22	Boedihardjo	<i>Siapa Sudi Saya Dongengi</i>	Jakarta (1996)	Sinar Harapan
23	NN	<i>Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan</i>	Jakarta (1975)	Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korps Cacad Veteran Republik Indonesia & Badan Penerbit ALDA
24	Himawan Soetanto	<i>Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1)</i>	Jakarta (2006)	Gramedia Pustaka Utama

25	Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S.Maimoen	<i>Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX</i>	Jakarta (2011)	Gramedia Pustaka Utama
26	R.Eddy Soekamto	Yogyakarta Ibukota Perjuangan	Yogyakarta (2005)	Penerbit Narasi
27	Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo	<i>Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik</i>	Yogyakarta (2011)	Galang Press
28	Anthony Reid	<i>Revolusi Nasional Indonesia</i>	Jakarta (1996)	Pustaka Sinar Harapan
29	Tashadi, dkk.	<i>Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949</i>	Yogyakarta (1992)	Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
30	T.B. Simtupang	<i>Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan</i>	Jakarta (1981)	Pustaka Sinar Harapan

Dari karya-karya yang ada dalam tabel di atas, akan dibahas beberapa karya yang menarik dalam membahas peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada peristiwanya, namun juga latar belakang penulis dan perdebatan serta temuan-temuan menarik yang diungkap oleh penulis dalam karyanya. Hal ini tidak hanya untuk mengungkap seberapa penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, namun juga menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam kajian ilmiah.

Berikut ini adalah beberapa karya yang telah berhasil dibaca dan ditinjau ulang untuk dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar dan pentingnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam sejarah perjalanan bangsa dan dalam dunia akademis.

SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Buku ini disusun atas ide dari Sekolah Staf dan Komando TNI AD. Dari 41 bahan dalam daftar pustaka, 21 diantaranya berasal dari sumber militer. Buku ini juga menggunakan sumber lisan sebanyak 45 orang dengan 43 orang berasal dari militer dan 2 orang pemerintahan. Latar belakang tersebut membuat buku ini sangat militer-sentris dalam menggambarkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret.

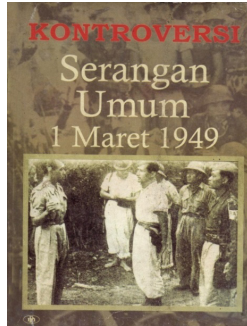
Hal yang menarik dari buku ini ialah rincian setiap peristiwanya. Buku yang terdiri dari 7 Bab ini menggambarkan kronologi Serangan Umum 1 Maret mulai dari sebelum hingga dampak dari peristiwa tersebut. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan foto, peta, bagan organisasi dan susunan pemerintahan militer, serta surat-surat penting yang berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret.

Tokoh-tokoh militer, seperti Letnan Jenderal Oerip Soemahardjo, Jenderal Soedirman, Jenderal Mayor A.H.Nasution, Letkol Soeharto dan lainnya memiliki peran sentral dalam menyusun strategi Serangan Umum 1 Maret. Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri digambarkan sebagai kepala daerah yang mendukung segala strategi yang akan dilakukan oleh Letkol Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III. Selain Sultan, Tim Penulis juga menjelaskan bahwa strategi Letkol Soeharto mendapat dukungan rakyat dan Pamong Praja, mulai dari penyerangan-penyerangan kecil hingga Serangan Umum 1 Maret.

Dalam buku ini, Tim Penulis menjelaskan latar belakang pemilihan Yogyakarta sebagai ibu kota pada 4 Januari 1946. Nilai militer Yogyakarta yaitu sebagai Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat menjadi pertimbangan penting. Selain itu, pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 5 September 1945 terhadap proklamasi kemerdekaan RI pun menjelaskan posisi dukungan pemerintahan Yogyakarta terhadap pemerintah RI.

Tim Penulis berkesimpulan bahwa Serangan Umum 1 Maret dapat menyita perhatian internasional. Selain itu, peristiwa tersebut juga dapat mempersatukan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh





Tim Lembaga Analisis Informasi, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*, Yogyakarta: Media Presindo, 2000

Buku ini ditulis oleh Tim Lembaga Analisis Informasi dan berusaha memberikan perspektif baru dalam memahami Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam tulisannya Tim Penulis menjelaskan bahwa mereka tidak hendak melakukan Hagiografi atau mengkultuskan peran seorang tokoh, seperti buku-buku yang telah ada sebelumnya. Usahnya dalam menghadirkan perspektif yang baru, Tim Penulis menggunakan sumber-sumber alternatif, seperti kesaksian beberapa pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, berita media massa hingga buku-buku yang ditulis saat kekuasaan Orde Baru mulai menurun.

Menurut Tim Penulis, Serangan Umum 1 Maret 1949 sendiri dilakukan atas dua tujuan. Pertama ialah untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan yang ke dua ialah untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI di tengah dukungan rakyat yang semakin mengendur dalam perang gerilya. Melalui karyanya, Tim penulis berkesimpulan bahwa keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 ialah berkat semangat nasionalisme dari berbagai seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah DIY, militer AD dan AU, rakyat Yogyakarta dan sekitarnya serta dukungan pemerintah luar negeri.



Batara R.Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Buku ini memiliki judul “Serangan Umum 1 Maret 1949”, dengan 7 bab di dalamnya, namun pembahasan tentang serangan tersebut hanya terdapat dalam bab 6 sub 10 dengan 3 halaman penuh. Buku ini lebih banyak membahas peristiwa sebelum dan sesudah penyerangan. Hal menarik dari buku ini ialah pemberitaan tentang keberhasilan serangan yang dinarasikan dari kesaksian ayah penulis, sebagai berikut:

“Mr.Alexancer Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi, menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, tentang serangan “besar-besaran” Tentara Nasional Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi headline di pelbagai media cetak di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr.Maramis kepada dr.W.Hutagalung ketika bertemu tahun 1950-an di Pulo Mas, Jakarta.”(hlm. 455)

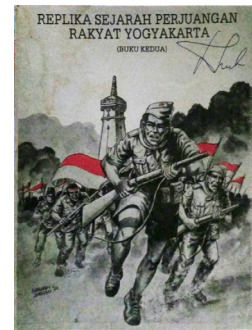
Melalui karyanya, penulis berkesimpulan bahwa kegagalan Belanda dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hanya dalam bidang militer, namun juga dalam bidang diplomasi, yaitu Soekarno menolak jalan perundingan di Den Haag pada 12 Maret melalui surat yang dikirim pada 4 Maret 1949 kepada WTM.Dr.Beel.

Dharmono Hardjowidjono, dkk., *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Kedua), Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1984-1985*

Buku ini menjadi rujukan historiografi yang sangat penting dalam mengetahui peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Memang, buku ini tidak secara spesifik membahas Serangan Umum dan lebih kepada pembahasan tentang bangunan atau wilayah cagar budaya di Yogyakarta. Namun, dalam wilayah-wilayah yang dibahas tersebut diceritakan bagaimana kondisi yang terjadi saat SU. Pembahasan serangan masuk melalui wilayah-wilayah yang saat itu menjadi lokasi perkumpulan laskar dan saat serangan terjadi.

Hal yang menarik dari buku ini ialah tokoh-tokoh yang dihadirkan. Jika dalam buku-buku sebelumnya tokoh utama Serangan Umum ialah para elit, baik elit sipil maupun militer. Buku ini lebih banyak membahas tentang peranan rakyat dalam serangan umum dan pembentukan laskar-laskar. Salah satu gambaran tersebut dituliskan dalam buku atas wawancara yang dilakukan kepada Pawiro pada 15 Januari 1985.

“Kampung Keparakan Lor di sebelah utara dibatasi oleh RK Prawirodiejan, sebelah barat jalan raya (jl.Ireda) yang membagi Keparakan Lor dengan RK Dipowinatan, sebelah selatan dibatasi



oleh wilayah RK Keparakan Kidul dan sebelah timur dibatasi oleh Kali Code yang memanjang dari utara ke selatan. Ketua RK-nya waktu itu adalah Pujihartono. Adapun ketua pemuda Keparakan Lor waktu itu dipegang oleh Sudirman. Kerjasama di antara keduanya mampu mewujudkan Laskar Rakyat yang bernama Pasukan Sumber Gelap.”(h.59)

Para penulis mewawancarai langsung para rakyat yang menjadi pelaku sejarah. Hal itu membuat tulisan ini tidak hanya menceritakan peristiwa serangan umum, namun juga berhasil mendokumentasikan semangat nasionalisme dari penuturan para pelakunya yang tidak banyak dibahas dalam buku lain. Sayangnya, buku ini tidak melampirkan foto-foto yang dapat menambah gambaran peristiwa saat itu, baik foto peristiwa maupun foto personal atau kelompok para laskar. Meskipun begitu, buku ini melampirkan peta-peta wilayah yang dibahas dalam teks.



Julius Pour, *Daarstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas, 2010.

Ditulis oleh seorang wartawan senior *Kompas*, buku ini menghadirkan penuturan yang sangat nyaman untuk dibaca kendatipun membahas tentang kondisi politik dan peperangan di Yogyakarta. Pour memulai karyanya tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 melalui penyerangan pasukan Jenderal Spoor ke Maguwo dengan sandi *Operatie Kraai* pada 19 Desember 1948 ke landasan terbang Maguwo. Peristiwa tersebut disebut sebagai *Doorstoot Naar Djokja* (mendorong melalui Djokja). Menurut Pour, peristiwa tersebut penting, karena Spoor sendiri menjelaskan bahwa Jogja adalah kunci terakhir keberadaan Republik Indonesia. Jika Jogja mampu dikuasai, maka penguasaan RI secara menyeluruh dapat dilakukan dengan mudah di bawah RIS.

Menurut Pour, pasca serangan yang dilakukan ke Maguwo, relasi antara sipil dan militer pun merenggang. Pihak militer ingin segera melawan balik atas perlakuan Belanda yang dianggap telah melanggar perjanjian Renville. Pihak sipil sendiri berusaha menyusun strategi baru untuk melawan melalui jalur diplomasi.

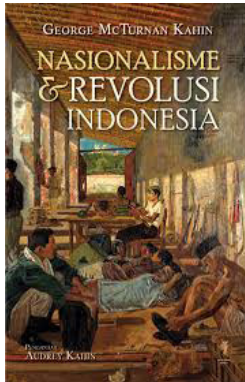
Serangan Umum 1 Maret 1949 sendiri dilakukan karena kondisi rakyat Yogyakarta semakin mengendor sejak bulan Januari 1949. Selain

itu, peristiwa tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan perhatian PBB dan dunia atas eksistensi RI. Dalam bukunya Pour menjelaskan bagaimana serangan terjadi. Serangan dilakukan berbarengan dengan sirine berakhirnya jam malam pada 06.00. Tentara RI mulai memasuki Yogyakarta dan menyerang pusat-pusat pertahanan tentara Belanda dari Selatan, Timur dan Barat. Pasukan di wilayah Utara sendiri mendapatkan tugas menjaga pertahanan. Mengetahui serangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia, semangat rakyat dan dukungan terhadap TNI kembali menyala. Ia menjelaskan bagaimana kondisi Yogyakarta saat itu sebagai berikut:

“Dalam waktu singkat, hampir di setiap sudut kota, telah berhasil dikuasai oleh TNI. Jalan Malioboro sampai Toegoe, dipenuhi pasukan gerilya. Di sebagian rumah penduduk, mulai berkibar bendera merah putih. Rakyat menyambut kemenangan tersebut dengan gembira. Mereka segera menyediakan makanan dan minuman di depan rumah masing-masing. Banyak ibu dan wanita membawa bakul berisi makanan untuk dibagi-bagikan kepada para gerilyawan. Hampir semua penduduk Djokja keluar rumah. Mereka segera berbaur dengan TNI, memenuhi jalan-jalan utama di kota. Mereka merasa bangga, oleh karena pasukan TNI telah sanggup menunjukkan kekuatannya, meski dalam keadaan kekurangan. Hari itu, tanggal 1 Maret 1949, pejuang TNI bersama rakyat telah memperoleh kemenangan besar” (hlm. 288-289).

Hal menarik yang dituliskan Pour dalam karyanya ialah bagaimana proses penyebaran berita Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan cepat dilakukan ke wilayah Indonesia hingga dunia internasional. Komando pemberitaan tersebut ternyata telah diberikan kepada operator perhubungan (PHB) AURI di Playen pada akhir Februari 1949. Saat peristiwa berlangsung, kode dentuman dari Jokja langsung dipahami sebagai dimulainya serangan. Berita tersebut pun disebarkan ke Bukittinggi, Aceh, Birma, India hingga dunia. Pour juga menjelaskan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 menunjukkan segala perkiraan dan usaha yang telah dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui penyerbuan ke Yogyakarta salah besar. Yogyakarta memang sempat dikuasai, namun dapat kembali direbut berkat semangat nasionalisme dari kekuatan sipil, militer dan rakyat. Selain itu, penulis memasukan hal-hal

kecil yang berkaitan langsung dengan kondisi di Yogyakarta saat itu, salah satunya tentang bayi calon Jenderal, Wiranto yang berhasil selamat saat penyerangan-penyerangan yang terjadi di Yogyakarta karena orang tuanya membawa ia memakai kereta kuda.



George McTurnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Buku ini ditulis George McTurnan Kahin, seorang wartawan yang pada 6 hingga 10 Januari 1949 berada di Yogyakarta. Kahin tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi, namun ia menjelaskan semangat nasionalisme dan revolusi Indonesia. Hal ini membuat tulisannya tidak secara rinci menjelaskan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, namun lebih menyematkan bagaimana semangat nasionalisme yang ia saksikan dalam kunjungannya selama 4 hari di Yogyakarta.

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, ia menjelaskan bagaimana kondisi kota Yogyakarta yang ditinggalkan oleh penduduknya yang mengungsi dan mengikuti perang gerilya ke pinggiran kota pasca penyerangan yang dilakukan Jenderal Spoor dan menguasai Yogyakarta. Ia juga menggambarkan bahwa mereka yang masih menetap di kota, terutama pegawai sipil, bekerja setengah hati melayani pemerintah Belanda. Kondisi pangan penduduk pun sangat memprihatinkan, bergantung pada jatah pangan yang diberikan. Mereka juga menolak menggunakan mata uang NEI dan tetap menggunakan uang Republikan sebagai salah satu bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda yang ingin kembali berkuasa. Beberapa perempuan pun menyediakan Dapur Umum untuk membantu penduduk yang kesulitan mendapatkan makanan karena menolak sama sekali bantuan dari pemerintah Belanda.

Merasa pertarungan militer yang dimenangkan oleh tentaranya kurang berhasil menaklukkan semangat rakyat, Jenderal Spoor kemudian berusaha mencari dukungan atas keberhasilannya dari penguasa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX. Karena terus menerus didesak, Sultan akhirnya bersedia menemui Spoor dan tetap pada pendiriannya agar pasukan Belanda pergi meninggalkan Yogyakarta. Rentetan perjanjian dan sidang yang dilakukan untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari Belanda dijelaskan oleh Kahin dengan sangat rinci dalam karyanya.

Suhartono, WP., *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko, 2002*

Ide pembuatan buku ini prakarsai oleh seorang Sejarawan UGM, Suhartono W.P. Dalam pengantar, penulis menjelaskan bahwa tujuan penulisan buku ini ialah sebagai cinderamata bagi para tamu domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta. Hal ini membuat fakta-fakta peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta dalam buku ini disampaikan dengan cara yang menarik. Pertama ialah bahasa yang digunakan. Selain menggunakan bilingual bahasa Indonesia dan Inggris, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dalam segi visual, buku ini juga tidak membosankan sebagai buku sejarah. Berukuran cukup besar, buku ini melampirkan foto-foto dan arsip yang sangat penting dan membantu pembaca mengimajinasikan peristiwa yang diceritakan dalam teks.

Berfokus pada sejarah Yogyakarta pada masa Revolusi, buku ini dapat dijadikan salah satu tulisan alternatif yang menghadirkan perspektif baru dan jauh dari “Orba”. Fakta-fakta yang dihadirkan dalam tulisan ini menggunakan arsip-arsip yang beragam, mulai dari arsip-arsip yang berada di Indonesia maupun Belanda. Selain itu digunakan juga hasil wawancara para pelaku sejarah.

Buku ini berisi 177 bagian yang diawali dengan penobatan GRM Dorojatun menjadi Sultan Hamengku Buwono IX pada 18 Maret 1940. Bagian selanjutnya kemudian diisi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta sejak masa Jepang hingga Agresi Militer I, Agresi Militer II hingga kembalinya kedaulatan RI pasca Serangan Umum I Maret dan perjanjian-perjanjian yang disepakati setelahnya.

Penyerangan dan penaklukan Belanda di Yogyakarta membuat rakyat mengalami kondisi yang serba sulit. Hal itu digambarkan dalam foto-foto yang dilampirkan dalam buku, bagaimana mereka mencari bahan makanan, keresahan yang timbul akibat perang yang tidak kunjung usai, dan lainnya. Meskipun demikian, pemerintah saat itu, termasuk Sultan Hamengku Buwono IX yang merupakan petinggi wilayah Yogyakarta terus berusaha agar Indonesia tetap terjaga, seperti memantau prajurit, meninjau pasar, dan lainnya. Tidak hanya itu, untuk mengobarkan semangat, para seniman juga bergabung dalam perjuangan, membuat poster-poster yang bertuliskan seruan-seruan untuk merebut kembali kemerdekaan.



“Keberhasilan Serangan Umum (SU) adalah berkat kerjasama yang baik antara Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letnan Kolonel Soeharto selaku komandan *Wehrkreis III*.” (h. 121)

Sangat jelas penulis ingin mengatakan bahwa berhasilnya merebut kedaulatan RI dari Belanda merupakan hasil kerjasama antara semangat nasionalisme dari sipil dan militer. Sipil berjuang dengan berbagai cara, mulai dari perundingan, pemberian bantuan obat, makanan dan pakaian, membuat propaganda, dan bahkan banyak pula dari mereka yang berani menjadi prajurit untuk maju ke medan perang. Kekuatan militer juga sangat penting dalam menjaga pertahanan dan melakukan eksekusi serangan di medan perang.



Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagjo Toer, dan Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V 1949*. Jakarta: KPG, 2014.

Buku jilid V ini berisi kronologi peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa Revolusi tahun 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 dijelaskan dalam 7 poin di kronologi tanggal 1 Maret 1949. Pertama ialah awal mula serangan dan perisapan yang dilakukan dengan sangat matang oleh pasukan RI yang dikomandoi Letkol Soeharto. Kedua ialah pendapat Sultan Hamengku Buwono IX. Ketiga ialah pendapat Letkol Soeharto atas peristiwa tersebut. Keempat ialah pendapat Letkol Soeharto tentang respon Jenderal Soedirman atas keberhasilan serangan tersebut. Kelima ialah laporan Dr.L.J.M.Beel kepada Mr.J.H.van Maarseveen melalui telegram atas sikap non kooperatif dan keras kepala Sultan Hamengku Buwono IX yang dituduhkan padanya atas serangan dari dalam keraton. Keenam ialah Penyiaran berita serangan Umum oleh *Radio Rimba Raya* di Aceh dan *RRI* di Banda Aceh serta *All India Radio (AIR)* DI New Delhi. Poin terakhir sendiri menjelaskan keberhasilan 2.000 pasukan yang memakai janur kuning dibawah komando Letkol Soeharto menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dibuatkan film oleh Usmar Ismail dengan judul *Enam Jam di Yogya*.

Buku ini berisi hal menarik, yaitu sikap pemerintah Belanda terhadap Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kronologi tanggal 2 dan 3 Maret 1949. Keterlibatan Sultan dalam SU terdeteksi. Dr.L.J.M.Beel dan Mr.J.H.van Maarseveen mencari cara untuk melakukan tindakan terhadap Sultan yang

akan disampaikan oleh Van Royen dalam sidang PBB. Sayangnya niatan tersebut sepertinya gagal karena tidak ada pembahasan lebih lanjut. Selain itu penulis juga menjelaskan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang disampaikan oleh perwakilan RI dalam Sidang PBB 7 Maret 1949 berdasarkan siaran radio yang tersebar. Pada tanggal yang sama, Soekarno dan Hatta dibebaskan dari penahanannya dan dikembalikan ke Yogyakarta usai ditandatangani persetujuan Roem-Royen.

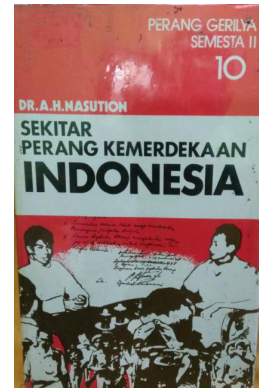
Dr. A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II*, Bandung: DISJARAH-AD dan Angkasa Bandung, 1979.

Buku ini terdiri dari 11 jilid, ditulis oleh Jenderal Dr. A.H. Hasution sebagai salah satu cara untuk mendokumentasikan dan bukti perjuangan rakyat dalam melawan penjajah. Meskipun ditulis oleh seorang militer, buku ini berusaha menampilkan partisipasi masyarakat dalam perang kemerdekaan. Ia menghadirkan perjuangan psikologis, politik, ekonomis dari seluruh kalangan, baik sipil maupun militer. Salah satunya ialah peperangan yang terjadi di Jawa Timur di mana banyak orang Tionghoa menjadi korban perang.

Dalam mengumpulkan fakta-fakta tersebut, penulis menggunakan sumber tertulis, seperti surat-surat perintah, koran, laporan, dan lainnya. Ia juga menyadari bahwa tidak semua peristiwa tercatat dalam tulisan mengingat saat itu kondisi perang. Dalam keterbatasan data tersebut, penulis juga menggunakan sumber lisan dari para pelaku sejarah. Foto-foto personal dan gambaran peristiwa peperangan pun dilampirkan oleh penulis dalam tulisannya.

Penulis membagi bukunya menjadi 5 bab. Dalam masing-masing bab tersebut tidak tersusun secara kronologis. Buku ini menarasikan peperangan gerilya secara umum yang terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta. Pada bab awal cerita mengenai perang gerilya dibagi menjadi lima daerah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Tengah dan Sumatera Timur.

Serangan Umum 1 Maret 1949 sendiri masuk dalam pembahasan bab pertama, sub bab Jawa Tengah, memberikan rentetan cerita mengenai rencana Serangan Umum 1 Maret 1949. Diawali dengan operasi



pembersihan Detasemen musuh di daerah Klurak para 12 Januari 1942 Hingga akhirnya para pejuang yang berada di kampung-kampung ini bersama bertempur di Kota Baru. Serangan tersebut telah direncanakan oleh Letkol Soeharto dengan sebelumnya. Serangan tersebut berlangsung selama 6 jam, efek dari perang gerilya yang dilakukan untuk memberikan efek secara politis dan psikologis.

Buku ini juga menceritakan serangan gerilya di daerah Yogyakarta lainnya. Seperti di daerah Bantul pada 28 Februari 1949, di mana TNI berhasil menghancurkan sebuah truk, juga pada tanggal 13 Maret 1949 merusak traktor milik musuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerangan kecil masih berlangsung di Yogyakarta setelah 1 Maret 1949. Hal menarik lainnya ialah bagaimana kondisi masyarakat saat peperangan terjadi.

“Dalam suasana demikian berbagai dinas rahasia musuh tidak segan-segan mengadakan teror bersenjata. Yang sangat sering mereka lakukan ialah melancarkan perampokan bersenjata, tidak lain supaya penduduk semakin gelisah dan tidak tahan lagi menderita. Sehingga akhirnya mau membantu Belanda menjaga keamanan. Akan tetapi penduduk malah makin tabah. Pasukan gerilyalah yang bertindak waktu malam memberantas perampokan itu.”(h.81)

Kutipan tersebut memberikan gambaran bagaimana kondisi psikologis yang dialami masyarakat Yogyakarta saat itu. Tidak mengherankan pula bahwa Serangan Umum 1 Maret penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di mata internasional, namun juga untuk kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat atas kemerdekaan bangsa dan perjuangan para gerilyawan saat itu.



Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan. Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korps Cacad Veteran Republik Indonesia & Badan Penerbit ALDA, 1975.

Buku ini berisi kumpulan foto yang dilengkapi deskripsi singkat peristiwa pada masa revolusi Indonesia, 1945-1950 dari perspektif militer. Foto-foto

yang ada menampilkan tokoh-tokoh militer maupun pemerintah RI dan Belanda. Selain itu terdapat pula foto-foto yang menggambarkan peristiwa politik dan militer, seperti perundingan hingga kondisi medan pertempuran.

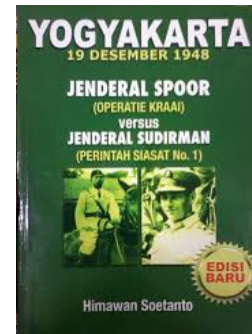
Buku ini menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran visual tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat, suasana Yogyakarta dan pasukan di medan pertempuran saat itu serta gambaran perundingan-perundingan yang diadakan pasca serangan. Momen keluarnya tentara Belanda dari Yogyakarta dan masuknya pasukan RI ke wilayah tersebut tersimpan dalam album ini yang sekaligus menjadi penanda kemenangan RI atas Belanda. Tinjauan Sultan Hamengku Buwono IX ke daerah-daerah bekas wilayah gerilya di Yogyakarta dengan berjalan kaki pun terdapat dalam album ini.

Berakhirnya perang melalui perjanjian Roem-Royen dan berkumpulnya kembali para pemimpin RI di Yogyakarta yang terekam dalam album ini menjadi bukti kesuksesan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pentingnya keberadaan Yogyakarta dalam mempertahankan keberadaan pemerintahan Republik Indonesia.

Himawan Soetanto, *Yogyakarta: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dalam buku yang ditulisnya, Letjen (Purn) Himawan Soetanto menjelaskan dua strategi militer yang dilakukan pada masa revolusi, antara Belanda versus Indonesia. Dalam buku ini tidak dijelaskan tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret, namun latar belakang politik dan kondisi militer yang terjadi di Indonesia, khususnya Yogyakarta menjadi hal penting yang dibahas dalam buku ini. Strategi militer yang dilakukan oleh Jenderal Soedirman, orang yang kemudian berperan dalam Serangan Umum 1 Maret pun dapat terlihat dalam buku ini.

Penulis membandingkan strategi Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda di Indonesia dengan Jenderal Soedirman. Jenderal Spoor menggunakan siasat militer yang diberi sandi *Operatie Kraai*. Strategi tersebut terdiri dari dua tahap, yaitu penyerangan ke wilayah yang ditargetkan untuk kemudian melanjutkannya ke tahap ke dua, yaitu pembersihan daerah dengan menyebar pasukan ke wilayah yang telah



dikuasai. Jenderal Soedirman sendiri menggunakan strategi melalui Perintah Siasat No.1 atau dalam prakteknya ialah perang gerilya. Ia memerintahkan TNI untuk menghindari dari serangan Belanda dan mundur ke daerah pangkal perlawanan kemudian bergerilya dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dua strategi tersebut diadu di seluruh Jawa dan Sumatra selama tujuh bulan dengan hasil *military impasse*. Belanda tidak dapat menghancurkan kekuatan militer RI dan TNI juga tidak dapat mengusir Belanda dari Indonesia. Namun, dalam peristiwa tersebut menurut penulis, TNI berada dalam posisi yang lebih siaga dalam melawan Belanda. Jenderal Soedirman juga dapat menyatukan kekuatan militer dengan rakyat untuk melawan Belanda di medan pertempuran.



Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S.Maimoen, *Takhta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Buku ini merupakan biografi dari Sultan Hamengku Buwono IX yang disusun oleh Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S.Maimoen. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1982 dan diluncurkan saat peringatan ulang tahun Sultan Hamengku Buwono IX yang ke-70. Tidak hanya dari tim panitia, tulisan dalam buku ini juga berasal dari orang-orang yang pernah memiliki kedekatan dengan Sultan, seperti A.H.Nasution, Mohammad Natsir, Ny.Rachmi Hatta, A.R. Baswedan, dan lainnya.

Ditinjau dari isinya, buku cetakan ke-5 terdiri dari 3 tema, yaitu “Pak Sultan dari Masa ke Masa”, “Mengenal Sri Sultan dari Dekat” dan “Perjalanan Terakhir *Ngarsa Dalem*”. Total Bab yang ada dalam buku ini ialah 39 Bab. Bab ke-39 merupakan bab tambahan yang ada sejak cetakan ke-4.

Serangan Umum 1 Maret sendiri dibahas dalam Bab II dan Bab 19. Bab 19 “Ketika Terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949” merupakan kesaksian dari H.GBPB Prabuningrat dalam melihat keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam peristiwa tersebut. Ia menceritakan latar belakang Sultan dan rasa nasionalismenya sampai ke semangatnya dalam membela Republik Indonesia.

Dalam Bab 11 yang ditulis oleh Kustiniyati Mochtar menjelaskan

tentang keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam peristiwa tersebut. Menurut penulis, Sultan Hamengku Buwono IX lah pencetus ide Serangan Umum 1 Maret. Saat itu kondisi Yogyakarta sangat tidak kondusif di bawah tekanan kekuasaan Belanda. Sultan sebagai pemimpin tertinggi saat itu harus mengambil langkah menyambut forum PBB pada Februari 1949 demi menarik perhatian internasional atas eksistensi Indonesia.

Ide pun didapatkan Sultan Hamengku Buwono IX dan segera melakukan eksekusi. Ia menghubungi Panglima Besar untuk meminta persetujuan dan memanggil Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan gerilya. Dalam pertemuan di kompleks Keraton pada 13 Februari 1949, Letnan Kolonel Soeharto menyanggupi tugas tersebut. Serangan Umum dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi hari saat jam malam usai. Jogja pun dikuasai oleh para gerilyawan selama 6 jam. Peristiwa singkat tersebut berhasil menunjukkan bahwa Belanda tidak dapat menjaga keamanan di wilayah yang mereka kuasai.

Pasca peristiwa tersebut, pihak Belanda mencurigai keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX dalam penyerangan tersebut. Keraton pun diteror pasukan Belanda dan Jenderal Meyer mendatangi Sultan. Interogasi pun dilakukan, namun Sultan berhasil memulangkan mereka. Peristiwa tersebut ditulis Sultan dalam surat yang dikirimkan kepada Sudjono, Sekretaris Jenderal delegasi Indonesia.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret pun didengar oleh dunia internasional. Banyak negara lain yang bersimpati pada Indonesia dalam kegiatan diplomatik di PBB. Pada 28 Januari 1949 PBB pun memutuskan resolusi untuk menyelesaikan konflik antra Indoensia-Belanda. Perundingan antara Indoneisa (Roem) dan Belanda (Van Royen) pun berlangsung atau dikenal dengan *Van Royen-Roem Statement*. Hasilnya, pada 24 Juni 1949 Van Royen menyetujui penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Penarikan tersebut kemudian disaksikan oleh pejabat KTN yang diundang ke Yogyakarta. Soekarno dan Hatta dibebaskan dari tahanan dan kembali memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden.

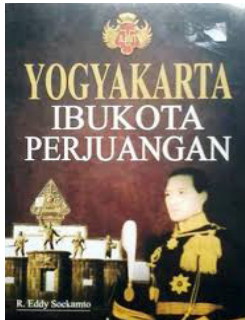
Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik, Yogyakarta: Galang Press, 2011.*

Kedua penulis buku ini memiliki kedekatan dengan keraton Yogyakarta,



baik secara budaya maupun politik. Sudomo sendiri merupakan penulis pidato Gubernur DIY. Selain itu, ia juga menjadi TIM DIY tentang keistimewaan DIY hingga Asisten I Sekwilda Prov. DIY. Kedekatan itu pula yang membuat buku ini hadir untuk dibaca.

Melalui buku ini, penulis hendak menyampaikan hal-hal yang dianggap penting seputar keistimewaan Yogyakarta dan keterlibatannya dalam peristiwa nasional, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949. Terdiri dari 22 Bagian, Serangan Umum 1 Maret 1949 dibahas dalam bagian ke 15 dengan sangat singkat, menjelaskan posisi DIY dan perdebatan yang terjadi perihal peristiwa tersebut. Menurut penulis, Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu bagian dari keistimewaan DIY, karena melalui peristiwa itulah DIY memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakan eksistensi Indonesia di mata dunia.



R. Eddy Soekanto, *Yogyakarta Ibukota Perjuangan*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005.

Buku ini sangat ringkas, berisi 103 halaman dengan 7 bab. Tentang Serangan Umum 1 Maret sendiri dibahas dalam bab 6. Buku ini tidak mencantumkan sumber-sumbernya dengan jelas, sehingga perlu dilakukan perbandingan. Meskipun begitu, buku ini menampilkan beberapa foto dan surat maupun pengumuman penting yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yogyakarta menjadi Ibukota RI.

Serangan Umum 1 Maret sendiri diceritakan pada akhir bab 5, di mana menurut penulis pada akhir 1948 - awal 1949 di Yogyakarta saat itu terjadi serangan-serangan kecil. Serangan tersebut tidak berpengaruh pada kedudukan Belanda di Yogyakarta. Untuk itu, Sultan HB IX mengambil inisiatif untuk melakukan serangan yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Ia menghubungi Jenderal Soedirman untuk meminta pertimbangan. Ia juga kemudian mengadakan pertemuan rahasia dengan Letkol Soeharto sebagai orang yang ditunjuk untuk melakukan operasi pada SU 1 Maret.

Dalam bab 6 diceritakan bagaimana pembagian wilayah, pasukan penyerangan dan pihak-pihak yang mendukung aksi tersebut. Akibat serangan dadakan, tentara Belanda kuwalahan. Kondisi yang kacau pun mencoreng kekuatan Belanda di daerah kekuasaannya. Pihak KTN yang pada saat itu berada di Yogya melihat bagaimana kenyataan yang terjadi,

berbeda dengan apa yang dilaporkan Belanda kepada PBB. Dukungan pun kemudian diberikan kepada Indonesia dari berbagai negara, baik Australia, Amerika dan Asia. Buah dari serangan tersebut ialah hasil perjanjian Roem-Roeyen 7 Mei 1949 yang sekaligus mengembalikan kedaulatan RI sebagai Negara dan penyerahan kendali pemerintahan di Yogyakarta dari Soekarno ke HB IX. Selain itu, perjanjian tersebut juga mendorong KMB.

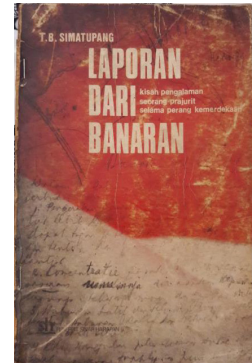
T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.

T.B. Simatupang adalah seorang anggota Militer yang ikut serta dalam perang revolusi. Buku *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan* merupakan catatan kesaksiannya saat ia berada di Banaran, sebuah pedalaman di Jawa Tengah. Dapat dikatakan pula bahwa buku ini merupakan otobiografi Simatupang, karena ia menjadi penutur langsung di dalamnya.

Buku ini menjadi penting dalam melihat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dari sudut yang berbeda. Jika di buku-buku sebelumnya banyak berfokus langsung pada Yogyakarta sebagai lokasi langsung terjadinya peristiwa Serangan Umum, dalam buku ini kita dapat melihat peristiwa tersebut dari jarak yang cukup jauh. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada pemahaman kita terhadap peristiwa yang terjadi.

Simatupang mencatat bagaimana ia mengalami dan menyaksikan serangan demi serangan yang dilakukan oleh pihak sekutu. Ia juga selalu mencatat perkembangan informasi yang ada di pusat pemerintahan, seperti perundingan yang dilakukan oleh pemerintah, kondisi presiden, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia terus berusaha mendapatkan informasi terkini untuk menyusun strategi di lapangan.

“Tanggal 1 Maret 1949, setelah kami melalui Kota-Kabupaten Wonosari, yang telah dibumihanguskan, maka kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Ir.Dipokusumo, yang sama-sama memimpin Staf Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka sedang menunggu-nunggu pasukan-pasukan kita akan melancarkan “SO” atau serangan umum (*oemoem*) atas kota. Inilah serangan yang beberapa waktu lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan



Dipokusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan “SO” ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatra dan New Delhi, yang kemudian akan menyiarkan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek yang sangat baik bagi kita.” (hlm.69)

Informasi-informasi yang ia dapatkan terkait dengan kondisi yang terjadi di pusat pemerintahan menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antar pasukan dalam menyebarkan berita. Seperti halnya juga berita yang ia dapatkan dari Residen Sudiro yang menginformasikan bahwa sikap Sultan Yogyakarta saat itu dapat diandalkan dalam melawan Belanda.

Hal menarik lainnya dari buku ini disampaikan di dalam pengantar oleh Prof.Dr.Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan militer. Menurutnya, apa yang ditulis oleh Simatupang bukan hanya sebuah memoar pribadi, namun lebih dari itu, yaitu merupakan kesaksian satu generasi yang ada bersama Simatupang pada tanggal 19 Desember 1949 yang bertekad untuk setia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Banyaknya tulisan yang membahas Serangan Umum 1 Maret 1949 secara tidak langsung menggambarkan betapa penting dan menariknya peristiwa tersebut untuk selalu dipelajari dan diingat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai perspektif yang dihadirkan, mulai dari pembahasan militer, politik, sosial budaya dan ekonomi lengkap dibahas dalam karya-karya yang telah ada. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Sebuah benang merah yang dapat ditarik dari seluruh karya-karya yang membahas Serangan Umum 1 Maret 1949 ialah tentang fungsi Yogyakarta sebagai wilayah kunci sekaligus benteng pertahanan atas adanya pemerintahan Republik Indonesia yang kemudian menjadikannya sebagai pusat serangan pasukan Belanda. Hal lain yang menjadi kesepakatan penting dari para penulis dalam bukunya ialah bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hanya menjadi peristiwa yang mampu mengembalikan status politik Indonesia secara penuh sebagai negara yang merdeka, namun juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik sipil maupun militer untuk bersatu dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan RI. §

Praktik Empiris

Revolusi, Perjuangan dan Agresi Militer Belanda

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan babak baru dan menentukan bagi perjalanan Bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan kata-kata magis yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Manuel Kaisiepo mengemukakan bahwa periode mempertahankan kemerdekaan disebut sebagai periode revolusi.¹ Revolusi menurut Anthony Reid adalah restrukturisasi fundamental dari suatu sistem politik dengan kekerasan pada waktu yang singkat.² Oleh karena itu, revolusi sarat akan pergolakan-pergolakan yang oleh Sartono Kartodirdjo diistilahkan dengan jaman “gegeran”, yang ditandai dengan “srobotan”, “gedoran, “pendaulatan” di samping masa perjuangan. Sartono melihat revolusi Indonesia sebagai proses politik yang penuh konflik antar golongan, pemberontakan massa terhadap tatanan yang ada dan hal ini hampir tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya.³ Onghokham menambahkan bahwa revolusi Indonesia merupakan proses yang penting dengan melibatkan seluruh komponen rakyat secara total dalam politik. Tidak hanya tenaga

dan pikiran, tetapi juga harta benda dan sumber daya lainnya dipertaruhkan dalam revolusi.⁴

Berdasarkan teori perspektif me konflik politik menyebutkan bahwa dalam revolusi Indonesia itu tidak boleh diabaikan referensi kepada struktur internasional dan perkembangan sejarah dunia. Dengan demikian akan terjadi interaksi faktor-faktor internal dan eksternal, keduanya terjalin erat dalam proses dialektika secara terus menerus. Sedangkan krisis politik yang membawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kekuasaan kolonial Belanda. Kedatangan Belanda merupakan ancaman yang serius bagi eksistensi Republik yang baru merdeka. Hal ini memunculkan semakin banyak kelompok-kelompok perlawanan atau badan-badan perjuangan yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana perjuangan, tapi juga sebagai pusat identitas kelompok serta wahana untuk menjamin kelangsungan hidupnya (*survival*). Kalau pada satu pihak tujuan mempertahankan kemerdekaan mempersatukan kesatuan-kesatuan perjuangan, pada pihak lain ideologi politik masing-masing acap kali memisahkan dan menimbulkan pertentangan, sehingga situasi krisis menjadi lebih hebat dan berubah menjadi situasi konflik.⁵ Dalam situasi konflik seperti itu, maka prasarana kekerasan memegang peranan penting, yang amat menarik di sini adalah konversi ideologi ke pandangan dan sikap

- 1) Manuel Kaisiepo, “Murba di tengah Persaingan: Tan Malaka dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949”, *Prisma* no. 9, September 1982, hlm. 72.
- 2) Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm 1.
- 3) Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektifme Struktural”, *Prisma* no. 8 Agustus 1981, hlm. 3.

4) Onghokham, “Revolusi Indonesia: Mitos dan realitas”, Jakarta: *Prisma* no. 8 1985.

5) Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm.5-6.

revolusioner.⁶

Sikap revolusioner muncul dari gagasan atau ide sebagai alternatif terjauh untuk menyelesaikan masalah yang berkembang dalam masyarakat.⁷ Sebagai akibat adanya gagasan dan tindakan revolusioner terjadilah revolusi. Idiologi revolusioner mampu membangkitkan gerakan revolusioner massa dengan menimbulkan ikatan-ikatan idiologis serta memobilisasi golongan-golongan sosial. Karena kedudukannya berbeda dalam masyarakat, golongan-golongan itu mendukung idiologi politik masing-masing. Keterlibatannya dalam proses revolusi dihayatinya lewat organisasi atau badan perjuangan. Gerakan idiologi revolusioner menawarkan nilai-nilai baru dalam orde sosial politik lama. Hal ini menyebabkan terjadinya *clash* di beberapa daerah antara organisasi revolusioner dengan unsur-unsur orde lama atau golongan berkedudukan (*establishment*) tidak dapat dihindari.⁸ Oleh karena itu, revolusi Indonesia tidak hanya menghasilkan konflik Indonesia dengan Belanda, tetapi juga konflik antar partai, konflik antar golongan yang berbeda idiologi, bahkan konflik antara kelompok yang berbeda visi dalam menyelesaikan revolusi.⁹

Sejak proklamasi, kondisi politik di Indonesia kurang menentu yang ditandai dengan bergabungnya partai-partai pendukung

pemerintah yang menghendaki visi diplomasi dengan partai-partai pendukung oposisi pimpinan Tan Malaka yang menghendaki visi perjuangan.¹⁰ Kondisi ini melemahkan republik terutama dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda yang datang bersamaan dengan sekutu sejak pertengahan Oktober 1945. Kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara benar-benar semakin kacau dan tidak aman setelah ada upaya penculikan dan pembunuhan Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin pada akhir bulan Desember 1945.¹¹

Melihat kondisi Jakarta yang tidak aman, pada tanggal 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubowono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dengan membawa pesan bahwa Yogyakarta siap menjadi tempat pemerintahan yang baru.¹² Kepedulian Sultan ini memperlihatkan begitu besarnya dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap pemerintahan RI yang baru tersebut. Hal itu juga terlihat dari sikap Sultan yang segera mendukung Republik yang diwujudkan dalam amanat dukungan terhadap RI tanggal 5 September 1945. Pemerintah RI merespon amanat tersebut dengan mengutus Mr. Sartono dan Mr. Maramis ke Yogyakarta dengan membawa "Piagam Penetapan" dari Presiden Soekarno tertanggal 19 Agustus 1945. Sejak pemimpin RI menyetujui pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 4 Januari

6) Muhammad Hatta, *Kumpulan Karangan IV* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1954), hlm. 245.

7) Sudjarwo, "Potret Diri Pemuda dalam Revolusi Kita", *Prisma*, no.8, 1981, hlm. 21.

8) Sartono Kartodirdjo (1981), *op. cit.*, hlm. 6.

9) Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial Politik Masa Revolusi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2014), hlm. 22-43

10) *Ibid.*

11) *Antara*, 27 Desember 1945

12) Suhartono, dkk., *Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia, 4 Januari 1946- 27 Desember 1949* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 60

1946, peranan Sultan HB IX dan masyarakat Yogyakarta untuk republik semakin besar.

Berpindahnya ibu kota RI ke Yogyakarta memberi waktu bagi Republik untuk tidak berhadapan langsung dengan Belanda yang pada waktu itu sudah menguasai Jakarta. Pemerintahan Syahrir berupaya keras berjuang melalui jalur diplomasi agar perang dapat dihindari. Beberapa perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda bermuara pada perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 antara PM Syahrir dengan delegasi Belanda yang dipimpin Prof. Schemerhorn.¹³ Hasil perjanjian yang menjadikan wilayah Indonesia hanya meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura membuat banyak pihak menjadi kecewa. Kenyataan ini menyebabkan Kabinet Syahrir jatuh pada tanggal 27 Juni 1947.¹⁴

Di sisi lain, melihat dinamika politik Indonesia yang bergejolak akibat perjanjian Linggarjati yang merugikan republik, Van Mook membuat penafsiran baru terhadap perjanjian Linggarjati. Pihak Belanda menganggap Indonesia merupakan negara persemakmuran yang mengakui Belanda sebagai negara induk. Sementara itu, pihak Indonesia menganggap bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat lepas dari kekuasaan Belanda.¹⁵

-
- 13) George M.C. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Ismail Bin Muhammad (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka, 1980), hlm. 224.
- 14) Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2014), hlm. 56
- 15) Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun, September 1948*,



Perbedaan penafsiran ini menyebabkan pada 15 Juli 1947 Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pasukan Indonesia mundur sejauh 10 Km dari garis Demarkasi. Pada tanggal 17 Juli 1947, PM Amir Syarifuddin melalui RRI menolak

(Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm.119



Foto 2.1. Suasana penandatanganan Perjanjian Renville di atas kapal USS Renville. Tampak Presiden Soekamo sedang menandatangani dokumen perjanjian, disaksikan Mr. Amir Sjarifuddin, H. Agus Salim, Dr. Leimena, dan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai wakil Indonesia. (1948-01-17/ IPHHOS)

ultimatum dari Belanda. Atas penolakan dari Indonesia, pada tanggal 20 Juli 1947 Van Mook mengumumkan tidak ingin berunding lagi dengan Indonesia dan tidak mengakui perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, pasukan Belanda menyerang wilayah Indonesia yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.

Agresi Militer Belanda I disebut juga dengan *operatie product*. Tujuan agresi ini adalah mengepung ibu kota RI dan menghapus kedaulatan RI, merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor, serta menghancurkan TNI.¹⁶ Agresi ini didukung oleh komandan KNIL, Jenderal Spoor yang diperkuat dengan 120.000 serdadu.¹⁷

Pasukan Belanda memfokuskan serangan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Timur. Sasaran serangan adalah mengepung ibu kota Yogyakarta, menguasai perkebunan di Sumatera Timur, menguasai pantai utara di Jawa Tengah dan perkebunan tebu dan pabrik gula di Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (*1e para compagnie*) di bawah Kapten C. Sisselaar.¹⁸

Dalam menghadapi serangan Belanda, TNI menggunakan strategi pertahanan linier yang ternyata kurang efektif karena peralatan

16) <http://www.artikelsiana.com/2015/11/sejarah-agresi-militer-belanda-i.html>

17) Suhartono, dkk., *Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia, 4 Januari 1946-27 Desember 1949* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 70

18) <http://sejarahmula.blogspot.co.id/2017/02/sejarah-agresi-militer-belanda-i-dan-ii.html>

perang yang sangat terbatas. TNI udara merespos serangan Belanda dengan serangan balik terhadap pertahanan Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga dengan menggunakan pesawat peninggalan Jepang.¹⁹ Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdurrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.²⁰

Setelah agresi militer Belanda I, PBB mengusulkan untuk membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda. Atas prakarsa KTN, terselenggara perjanjian Renville yang berhasil ditandatangani pada tanggal 18 Januari 1948 oleh delegasi Belanda yang dipimpin Abdulkadir Widjoatmodjo dengan delegasi Indonesia yang dipimpin PM Amir Syarifuddin. Hasil perjanjian Renville begitu mengecewakan banyak pihak karena wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan pergolakan politik yang begitu besar, sehingga kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948. Konflik politik berlanjut dan memuncak pada pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948.²¹

Kondisi politik dalam negeri Indonesia yang tidak menentu tersebut dimanfaatkan Belanda dengan melakukan agresi militer

Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Letjen Simon Hendrik Spoor sebagai panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia, memberikan instruksi pada seluruh tentara Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan ke Yogyakarta. Agresi ini disebut juga dengan *Kraai Operatie* atau Operasi Gagak yang merupakan operasi pamungkas yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Belanda mengerahkan pasukan baret merah terbaiknya untuk diterjunkan ke Maguwo.²² Tujuan agresi Belanda adalah menghancurkan kedaulatan Indonesia dengan menyerang Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara. Belanda sengaja membuat kondisi Yogyakarta tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu, Belanda juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara defacto sudah tidak ada.²³

Pada pukul 6:45, satu kompi pasukan baret merah Belanda (*Dutch Paratrooper*) mulai melompat dari Dakota yang membawa mereka. Dalam kurun waktu 25 menit, mereka berhasil melumpuhkan 150 tentara Indonesia yang menjaga Pangkalan Udara Maguwo dan berhasil menewaskan 128 tentara Indonesia.

19) Suhartono, *op. cit.*, hlm. 72

20) <http://sejarahmula.blogspot.co.id/2017/02/sejarah-agresi-militer-belanda-i-dan-ii.html>

21) Julianto Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 16.

22) "Mengenang 68 Tahun Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta", lihat: <http://angkasa.grid.id/sejarah/mengenang-68-tahun-agresi-militer-belanda-ii-di-yogyakarta/>

23) Sejarah Agresi Militer Belanda 1 dan 2 (Latar Belakang, Peristiwa, & Tujuan) lihat: <http://kakakpintar.com/sejarah-agresi-militer-belanda-1-dan-2-latar-belakang-peristiwa-tujuan/>



Foto 2.2. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville, pasukan TNI Divisi Siliwangi harus dipindahkan dari Jawa Barat ke Jogakarta (wilayah RI). Tampak tentara Pocket/Siliwangi tiba di ibukota Yogyakarta dari Jawa Barat. (1948-02-12/ IPHHOS)

Di titik yang sama, pesawat yang mengangkut pasukan baret hijau Belanda (dahulu dipimpin Kapten Raymond Westerling) dari Semarang juga mendarat. Jumlah kedua pasukan tersebut sekitar 432 personel dan dipimpin Letnan Kolonel van Beek. Mereka berhasil menembus pertahanan darat TNI di garis demarkasi yang dipasang

rintangan berat oleh Divisi II Gunungjati. Brigade Tijger, terutama Korps Speciale Troepen (korps pasukan khusus militer Belanda) bergerak di sisi selatan rel kereta api dan menyusun serangan dengan membagi tiga kolone.²⁴

Kira-kira pukul 15:00, pasukan yang dikomandoi Van Beek tiba di depan Istana Gedung Agung, sebelah selatan Malioboro. Di sana hanya terdapat Kompi II Corps Polisi Militer (CPM) yang dipimpin Lettu Susetio. Tak

24) Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operati Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat 1)*, (Jakarta: Gramedia, 2006)

imbang kuantitas serta tanpa bala bantuan, kondisi pasukan Susetio makin terjepit dalam aksi tembak-menembak. Seorang anak buah Susetio, Letnan Dua Sukotjo Tjokroatmodjo, mengusulkan kepadanya untuk segera membawa pergi Presiden Soekarno dan jajaran pejabat sipil lain keluar dari Istana, sementara itu Sukotjo bersama 30 personel CPM lainnya akan bertempur melawan tentara Belanda. Namun Soekarno malah memberi perintah kepada Susetio untuk berhenti menembak, sambil menunggu kedatangan van Beek di depan Istana. Kala itu Soekarno didampingi Kepala Staf Angkatan Udara Soerjadi Soerjadarma, Sekretaris Negara Mohammad Ichsan, dan Menteri Luar Negeri Agus Salim. Letkol van Beek pun menemui Soekarno. Setelah memberi hormat, van Beek berkata:

“Anda sekarang dalam tahanan rumah. Tuan Soekarno, saya mendesak kepada Tuan supaya Tuan memerintahkan kepada pasukan-pasukan Tuan agar menyerah. Jika tidak melakukannya, saya jamin kepada Tuan bahwa seluruh tentara Tuan akan dihancurkan dalam satu minggu.”²⁵

25) *Ibid*

Rosihan Anwar menyebutkan bahwa serangan di hari Minggu itu melicinkan militer Belanda menguasai kantor telepon pada pukul 11 siang. Satu jam kemudian mereka berhasil merebut gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan pada pukul 15:30 seluruh kota telah berhasil dikuasai militer Belanda.²⁶ RRI Yogyakarta merupakan kantor radio penting yang dimiliki republik selain RRI yang berada di Surakarta, Kediri, Blitar, Madiun, Magelang, Pati, Kebumen, dan Wonosobo. Rupanya, beberapa hari sebelum *clas* Belanda II, desas-desus mengenai akan adanya serangan telah beredar di masyarakat terutama kalangan para pekerja radio. Hal inilah yang mendorong dipindahkannya beberapa alat pemancar radio dari Yogyakarta ke Playen Wonosari Gunungkidul. Pemancar radio di Playen Gunungkidul ini berperan penting dalam menyebarkan berita Serangan Umum 1 Maret 1949 ke seluruh penjuru dunia.²⁷

Setelah Yogyakarta dikuasai pasukan Belanda, bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta para pejabat tinggi lain di Yogyakarta, Soekarno dibawa tentara Belanda dan diasingkan ke Sumatera. Sementara Panglima Besar Soedirman dan sekelompok tentara beserta dokter pribadinya, lebih memilih untuk melakukan perang gerilya di luar kota.²⁸

26) Rosihan Anwar, *Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950* (Jakarta: Grafiti Press, 1985)

27) “Mengenang 71 tahun RRI” <https://www.kompasiana.com/pantjewa/57d2e4f23793736377eef84b/mengenang-71-tahun-rri?page=all>

28) Lihat: “Pemberitahuan PDRI, 19 Desember 1949”, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, ANRI, no. 985.

Gerilya dan Serangan-Serangan Pendahuluan

Saat pasukan Belanda berupaya menuju pusat kota Yogyakarta dari lapangan udara Maguwo, Hatta memimpin sidang kabinet darurat di Gedung Negara untuk mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi serangan tersebut. Keputusan yang paling penting dari sidang kabinet tersebut adalah mengalihkan kekuasaan RI kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Safruddin Prawiranegara dan berkedudukan di Bukittinggi Sumatera Barat.²⁹ Keputusan itu tidak secara langsung mengisyaratkan bahwa pemimpin-pemimpin republik memilih menerima konsekuensi ditawarkan Belanda dan tidak akan melakukan gerilya. Hal tersebut juga ditegaskan Soekarno dalam autobiografinya saat diminta Jenderal Soedirman untuk ikut bergerilya, “Engkau seorang prajurit”, kata Soekarno. “Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukan pelarian utukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua.”³⁰

Walaupun Jenderal Soedirman dan beberapa pemimpin militer kecewa atas

keputusan tersebut, beberapa sejarawan justru melihat sikap Soekarno dan Hatta merupakan suatu hal yang tepat. Asvi Warman Adam mengemukakan bahwa, dengan ditawannya Soekarno dan Hatta, peluang untuk berunding semakin besar daripada pemimpin sipil ikut bergerilya.³¹ Kahin yang waktu agresi 19 Desember 1948 berada di Yogyakarta mengemukakan bahwa kekuatan militer republik tidak cukup memadai untuk melakukan perlindungan terhadap Soekarno dan Hatta. Bahkan bisa jadi akan membebani dan merepotkan gerak gerilya para pejuang.³² Simatupang pun mengatakan bahwa jika Soekarno-Hatta ikut, diperlukan banyak pengawal untuk menjaga keselamatannya. Mungkin sampai satu batalyon dan kita tidak memiliki batalyon pengawal.³³

Soedirman yang sedang mengalami sakit Tuberkolosis yang akut dan hanya memiliki satu paru-paru melanjutkan perang dengan cara gerilya. Sebelum meninggalkan Gedung Negara, Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah kilat nomor 1 yang ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang. Perintah Kilat tersebut berisi pernyataan tentang serangan yang dilakukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan perintah untuk melaksanakan rencana yang

29) Lihat: “Pemberitahuan PDRI, 19 Desember 1949”, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, ANRI, no. 985. Bisa dilihat secara lebih rinci dalam: Masyarakat Sejarawan Indonesia, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang* (Jakarta: MSI, 1990).

30) Cindy Adam, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (Edisi revisi)* (Jakarta: Media Presindo, 2011)

31) Asvi Warman Adam, *Menguak Misteri Seharah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)

32) “68 Tahun Agresi Militer II: Mengapa Bung Karno Tidak ikut Gerilya bersama Soedirman?” lihat: <https://tirto.id/mengapa-bung-karno-tak-ikut-gerilya-bersama-soedirman-b9ZJ>

33) T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981)

telah ditetapkan sebelumnya dalam melawan Belanda. Rencana yang dimaksud Soedirman adalah perintah untuk melakukan perang gerilya yang telah dibicarakan dan ditetapkan dalam Perintah Siasat No. 1 yang dikeluarkan pada rapat TKR tanggal 12 Mei 1948.³⁴

Perang gerilya diambil dari bahasa Spanyol yaitu *guerilla* yang berarti perang kecil. Nasution mengemukakan bahwa perang gerilya merupakan perang sembunyi-sembunyi yang sangat efektif, dapat menipu dan mengelabui musuh, bahkan melakukan serangan kilat.³⁵ Perang ini membutuhkan penguasaan medan, mobilitas pasukan yang cepat dan terus menerus, dan koordinasi yang matang. Dalam melakukan perang gerilya, Jenderal Soedirman beserta segelintir pengawalnya harus melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju Bantul, lalu ke timur melalui Gunungkidul bagian selatan, Pracimantoro, Wonogiri, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, kembali ke barat hingga masuk kota Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Perjalanan gerilya itu menempuh lebih seribu kilometer yang tidak hanya sulit, tetapi juga penuh bahaya. Soedirman yang sakit akut terpaksa berjalan menggunakan tandu, bahkan pernah diangkat menggunakan andong yang ditarik oleh para pengawalnya secara bergantian. Mata-mata musuh telah bertebaran di mana-mana. Untuk mengelabui musuh, rombongan kadang dipisah dan tandu yang biasa mengangkutnya diisi oleh anak buahnya yang bernama Heru Keser.



Foto 2.3. Presiden Soekarno dalam tawanan tentara Belanda di Maguwo, Yogyakarta. [Presiden Soekarno tiba di Lapangan Terbang Maguwo Yogyakarta dalam kawalan ketat pasukan Belanda saat peristiwa Agresi Militer Belanda ke III. (1948-12-19/ IPHHOS)]

- 34) Lihat dalam: "Instruksi Markas Besar Komando Djawa" *Djogdja Documenten, 1945-1949*, ANRI no. 214
- 35) A.H. Nasution, *Pokok-Pokok Perang Gerilya: Dan Pertahanan republik Indonesia Di Masa Yang lalu dan Akan Datang* (Jakarta: Narasi, 2013), hlm. 1-10.

Sementara itu, Soedirman menempuh rute lain dengan dibopong oleh pengawalnya. Untuk mengelabui musuh, Soedirman menggunakan nama samaran Pak Dhe. Keselamatannya sangat ditentukan kepercayaannya terhadap penduduk setempat yang telah berbaik hati menyediakan rumah dan makanan serta pemandu yang mampu menunjukkan jalan yang aman dilalui. Selama tinggal di desa Pakis, tempat ia mengkoordinasikan perang gerilya dengan pasukan di wilayah lain, Soedirman sangat mempercayai kepala desa setempat yang ia anggap merupakan yang paling loyal dari yang pernah ditemui. Anak kepala desa itu sendiri bahkan bekerja sebagai kurirnya. Pernah pula suatu ketika anak buahnya tertembak kakinya, sedangkan musuh semakin dekat. Rakyat bergerak cepat dengan membantu menyembunyikan tubuh tentara yang terluka dengan menutupinya menggunakan dedaunan.³⁶

Keputusan Soedirman melakukan gerilya diikuti oleh pemimpin militer lainnya beserta seluruh pasukan TNI. TB Simatupang menyingkir ke luar kota dan Nasution yang saat itu berada di Jawa Timur memutuskan segera kembali ke Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan yang mencekam, di bawah ancaman pesawat musuh, kereta api yang membawanya berhenti di stasiun Srowot-Prambanan tanpa pernah masuk ke kota yang situasinya sudah tidak aman. Nasution dan rombongan memilih menuju utara ke arah lereng Merapi dan memulai perang gerilya.

Pada tanggal 22 Desember 1948, Kolonel Nasution yang merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Jawa mengeluarkan maklumat No. 2/

MBKD yang berisi pemberlakuan pemerintahan militer untuk seluruh Jawa.³⁷ Pemberlakuan pemerintahan militer berarti lebih memfungsikan dan mengefektifkan struktur organisasi militer yang sudah dibentuk sejak tanggal 28 Oktober 1948 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan no. A/582/48. Surat keputusan tersebut menetapkan pembentukan Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dengan panglimanya Kolonel Abdul Haris Nasution. MBKD membawahi 4 divisi dengan 3 daerah militer istimewa dan masing-masing panglima Divisi merangkap sebagai Gubernur militer, kecuali Divisi IV Siliwangi. Daerah Militer Istimewa adalah sebagai berikut:

1. Daerah Militer Istimewa I meliputi Surabaya, Malang, dan Kediri. Panglima Divisi I/ GM I adalah Kolonel Sungkono.
2. Daerah Militer Istimewa II, meliputi Solo, Semarang (bagian timur), Pati, Bojonegoro, dan Madiun. Panglima Divisi II/ GM II adalah Kolonel Gatot Subroto.
3. Daerah Militer Istimewa III, meliputi Kedu, Banyumas, Pekalongan, Yogyakarta, dan Semarang bagian barat. Panglima Divisi III/ GM III adalah Kolonel Bambang Sugeng.³⁸

Dalam melaksanakan perang gerilya,

Lihat pula: S. Margana, dkk. *Gelora di Tanah raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949* (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, 2017), hlm. 120.

37) Yayasan 19 Desember 1948, *Dokumen RIPRESS dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 50

38) "Instruksi Markas Besar Komando Djawa" *Djogdja Documenten, 1945-1949*, ANRI no. 214; lihat pula: Indriastuti, *Pemerintahan Militer di Daerah Gerilya Gunung Sumbing Pada Tahun 1948-1949* (Semarang:

36) Dinas Sejarah Angkatan Darat, 1985, hlm 123.;

Nasution menetapkan wilayah Kalibawang di Kulon Progo sebagai tempat Markas Besar Komando Djawa (MBKD). Kalibawang yang terletak di barat laut kota Yogyakarta merupakan daerah perbukitan bagian dari pegunungan Menoreh. Dua desa di Kalibawang yang menjadi pusat aktivitas pemimpin-pemimpin militer seperti Nasution dan Simatupang adalah Banjarsari dan Banjarharjo. Kedua desa tersebut barangkali merupakan tempat yang paling banyak disinggahi oleh pemimpin republik selama gerilya. Selain Simatupang dan Nasution, sejumlah petinggi lain yang pernah tinggal atau singgah di kedua desa tersebut, antara lain: Bambang Sugeng, Djatikoesoemo, M.T. Haryono, Ali Budiardjo, A.K. Gani, Mokoginto, Djodjoningrat, dan Kawilarang. Di kedua desa tersebut, Nasution dikenal sebagai Pak Guru, sebagaimana saat awal bertemu dengan masyarakat memperkenalkan dengan profesi itu. Selama bergerilya, tentara membaaur dengan rakyat. Sejumlah pelatihan militer diselenggarakan untuk merekrut tenaga baru. Di Kalibawang, diadakan pula pelatihan bahasa Inggris yang diampu oleh Mr. Budihardjo dan Mr. Sasto Pawiro,³⁹

Dalam struktur pemerintahan militer, di bawah MBKD adalah divisi-divisi yang membawahi daerah-daerah militer berdasarkan tanggungjawab dan kewenangan yang telah

ditunjuk. Divisi III yang membawahi daerah militer di Yogyakarta dan sekitarnya di bawah komando dan tanggung jawab Kolonel Bambang Sugeng yang bermarkas di desa Kaliangkrik. Untuk memudahkan koordinasi dalam melakukan gerilya, Kolonel Bambang Sugeng mengeluarkan Perintah sebagai Panglima Divisi III No. 1/HD/1948 tanggal 26 Desember 1948 tentang pembentukan daerah gerilya atau wilayah pertahanan yang disebut dengan *Wehrkreise* (WK) dan *Subwehrkreise* (SWK). Dalam daerah militer Divisi III, pembagian *Wehrkreise* adalah sebagai berikut:

1. *Wehrkreise* I dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Bachrun. Wilayahnya meliputi Karesidenan Pekalongan, Banyumas, dan Wonosobo dengan markas di desa Makam.
2. *Wehrkreise* II dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini. Wilayahnya meliputi Kedu dan Kendal dengan markas di desa Bruno.
3. *Wehrkreise* III dipimpin Letnan Kolonel Soeharto membawahi wilayah Yogyakarta dengan markas di desa Segoroyoso Bantul.⁴⁰

Wehrkreise berasal dari bahasa Jerman yang berarti lingkaran atau daerah pertahanan. Sistem ini dipakai untuk mempertahankan setiap wilayah kepulauan maupun provinsi, dan dipimpin oleh seorang komandan. Masing-masing komandan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan mengembangkan

Fak Sastra Undip Press, 1988), hlm. 40-41.

39) Tashadi, dkk., *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949* (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), hlm 125; Lihat Pula: S. Margana, *op. cit.*, hlm. 121

40) Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia* (Yogyakarta: LP3ES, 2010), hlm. 408.

perlawanan. Sistem Wehrkreise sama sekali meninggalkan sistem pertahanan linier. Yogyakarta merupakan bagian dari daerah pertahanan atau *wehrkreise* III di bawah kepemimpinan Letkol. Soeharto. Sebelum ditunjuk sebagai komandan *Wehrkreise* III, Soeharto merupakan komandan Brigade 10 yang berkedudukan di Yogyakarta.⁴¹ Pada saat terjadi agresi militer Belanda 19 Desember 1948, Soeharto mendapat penjelasan dari Kol. Zoelkifli Loebis bahwa Soekarno dan Hatta masih berada di kota, tetapi Soedirman sudah bergerak ke luar kota mengadakan gerilya. Sore harinya, Soeharto beserta pasukannya memutuskan melakukan gerilya menuju Ngoto yang berada di sebelah selatan Yogyakarta. Setelah lima hari melakukan perjalanan dan konsolidasi di wilayah Yogyakarta, Soeharto memutuskan memindahkan pasukannya dari Ngoto menuju dukuh Bibis desa Segoroyoso yang terletak di Bantul.⁴² Bantul merupakan tempat yang tidak asing bagi Soeharto dan pasukannya. Desa Segoroyoso sudah sejak lama terbangun hubungan baik melalui pelatihan Laskar Rakyat. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Soeharto dapat mengkoordinasikan kembali kekuatan-kekuatan gerilya.⁴³

Berdasarkan surat dari Panglima Divisi III Bambang Sugeng tanggal 26 Desember 1948 tentang pembentukan *Wehrkreise* dan

Subwehrkreise, Soeharto yang sudah ditunjuk sebagai komandan *Werkreise* III segera membentuk *Subwerkreise* (SWK). Adapun *Subwerkreise* (SWK) yang dibentuk adalah:

1. SWK 101 di daerah Bantul Timur dengan Komandan Mayor Sekri Soenarto.
2. SWK 102 di daerah Bantul Barat dengan Komandan Mayor Sardjono.
3. SWK 103 di daerah Godean dengan Komandan Mayor Ventje HN. Sumual.
4. SWK 104 di daerah Sleman dengan Komandan Mayor Soekasno.
5. SWK 105 di daerah Gunungkidul dengan Komandan Mayor Soedjono.
6. SWK 106 di daerah Kulon Progo dengan Komandan Letkol R. Soedarto⁴⁴

Sejak terjadi pergeseran pasukan Sakri Soenarto ke Cangkringan, pada pertengahan Januari 1949 terjadi pergeseran penomoran SWK sekaligus komandan yang bertanggung jawab, yaitu:

1. SWK 101 di daerah dalam kota Yogyakarta dengan komandan Letnan Marsudi
2. SWK 102, di wilayah Yogyakarta bagian selatan atau daerah Bantul yang mencakup Bantul timur dengan Komandan Mayor Sardjono.
3. SWK 103 di daerah Gamping dengan komandan Letkol Soehoed.
4. SWK 103A di daerah Godean dengan

41) Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat* (Bandung: Disjarah, 1972), hlm. 80

42) Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya* (Jakarta: PT Lamtoro Gung Persada, 1993), hlm 126.

43) S. Margana, *op. ct.*, hlm. 120.

44) Dinas Sejarah TNI AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat* (Bandung: Disjarah & Fa Mahyuma, 1972), hlm. 80; Lihat pula Oemar Sanusi, dkk., *Api Segoroyoso* (Yogyakarta: Dinas Sosial DIY, 1981), hlm. 26.

komandan Mayor Vantje Soemoel.

5. SWK 104 di daerah Sleman dengan komandan Mayor Soekasno.
6. SWK 105 di daerah Gunungkidul dengan komandan Mayor Soedjono.
7. SWK 106 di daerah Kulon Progo dengan komandan Letkol Soedarto.⁴⁵

Setelah Wehrkreise III melakukan konsolidasi dan penataan pasukan, upaya untuk menekan Belanda dan mengganggu posisi Belanda dengan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda harus segera dilakukan. Walaupun menemui banyak kendala dan rintangan, serangan-serangan balasan terhadap Belanda dapat memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Hal ini seperti apa yang disampaikan Soeharto sebagai komandan *Wehrkreise III*.

“Perlawanan harus tetap kita adakan dengan teratur, sesuai dengan rencana perlawanan sepanjang masa. Kepercayaan rakyat di kota harus segera kita kembalikan dengan mengadakan serangan balasan. Semua sulit kita laksanakan, akan tetapi harus kita kerjakan. Dengan kesukaran-kesukaran

tersebut di atas maka hanya dengan satu jalan dapat kita laksanakan. Pimpinan harus berjalan berkeliling mencari di mana pasukan berada, kemudian memberi tugas tertentu kepada mereka. Mengumpulkan pasukan-pasukan yang tersebar dan menempatkan mereka di tempat yang baik untuk mengadakan perlawanan gerilya.”⁴⁶

Serangan-serangan balasan yang dilakukan TNI dalam lingkungan *Wehrkreise III* yang bersifat terpadu dan menyeluruh terhadap posisi Belanda setidaknya dilakukan empat kali, sebelum akhirnya nanti melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 ke pusat kota Yogyakarta.⁴⁷ Serangan bersama atau umum pertama awalnya direncanakan pada tanggal 30 Desember 1948 sebagai “hadiah” tahun baru untuk Belanda. Oleh karena pada tanggal 28 Desember 1948 Belanda bergerak dari Kota Yogyakarta menuju ke barat lalu ke Selatan atau ke arah Bantul, maka serangan umum

45) *Ibid.*, hlm 80’ Lihat Pula: Team Penulis Djogjakarta 1945, “Perlawanan terhadap Belanda di tahun 1948-1949”, <http://djokja1945.blogspot.com/2014/11/perlawanan-terhadap-belanda-di-tahun.html>

46) A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II* (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 74-75

47) Persiapan penyerangan yang dilakukan pada bulan Desember 1948 dapat dilihat dalam arsip: “Siaran Radio bulan Desember 1948 tentang gerilya rakyat”, dalam *Djogdja Documenten 1945-1949*, ANRI, no. 215.

ini diajukan pada tanggal 29 Desember 1949. Perintah penyerangannya adalah dilakukan pada waktu malam, menghancurkan kekuatan musuh dan merampas senjata sebanyak-banyaknya, serta membumihanguskan tempat-tempat yang dianggap penting.⁴⁸

Pada tanggal 29 Desember 1948 mulai pukul 21.00 pasukan gerilya republik memasuki kota Yogyakarta menyerang pos-pos Belanda di sekitar Kantor pos dan Secodiningrat, Ngabean, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pengok, dan Gondomanan. Pada tanggal 31 Desember 1948 di sektor barat, SWK 103A yang dipimpin Mayor Ventje Soemoel melakukan penyerangan di pos-pos Belanda di wilayah Godean. Ventje Soemoel dibantu komandan-komandan Brigade XVI, seperti Kapten Willy Sumantri, Kapten Runtunuwu, Mayor Gustav Kamagie, Letnan Kailola. Serta dibantu jagoan-jagoan tempur dari Tim Khusus Combat Brigade XVI seperti Letnan Kandou, Letnan Woimbon, Letnan Sigar, dan lain-lain. Di sektor utara, pada tanggal 1 Januari 1949 Batalyon 151 pimpinan Kapten Hariyadi melakukan serangan terhadap kedudukan pasukan Belanda di Kaliurang. Pasukan ini berhasil menduduki Pakem dan memutus jalur komunikasi yang menghubungkan Yogyakarta dengan Kaliurang. Pada pertempuran tanggal 5 Januari di desa Tunggul yang terletak di Barat Kaliurang, Komandan Batalyon 151 Kapten Hariyadi meninggal dunia yang kemudian posisinya digantikan Lettu Hardjosoedirjo.⁴⁹

Pada tanggal 7 Januari 1949, komandan Wehrkreise III mempersiapkan serangan

kedua di pos komando Segoroyoso dengan mengeluarkan perintah siasat no. 09/S/Cop/49 yang ditujukan kepada seluruh komandan SWK. Serangan kedua yang terlaksana pada tanggal 9 Januari 1949 ini menitikberatkan pada serangan ke dalam kota dengan melewati celah-celah pos musuh serta menghancurkan pos-pos musuh dari belakang. Kapten Erman yang berada di daerah SWK 101 menghancurkan kedudukan musuh di Sentul dan Balapan. Mayor Sardjono yang berada di SWK 102 menghancurkan kedudukan musuh di wilayah Kraton ke selatan hingga jalan Parangtritis, Imogiri, dan Bantul. Letkol Soehoed yang berada di wilayah SWK 103 menghancurkan kedudukan musuh di daerah Wirobrajan, Ngabean, dan Kraton ke barat. Letkol Rapper dengan pasukan yang berada di wilayah SWK 103A menghancurkan musuh di Gandekan, Stasiun kereta api sampai ke jalan Magelang. Lettu Hardjosoedirjo yang berada di SWK 104 menghancurkan musuh antara Yogyakarta-Tempel. Kolonel Djatikoesoemo dengan pasukan yang berada di SWK 105A menghancurkan jalan dan kedudukan musuh di antara Yogyakarta – Kaliurang. Mayor Soedjono dengan pasukan yang berada di SWK 105 menghancurkan posisi Belanda di antara Yogyakarta-Prambanan dan bangunan-bangunan di Maguwo yang dikuasai Belanda.⁵⁰

Pada serangan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 1949, beberapa pasukan republik dengan berani memasuki kota Yogyakarta dan menyerang Hotel Merdeka yang pada waktu itu dihuni pejabat-pejabat penting Belanda. Kahin yang pada waktu itu berada di

48) Nasution, *op. cit.*, hlm. 77

49) Seskoed, *op. cit.*, hlm. 140-142

50) Oemar Sanoesi, *op. cit.*, hlm. 32

Yogyakarta, menyaksikan sendiri serangan itu yang digambarkannya sebagai serangan yang sangat gencar dan sengit.⁵¹ Dalam serangan bersama tersebut, kadet Lily Rochli gugur sewaktu menyerang markas militer Belanda di Gondomanan. Pada tanggal 11 Januari 1949 terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dengan TNI di daerah Cepet yang menewaskan 2 orang pejuang, yaitu Letda Kasijan dan Agen Polisi Soekarjo. Serangan pasukan gerilya yang dipimpin Sudiro dan Munawar terhadap pos-pos Belanda di dusun Gondang Legi Donoharjo pada tanggal 13 Januari 1949 mengakibatkan pasukan Belanda meninggalkan pos-pos pertahanannya. Untuk merebutnya kembali, Belanda menggunakan bantuan udara yang mengakibatkan 7 pejuang gugur.⁵²

Serangan kedua ini dilaksanakan pada malam hari dan mewajibkan pasukan yang melakukan serangan mengenakan janur kuning atau dengan kata sandi "Mataram-Menang". Serangan tersebut menimbulkan korban luka dan meninggal dunia di kedua belah pihak. Keesokan harinya, Belanda melakukan pembersihan di daerah Imogiri yang oleh Belanda dianggap sebagai basis kedudukan pasukan gerilya republik.

Beberapa hari setelah melakukan serangan kedua, pasukan TNI SW III melakukan serangan ketiga pada tanggal 16 Januari

1949 berdasarkan perintah siasat no. 10/S/Cop/49 tertanggal 11 Januari 1949. Surat tersebut memerintahkan masing-masing SWK mengadakan serangan, penghancuran dan penghadangan di sektornya masing-masing berdasarkan surat perintah sebelumnya. Apabila 2 serangan umum sebelumnya dilakukan pada malam hari, serangan ke tiga ini dilakukan sore hari, yaitu pukul 06.00 sore.⁵³

Serangan ini juga mencoba menghambat gerak maju pasukan Belanda yang mulai menyerang dan menguasai wilayah Bantul. Pada tanggal 19 Januari 1949, 2 kompi pasukan Belanda berhasil menduduki Imogiri, kemudian menyerang Barongan yang terdapat pabrik gula. Pasukan Belanda terus bergerak maju ke kota Bantul, kemudian menyerang Plered, dan Padokan. Kesatuan SWK terutama SWK 102 berusaha menghambat laju pasukan Belanda dengan bersama-sama rakyat menggali lubang-lubang di jalan dan menebangi pohon-pohon agar kendaraan Belanda tidak bisa lewat. Pada tanggal 28 Januari 1949, pasukan Belanda menyerang dari Bantul kemudian Selarong, Bibis, Bangunjiwo, dan berhenti di Gunung Kanigoro. Sementara itu, pasukan gerilya dan penduduk dari desa Kalimanjung yang terdesak patroli Belanda melarikan diri ke Gunung Kanigoro. Pasukan Belanda yang berada di Gunung Kanigoro menembaki pejuang dan penduduk yang melarikan diri itu, sehingga jatuh korban sebanyak 41 orang.⁵⁴

Dengan semakin sengitnya pertempuran,

51) Pramoedya Ananta Tour, dkk., *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid V (1949)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 9.

52) Team Penulis Djogjakarta 1945, "Perlawanan terhadap Belanda di tahun 1948-1949", <http://djokja1945.blogspot.com/2014/11/perlawanan-terhadap-belanda-di-tahun.html>

53) Seskoed, *op. cit.*, hlm. 145

54) Team Penulis Djogjakarta 1945, "Perlawanan terhadap Belanda di tahun 1948-1949", <http://djokja1945>.

pasukan yang tergebaung dalam Wehrkreise III segera melakukan serangan ke empat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1949. Pada serangan ke empat ini, koordinasi antara SWK dengan pihak pemerintahan sipil yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX semakin mantap. Serangan keempat ini yang membuka jalan dilakukan serangan umum yang jauh lebih besar terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta dan dilakukan pada siang hari, yang kemudian dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949.

Ide dan Pematapan Serangan

Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan yang terpadu dari berbagai macam kekuatan dari berbagai macam latar belakang dengan tujuan utama mempertahankan Kemerdekaan yang telah diproklamasikan tgl 17 Agustus 1945. Sejak agresi militer Belanda II yang menempatkan Yogyakarta daerah pendudukan Belanda, TNI melalui *Wehrkreise* III telah melakukan serangan secara serentak sebanyak 4 (empat) kali. Keberadaan pasukan gerilya dengan operasi penyerangan tersebut mendapat bantuan dari berbagai macam pihak, baik masyarakat, ibu-ibu yang mendirikan dapur umum, bahkan penguasa Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono IX.

Dapur umum memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan dan memenuhi logistik para gerilya terutama di markas utama SW III yaitu Segoroyoso. Desa yang terletak di Kabupaten Bantul berjarak 15

km dari kota Yogyakarta ini ditempati lebih dari tiga ratus tentara dan empat puluh orang sakit. Pada malam hari jumlahnya semakin bertambah. Satu rumah penduduk rata-rata dihuni 20-orang.⁵⁵

Ibu-ibu menyiapkan kayu bakar, minyak tanah, menyalakan perapian, memasak nasi dan lauk pauk dan meletakkannya di daun-daun pengganti piring. Jadwal disusun untuk memudahkan koordinasi dan kelancaran penyediaan makanan. Empat orang perempuan, satu pon, dan satu tentara tiap hari bertanggung jawab menyediakan sekitar enam puluh sampai seratus kilogram beras, sayur-sayuran seperti lodeh, urap, dan melinjo muda, terong dan labu siam, serta lauk pauk berupa tempe, daging ayam, kambing, dan sapi.⁵⁶

Dana didapat dari berbagai macam sumber, seperti kas desa atau iuran berupa barang maupun uang dari penduduk yang dianggap mampu. Dana didapat pula dari pemberian Letkol Soeharto sebagai pimpinan gerilya uang sebesar 4.000 rupiah per hari maupun sumbangan dari para pedagang perempuan di pasar Beringharjo pasar-pasar di Segoroyoso yang dikumpulkan oleh para pon.⁵⁷

Pon merupakan profesi baru yang muncul sebagai akibat dari tuntutan dan kebutuhan perjuangan selama revolusi. Pon merupakan perempuan-perempuan yang memiliki tugas khusus mengatur distribusi atau lalu lintas

55) Sri Margana, dkk., *Gelora di tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi, 1945-1949*, (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, 2017), hlm. 184

56) *Ibid.*

57) Oemar Sanoesi, *op. cit.*, hlm. 20; Lihat pula Sri Margana, dkk., *op. cit.*, hlm. 184-185

blogspot.com/2014/11/perlawanan-terhadap-belanda-di-tahun.html

barang di wilayah ibu kota, memastikan logistik dapur umum terpenuhi, dan mendistribusikan nuk (nasi bungkus) untuk prajurit di front. Para pon atau sering disebut si pon ini, setiap hari menghadang para pedagang yang berjualan di pasar.⁵⁸ Agar tidak diketahui musuh atau pihak Belanda atau mata-mata Belanda, lokasi “penghadangan” atau tempat meminta barang dagangan dengan berpindah-pindah. Barang dagangan yang diminta adalah sayuran, lauk-pauk, dan buah-buahan. Selain itu, si pon juga melakukan penyelundupan obat-obatan untuk prajurit yang terluka atau sedang sakit.⁵⁹

Dalam merawat orang sakit, peranan yang tidak dapat diabaikan adalah keterlibatan Palang Merah Indonesia. PMI membantu evakuasi penduduk, mengawal dalam perjalanan, dan memberikan bantuan obat-obatan bagi yang terluka atau sakit. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Djoewariyah bahwa PMI bertugas menjaga para pengungsi. Mereka tidak hanya menjadi anggota PMI, tetapi juga menjadi bagian dari pasukan TNI, seperti Djoewariyah yang tergabung dalam pasukan Komaruddin yang bemarkas di Jejeran, Wonokromo, Bantul. Apabila ada pengungsi yang sakit atau terluka akan ditangani di tempat, tetapi bila sakitnya parah atau terdapat peluru yang bersarang di tubuh, maka akan dibawa ke rumah sakit. Demikian juga bila ada yang meninggal dunia, maka akan dikubur di tempat di mana pengungsi itu berada. Obat-obatan yang diterima atau

dipergunakan oleh anggota PMI tidak selamanya berasal dari organisasi PMI, seringkali justru didapat dari dokter atau jawatan kesehatan. Mengingat posisinya yang terlindungi dari status tenaga medis atau anggota PMI, tidak jarang para anggota PMI merangkap sebagai mata-mata atau pengantar pesan penting untuk perjuangan. Djoewariyah mengemukakan bahwa selain sebagai anggota PMI, dirinya ditunjuk sebagai kurir yang bertugas untuk bertukar informasi dengan gerilyawan lainnya di Warung sate Puas di Desa Gamelan. Perintah-perintah serangan yang dilakukan oleh pasukan gerilya dapat dilakukan secara bersama-sama berkat pertukaran informasi tersebut.⁶⁰ Demikian juga keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak bisa dilepaskan dari peranan para kurir yang menyampaikan informasi ke berbagai pihak.

Kurir merupakan seorang intelejen yang berperan penting dalam menyampaikan informasi-informasi rahasia di kalangan pejuang. Tidak sembarang orang atau pejuang bisa menjadi atau ditunjuk menjadi kurir. Dalam peraturan mengenai kurir yang dituangkan dalam “Rencana Peraturan Dinas Kurir” oleh Komandan Batalyon I PHB wilayah III Kapten Semidjono tertanggal 18 November 1948 menyebutkan bahwa seorang kurir harus mempunyai kualifikasi atau kemampuan khusus. Kurir harus mengetahui tempat kedudukan kesatuan-kesatuan pejuang; mengetahui tentang radio, telegram, dan pos merpati; mengetahui bahasa isyarat; mengetahui para komandan

58) *Ibid.*, hlm. 182-183

59) Mahtisa Iswari, “Perempuan, Pasar, dan Revolusi: Beringharjo Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

60) Balai Kajian Sejarah, “Video Kesaksian Djoewariyah Sebagai Anggota PMI”, Yogyakarta, Balai Kajian Sejarah, 2017

dalam kesatuan-kesatuan pejuang; bisa mengendari motor atau berkuda; bila tertangkap musuh harus mengutamakan dokumen yang dibawa agar tidak jatuh atau diketahui musuh, dengan cara di robek-robek, dibakar, dan lain-lain.⁶¹

Setiap kurir menjalankan tugasnya membawa informasi dengan jadwal 2 hari sekali. Akan tetapi apabila ada berita penting dan mendesak dapat melakukan perjalanan pada saat itu juga. Agar lebih teratur, para kurir dalam Divisi III dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Sub A bertugas pada hari Senin, Rabu, dan Jumat; Sub B bertugas pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu; sedangkan Sub C bertugas pada hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Setiap kurir harus punya nama samaran, seperti misalnya kurir dari Batalyon PHB mempunyai nama samaran Seno; kurir dari Brigade 8 mempunyai nama samaran Gatotkaca; kurir dari Brigade 9 nama samarannya Ontorejo; kurir dari brigade 10 mempunyai nama samaran Anoman; sedangkan kurir dari Peleton PHB mempunyai nama samaran Wisanggeni. Setiap kurir harus mempunyai bahasa kode yang sama agar informasi tidak jatuh di tangan yang salah atau bahkan ke pihak musuh. Apabila kurir bertemu, salah satu kurir bisa memberi pertanyaan dan harus bisa dijawab dengan kode jawaban yang tepat. Pada saat gerilya, kode pertanyaan yang dipakai adalah “pahlawan”, pertanyaan itu harus dijawab dengan kode jawaban “Indonesia”. Atau kode lain yaitu “Kusuma” dan harus dijawab dengan “Bangsa”. Apabila orang yang diajak

bicara bisa menjawab berarti orang itu kurir atau utusan dari kesatuan untuk menerima informasi, akan tetapi bila tidak bisa menjawab, maka dipastikan itu bukan kurir dan informasi tidak boleh diberikan.⁶²

Dalam melakukan perjalanan, setiap kurir dilarang melalui atau melewati jalan besar atau jalan raya. Jalur-jalur yang digunakan harus merupakan jalur yang jarang diketahui orang umum atau bahkan musuh. Dalam Divisi III jalur yang digunakan adalah Ropoh, Kaliwuluh, Randusari, Munggangsari, Jumbeng, Cacaban, Karangtengah, Asinan (Markas Batalyon III), Simpang dua Kalirejo, simpang dua Samigaluh (Markas Brigade III), Puguh, Nogosari, Watumurah, Griyak, Wonorejo, Gejagan, Butuh, Lendahgalur, Pos Bugel, Pleret, Cubung Pancasan, Glagah, Joyoboyo, Ketawang, Keburuhan, Merit, Ambal, Prajurit, Munggu, Pos Petanahan, Puring, Pusyan, Manyumudal, Ijo, Kreteg, Sempor, Kenteng, Pagebangan, kaligending, Alihan, Bimbing, Pejagan (Markas batalyon II), Kolopacung, Kaliglagah, Semayu, Sawangan, maron, kembali ke Asinan. Dari simpang dua Kalirejo, jalur juga melewati Kalirejo, simpang dua Puguh, Lempuyang, Dekso, Watukarang, Beran, Depok, Puyungan, Simpang dua Terang, Playan, Imogiri, Canden, Sawahan, Pakejo, Panggang, simpang dua Lendah, hingga sampai ke Galur.⁶³

Salah satu tokoh sipil nasional yang banyak menggunakan jasa kurir adalah

61) “Rentjana Peraturan Dinas Kurier” *Djogdja Documenten 1945-1949*, ANRI no. 270.

62) “Rentjana Peraturan Dinas Kurier” *Djogdja Documenten 1945-1949*, ANRI no. 270.

63) “Route Perjalanan Kurier” *Djogdja Documenten 1945-1949*, ANRI no. 270.

Sultan Hamengku Buwono IX. Seringkali kontak-kontak Sultan dengan pihak militer yang sedang bergerilya maupun pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya dilakukan dengan menggunakan jasa kurir. Sultan HB IX merupakan tokoh yang berpengaruh sangat besar terwujudnya serangan umum 1 Maret 1949. Sultan berada di Gedung Negara saat Belanda memulai agresinya menyerang Lapangan terbang Maguwo dan berupaya memasuki kota Yogyakarta. Setelah suara bom terdengar di Benteng Vredenburg yang dijatuhkan Belanda, Presiden Soekarno meminta Sultan untuk menjemput Hatta yang sedang melakukan pembicaraan dengan KTN di Kaliurang. Sebagai Perdana Menteri, kehadiran Hatta mutlak diperlukan dalam sidang kabinet yang harus segera dilaksanakan menyikapi agresi Belanda ke Yogyakarta. Sultan bersama dengan Syahrir segera menuju Kaliurang untuk menjemput Hatta. Belum sampai kaliurang, Sultan berpapasan dengan Hatta yang sedang menuju kota Yogyakarta. Mobil yang ditumpangi Sultan dan Syahrir segera berbalik menuju Yogyakarta, tetapi terlambat sampai Gedung Negara dan tidak mengikuti rapat kabinet. Hal itu disebabkan, saat berbalik itu ada pesawat Belanda yang sedang melakukan pengeboman, sehingga perjalanan balik ke Yogyakarta melalui desa-desa untuk menghindari pesawat Belanda.⁶⁴

Pada sore harinya pukul 17.00, Kolonel Van Langen, komandan *Tijgerbrigade* Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer untuk

wilayah Yogyakarta, datang ke kraton menemui Sultan. Van Langen dan pejabat Belanda Westerhof menunjukkan peta Yogyakarta yang telah diberi tanda-tanda oleh mereka. Kepada Sultan Hamengku Buwono IX dikatakan bahwa Sultan boleh bergerak leluasa, tetapi dalam batas-batas yang telah diberi warna merah. Batas-batas itu memberi ruang gerak Sultan hanya pada lingkungan kraton saja. Dengan kata lain, Sultan telah dikonsinyir atau sedang menjalani tahanan rumah.⁶⁵

Atas perilaku Belanda yang melakukan aksi-aksi kekerasan dalam upaya merebut kembali kedaulatan RI, Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan pernyataan tanggal 12 Januari 1949 yang mengecam dan tidak menyetujui aksi Belanda dan tidak bisa menjamin keamanan terhadap penduduk Yogyakarta yang terkena hantaman perilaku brutal Belanda. Pernyataan Sultan itu kemudian diikuti selebaran berbahasa Jawa yang beredar di masyarakat tanggal 17 Januari 1949 yang berisi sikap Sultan yang tidak setuju tindakan Belanda dan tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda.⁶⁶ Sikap dan pernyataan Sultan tersebut merupakan pukulan telak bagi Belanda, karena merupakan wujud penolakan secara terang-terangan atas proyek negara federal. Bahkan Monfries dan Kahin menyebutkan bahwa kegagalan Belanda mempertahankan Yogyakarta dan mengajak Sultan dalam proyek negara federal merupakan tonggak penting tanda berakhirnya usaha Belanda menjajah

64) Atmakusumah, peny., *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 71

65) *Ibid.*, hlm. 72

66) "Siaran Republik 17-1-1949 tentang Sikap Sultan HB IX" *Djogdja Documenten 1945-1949*, ANRI, no. 217.

kembali Indonesia.⁶⁷ Sikap Sultan yang tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dipuji oleh Nasution dalam salah satu bukunya sebagai berikut.

“Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengambil sikap sebagai seorang patriot sejati. Segala pancingan, bujukan dan janji kebesaran yang hendak diberikan musuh kepada beliau, semuanya ditolak oleh beliau. Demikian pula setiap ancaman akan diserang dengan pesawat pembom, tank dan meriam yang telah meraung-raug di sekeliling Kraton, tidak mengubah pendirian beliau. Komandan Brigade Van Langen, Panglima Divisi Meier, Panglima Besar Spoor, Ketua BFO Hamid, dan beberapa pemimpin pemerintah pra-federal Djajadiningrat, semua hendak menemui beliau untuk berbicara,

tetapi semua kandas di depan pintu gerbang kraton. Sri Sultan tidak bersedia bertemu dengan mereka.”⁶⁸

Kondisi Yogyakarta yang tidak menentu akibat pendudukan Belanda dan banyaknya rakyat yang menderita menggerakkan Sultan Hamengku Buwono IX untuk membagi-bagikan harta kekayaannya kepada rakyat, pejuang gerilya, PMI, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut perkiraan Hatta, harta yang dibagi-bagikan Sultan tidak kurang dari lima juta Gulden.⁶⁹ Sultan juga melindungi para gerilyawan yang bersembunyi atau melarikan diri dari kejaran pasukan Belanda setelah melakukan serangan. Seringnya kraton menjadi tempat perlindungan para pejuang menyebabkan Jenderal Meijer berupaya masuk kraton hendak mencari dan menangkap para pejuang. Sultan mengatakan, “Boleh masuk Kraton, setelah saya pertaruhkan diri saya.”⁷⁰

Pada awal bulan Februari 1949, Sultan mendengarkan berita radio BBC yang memberitakan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan dalam forum PBB pada bulan Maret 1949. Sultan berpendapat bahwa dibutuhkan kejutan-kejutan dan upaya untuk memberitahukan dunia internasional bahwa Republik masih ada.⁷¹ Pemikiran

67) S. Margana, *op. cit.*, hlm. 37

68) Nasution, *op. cit.*, hkm. 80

69) Atmakusumah, peny., *op. cit.*, hlm. 76-78

70) Suhartono, dkk., *Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia (1946-1949)*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2002), hlm. 116.

71) Atmakusumah, peny., *op. cit.*, hlm. 79.

Sultan tersebut bukan tanpa alasan. Sultan menyadari bahwa diplomasi Indonesia di luar negeri tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan kekuatan militer dan aksi-aksi militer yang bisa ditunjukkan kepada dunia internasional. Kenyataannya, sampai awal bulan Februari serangan-serangan serentak yang dilakukan para pejuang dalam koordinasi *Wehrkreise* III terhadap posisi Belanda belum berdampak besar. Sementara itu, Belanda selalu mengkampanyekan di dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Pada tanggal 10 Januari 1949, Belanda memberitahukan kepada Muhammad Rum bahwa pemerintah Belanda sudah tidak mengakui lagi Pemerintah Republik yang dianggapnya sudah bubar sebagai negara dan tidak punya daerah kekuasaannya lagi.⁷² Pernyataan ini disampaikan juga oleh Mr. Brouwer sebagai utusan pribadi Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel kepada Hatta di Bangka pada tanggal 14 Januari 1949 bahwa Pemerintah Belanda menganggap Pemerintah RI sudah tidak ada dan sudah tidak mempunyai wilayah dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, Brouwer menekankan bahwa ia berbicara dengan Hatta tidak sebagai pemimpin RI, tetapi sebagai tokoh masyarakat Indonesia.⁷³

Di sisi lain, tekanan-tekanan dunia internasional terhadap penyelesaian masalah

Indonesia semakin besar. Pada tanggal 24 Januari 1949, Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi India mengirimkan resolusi kepada PBB agar segera dilakukan pemulihan pemerintah RI ke Yogyakarta dan penarikan seluruh pasukan Belanda dari Indonesia.⁷⁴ Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda supaya menghentikan agresinya dan memulihkan pemerintah RI dalam kedudukan dan kekuasaannya seperti sedia kala.⁷⁵ Dukungan dari dunia internasional akan bisa dimanfaatkan dan punya pengaruh yang efektif apabila memang RI bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa negara Indonesia itu masih ada.

Setelah mendapatkan ide dari pemberitaan radio tersebut, Sultan mengirimkan kurir untuk menghubungi Panglima Besar Jenderal Soedirman dipersembunyiaan. Melalui surat yang dibawa kurir tersebut, Sultan menyampaikan gagasan mengenai serangan umum terhadap kedudukan Belanda di kota Yogyakarta yang dilakukan pada siang hari. Hal itu seperti apa yang dikatakan oleh Sultan:

“... Pada permulaan Februari saya menirim surat kepada Pak Dirman, minta ijin agar supaya diadakan suatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari, sudah

72) Kerukunan Anggota Detasemen II Be 17, *Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekitarnya: Bunga Rampai Cuplikan-Cuplikan Sejarah* (Jakarta: Kerukunan Anggota Detasemen II Be 17, 1993), hlm. 3; Lihat pula: Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hlm. 10.

73) Ali sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, (Jakarta: PT. Kinta, 1974), hlm 248.

74) Talsya, TA., *Sekali Republikan Tetap Republikan: Perjuangan kemerdekaan di Aceh, 1949*, (Medan: Lembaga Srjarah Aceh, 1990), hlm 25.

75) Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato dari Tahun 1942-1949* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 282.

barang tentu dengan segala resiko yang ada pada suatu serangan. Ini disetujui oleh Pak Dirman dan dinyatakan agar supaya saya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan, yaitu Suharto, sekarang Presiden kita.”⁷⁶

Setelah mendapatkan ijin dari Soedirman, kontak-kontak antara Sultan dengan Soeharto selaku komandan *Wehrkreise* III segera dilakukan. Marshudi selaku komandan *Subwehrkreise* 101 bertindak sebagai penghubung antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letkol Soeharto. Pada tanggal 13 Februari 1949, Lettu Marshudi mengatur pertemuan kedua tokoh tersebut dan mengantarkan Soeharto memasuki Kraton. Agar tidak diketahui oleh mata-mata musuh, kedatangan Soeharto ke kraton sangat dirahasiakan dengan pakaian dan rute perjalanan yang telah diatur. Pada saat memasuki kota Yogyakarta, Soeharto menggunakan pakaian gerilya dengan rute perjalanan melewati Pojok Beteng sebelah barat, menyusuri kampung di dalam Beteng, dan melewati sebelah timur Taman Sari. Saat sampai di Taman Sari Soeharto berganti pakaian

dengan baju adat Jawa berupa blangkon, surjan, lurik, dan kain panjang yang sudah disiapkan oleh Hendro Bujono. Dari Taman Sari, Soeharto langsung menuju rumah kediaman Pangeran Prabuningrat yang terletak di sebelah timur Ngejaman yang merupakan tempat pertemuan. Pertemuan berlangsung selama 1 jam antara pukul 23.00-24.00 yang berarti sudah memasuki tanggal 14 Februari 1945. Agar tidak diketahui pihak-pihak yang tidak berkepentingan apalagi mata-mata musuh, tidak boleh satu orang pun masuk dalam ruangan pertemuan dan lampu ruangan dimatikan, sehingga pembicaraan dalam keadaan gelap gulita. Pada pertemuan tersebut, Sultan menanyakan kesanggupan Soeharto melakukan serangan umum dan mengadakan persiapan dalam 2 minggu. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai sirine jam 06.00 pagi sebagai tanda dimulainya serangan dan tanda pengenal perjuangan dengan menggunakan janur kuning yang diletakkan di bahu sebelah kiri.⁷⁷ Pada awalnya, pembicaraan itu memutuskan pelaksanaan serangan umum pada tanggal 28 Februari 1949. Akan tetapi karena sudah muncul desas-desus mengenai serangan itu di masyarakat, maka pelaksanaan serangan diundur pada tanggal 1 Maret 1949.⁷⁸ Untuk selanjutnya kontak-kontak antara Sultan dengan Soeharto dilakukan melalui kurir.⁷⁹

76) Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 189-190; Lihat pula: Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hlm. 27

77) Atmakusumah, *op. cit.*, hlm. 80; Lihat pula: Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, 37-38; Lihat pula: Center for information analysis, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret: Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000)

78) Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hlm. 38

79) Atmakusumah, *loc. cit.*

Serangan Umum 1 Maret 1949

1. Persiapan

Dua minggu merupakan waktu yang singkat untuk mempersiapkan sebuah serangan yang nantinya menjadi serangan yang fenomenal dan menentukan nasib negeri ini. Untungnya, penerapan strategi *Wehrkreise* dalam perlawanan gerilya telah mengkondisikan pasukan dalam sub-sub *Wehrkreise* dengan area dan wilayah yang jelas. Tujuh *subwehrkreise* dalam wilayah pertahanan *Wehrkreise* III merupakan kekuatan inti dalam menggempur kekuatan musuh yang berpusat di Benteng Vredeburg. Sub-sub *Wehrkreise* itu dibantu beberapa kompi, peleton, regu, laskar, bahkan kesatuan-kesatuan pemuda. Untuk memperlancar serangan dipersiapkan pula kelengkapan logistik seperti dapur umum, persenjataan, amunisi, alat-alat komunikasi, transportasi, instalasi kesehatan, demikian juga pakaian dan baju seragam.

Serangan umum itu mempunyai tujuan utama memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. Serangan ini ditujukan untuk mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak punya wilayah dan pemerintahan. Aksi-aksi militer yang mengejutkan akan mengingatkan dunia bahwa Republik masih punya kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan wilayahnya. Serangan yang akan dilakukan itu tidak akan menduduki dan mempertahankannya, sebagaimana yang dikatakan Soeharto selaku pimpinan serangan tersebut:

“Saya perintahkan setiap pasukan mempersiapkan diri untuk melaksanakan serangan umum. Waktu saya tentukan: pada tanggal 1 Maret, serangan pagi. Pasukan kita saya tetapkan menggunakan janur kuning sebagai tanda pengenal. Saya tekankan, serangan itu bukan untuk menduduki dan terus mempertahankan kota itu. Mempertahankan itu bertentangan dengan taktik gerilya. Mengambil sikap mempertahankan itu bisa dihancurkan lawan yang punya senjata ampuh. Sebab itu, kita menyerang dengan tujuan politis, agar supaya dunia mengetahui bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan. Sementara itu, saya anggap penting adanya unsur pendudukan, karena hal itu merupakan salah satu unsur yang membuahkan kemenangan. Alhasil, serangan itu kami lakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. ... Saya rahasiakan serangan ini. Tidak boleh bocor.”⁸⁰

Sebagaimana yang telah dikatakan Soeharto, serangan itu direncanakan dan dipersiapkan dengan matang. Pos komando

80) Soebagijo IN, *Pengalaman Masa Revolusi* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982), hlm. 61-62.

serangan umum ditempatkan di desa Muto untuk mengkoordinasikan pergerakan SWK-SWK yang berada di bawah WK III. Sub-sub *Wehrkreise* sebagai inti pasukan yang melakukan serangan diperkuat dengan tambahan pasukan dengan tugas mengamankan wilayah yang menjadi kekuasaannya dan menyerang pos-pos Belanda sepanjang jalan hingga tujuan akhirnya adalah Benteng Vredeburg yang berada di Malioboro. Berikut ini merupakan susunan Sub-sub *Wehrkreise* beserta kekuatan pasukannya dan wilayah pertahanannya.

1. **SWK 101** berkedudukan di kota Yogyakarta dipimpin Lettu Marsudi dengan markasnya di Prabeyo (dapur kraton). SWK ini terbagi menjadi 6 sektor:

1. Sektor I meliputi *Njeron Benteng* (Dalam Benteng) sebelah barat sampai daerah Kauman. Komandan yang bertanggung jawab adalah Letnan Woeston Zoeber dibantu Lettu Mardjuki dari Yon Soedjono.
2. Sektor II meliputi *Njeron Benteng*, sebelah timur kraton sampai Gondomanan dan Kintelan. Sebagai komandannya adalah Soedarso Pringgobroto.
3. Sektor III meliputi Jalan Ngabean ke utara sampai jalan kereta api Tugu lalu ke timur sampai Jalan Malioboro. Komandan sektor III adalah Mochtar dengan wakilnya Hadi Soemarto. Sektor III ini masih dibagi lagi menjadi 3 subsektor, yaitu:
 - Subsektor Ngampilan yang dipimpin Djiman

- Subsektor Gedongtengen dipimpin Soetomo
- Subsektor Wirobrajan dipimpin Soejitno.

4. Sektor IV bertanggung jawab atas wilayah Pakualaman ke utara sampai Kotabaru, ke timur sampai Jalan Solo, batas selatan sampai Jalan Wonosari. Komandan sektor IV adalah Rakido.
5. Sektor V meliputi daerah sebelah timur Jalan Tugu dan sebelah utara jalan kereta api. Komandannya adalah Soeprijo dan Djoepri sebagai wakilnya.
6. Sektor VI meliputi daerah sebelah barat Jalan Tugu dan ke selatan sampai Gowongan dengan Soemardi sebagai komandannya.

2. **SWK 102** berkedudukan di Bantul dipimpin Mayor Sardjono yang bermarkas di Pandak Bantul. SWK ini dibantu pasukan yang terdiri dari 5 kompi, yaitu:

- Kompi 1 dipimpin Kapten Widodo yang berkedudukan di Krapyak dan Dongkelan.
- Kompi 2 dipimpin Kapten Soedarmo yang berada di Bakulan
- Kompi 3 dipimpin Kapten Ali Affandi yang mempunyai wilayah pertahanan di Kotagede.
- Kompi 4 dipimpin Kapten Soemarno dengan kedudukan yang berpindah-pindah semula di Tamanan lalu pindah ke Mail, dan akhirnya di Bibis sebelah barat Padokan.

- Kompi 5 bertugas sebagai pemasuk bantuan senjata yang dipimpin Kapten Oesodo.
3. **SWK 103** mempunyai wilayah pertahanan di Gamping yang dipimpin Letkol. Soehoed. Kekuatan SWK 103 terdiri dari:
- Satu Kompi dipimpin Latif
 - Satu Kompi dipimpin Matoelessy
 - Satu Regu CPM dipimpin Letnan Adisoero
4. **SWK 103A** berkedudukan di Godean dengan pimpinan Mayor H.N. Soemoeal. Markas SWK 103A berada di desa Jering Godean dengan kekuatan sebagai berikut:
- Yon 151 dipimpin oleh PC. Harjo Soedirdjo
 - Dua Kompi dari Batalyon Andi Matalatta
 - Dua Kompi dari Batalyon Peloepepsy
- SWK 103A dibagi menjadi 5 sektor pertahanan, yaitu:
- Sektor 1 dipimpin Kapten Frits Rondonoewoe
 - Sektor 2 dipimpin Letda Wim Sigar
 - Sektor 3 dipimpin Mayor Poeloepessy
 - Sektor 4 dipimpin Widarto/Aswasmarmo
 - Sektor 5 dipimpin oleh Goenarso.
5. **SWK 104** berada di Sleman di bawah pimpinan Mayor Soekasno yang bermarkas di Kringinan, Kalasan. Kekuatan SWK 104 terdiri dari.
- Pasukan A yaitu Kompi Kadet M.A. berkedudukan di sekitar Pejambon dengan 4 Peleton, yaitu:
 1. Peleton Vandrik Kadet Soedjanadi
 2. Peleton Soeparma
 3. Peleton Nawawi
 4. Peleton Herman
 - Pasukan B yaitu Batalyon CPM Mayor Sakri Soenarto yang berkedudukan di sekitar Pondok Suruh Pakem, yang terdiri 5 peleton, yaitu:
 1. Dua peleton dari Ki IV
 2. Satu peleton dari Ki I
 3. Satu peleton gabungan dari Ton Det CPM Yogyakarta dan sisa Mob Basis II.
 - Pasukan C yaitu Kompi TP Martono terdiri dari 3 peleton yang berkedudukan di desa Ngepas Rejodani. Ketiga peleton tersebut adalah 1) Peleton 1 Lettu Soedarsono; 2) Peleton 2 Letda Arif Soeratno; 3) Peleton 3 Letda Aliadi
6. **SWK 105** mempunyai wilayah pertahanan di Gunungkidul dengan pimpinan Mayor Soedjono yang bermarkas di Srimartani, sebelah utara Berbah. Kekuatan pasukan SWK 105 terdiri dari.
- Kompi 1 dipimpin Kapten Marjono yang berkedudukan di Kalasan
 - Kompi 2 dipimpin Lettu Thomas Rahardjo bermarkas di Surogeduk
 - Kompi 3 dipimpin Lettu Mardjuki yang pada akhirnya nanti membantu SWK 101 di dalam kota
 - Peleton Dimjati

7. **SWK 106** berkedudukan di Kulon Progo yang bemarkas di desa Watumurah, Kenteng, Kulon Progo dengan pimpinan Letkol Soedarto. Kekuatan SWK 106 terdiri dari.

- Satu Seksi Staf Pengawal dari Brigade 17 yang dipimpin Lettu Oetoro
- Satu Kompi dipimpin Noer Moenir yang berkedudukan di Wates yang terdiri dari Pasukan Hisbullah.⁸¹

Koordinasi pasukan yang sudah rapi tersebut dimaksudkan untuk membuat serangan kejutan dan mendadak terhadap kedudukan pasukan Belanda di kota Yogyakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Pasukan Belanda di Yogyakarta dan sekitarnya berkekuatan 1 brigade infanteri (Brigif T). Brigif T diperkuat dengan satuan para, satuan berlapis baja (tank dan panser), unsur bantuan tempur, dan unsur bantuan administrasi. Brigif T dipimpin Kolonel Van Langen, menempatkan markas komandonya di kota Yogyakarta, yaitu Hotel Tugu dan terdiri dari 3 batalyon infanteri. Dua Yonif berada di luar kota Yogyakarta dan 1 yonif berada di kota Yogyakarta. Brigif T dibantu juga pasukan KNIL. Posisi Brigif T di Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Pasukan belanda di kota Yogyakarta berkekuatan 1 Batalyon Infanteri (Yonif), yaitu Yonif 1-15RI. Yonif ini dipimpin Mayor J.F. Scheer dengan diperkuat satuan tank dan panser dan kesatuan KNIL. Kedudukan pasukan Belanda yang berada di kota Yogyakarta, adalah.

- Markas Komando Yonif 1-15RI di Benteng Vredenburg
- Satu kompi campuran tentara Belanda dan KNIL di Benteng Vredenburg, Gedung Agung, dan Kantor Pos.
- Satu kompi di Kotabaru dan Gondomanan
- Dua peleton di pabrik Watson.
- Satu Peleton di komplek Hotel Tugu dan Hotel Merdeka
- Satu peleton di Kompleks Taman Sari dan Pojok Benteng Timur
- Satu Peleton di Pabrik Aniem Wirobrajan
- Satu regu sampuran tentara Belanda dan KNIL berada di: Pertigaan Ngabean (Utara Stasiun KA), Wirogunan, Lempuyangan, Ngampilan, Pingit, Asrama Sentul, MBT, dan Sosrowijayan.
- Satu peleton di Gondolayu
- Satu Peleton di kantor Kedaulatan Rakyat
- Satu peleton di Ngupasan
- Pos-pos Belanda yang terdiri 2 sampai 4 orang tentara ditempatkan di sepanjang jalan Malioboro, pertigaan Ngabean, Jetis, Alun-alun utara, Klitren, dan beberapa tempat strategis.
- 2. Dua Yonif Belanda yang berada di luar kota adalah Yonif 3-15RI dan Yonif 5-15RI. Yonif 5-15RI dipimpin Letkol Giraad yang menempatkan markas komandonya di Bantul. Yonif 3-15RI

81) Seskoad, *op. cit.*, hlm. 180-187

dipimpin oleh Mayor Vaessens dengan markas komandonya di Tanjungtirto. Pasukan dari 2 Yonif itu tersebar di bebera daerah di sekitar Yogyakarta, seperti Kotagede, Bantul, Barongan, Pabrik gula Gesikan, pabrik gula Padokan, Plered, Karangsemut yang berada di sebelah selatan. Di sebelah utara terdapat pasukan Belanda di daerah Medari, Beran, Cebongan, Tempel, Kaliurang, dan Pakem. Sebelah barat kota Yogyakarta terdapat pasukan belanda di Pedes, Gamping, Bantar, dan Klangon. Sebelah timur terdapat pasukan Belanda di daerah Kalasan, Prambanan, Pangkalan Udara Maguwo, Pabrik Gula Tanjungtirta, pabrik gula Berbah, Piyungan, dan Patuk.⁸²

Mengingat pasukan Belanda merupakan pasukan terlatih dan memiliki senjata yang lebih canggih, maka penyerangan harus seefektif mungkin dan dilakukan dengan cepat. Persenjataan merupakan faktor penting yang harus dipikirkan, walaupun kondisi persenjataan yang dimiliki pasukan TNI sudah usang dan jumlahnya tidak mencukupi. Kebanyakan senjata yang digunakan pasukan gerilya berasal dari senjata hasil rampasan dari Jepang. Terdapat senjata hasil buatan sendiri yang merupakan modifikasi dari senjata yang telah rusak dengan bahan-bahan pengganti seperti pipa ledeng, tiang listrik dan lain-lain. Berdasarkan peraturan dari Panglima Angkatan Bersenjata yang dituangkan dalam peraturan Siasat No. 1, setiap pasukan batalyon mobil

harus mempunyai 1 senjata api untuk 1 prajurit, sedangkan pasukan kewilayahan bisa 1 senjata api untuk 3 sampai 5 prajurit. Dari peraturan itu saja sudah memperlihatkan bahwa tidak semua prajurit memiliki senjata. Oleh karena itu, dalam penyerangan ini prajurit yang tidak memegang senjata api menggunakan berbagai macam senjata yang dipunyai seperti senjata tajam maupun bambu runcing. Beberapa senjata api yang digunakan dalam serangan umum adalah.

- Senjata genggam, seperti pistol lantak dan pistol Mauser
- Senjata pendek, berupa Pistol Mitraliur (PM)-RI dengan tembakan tunggal, Pistol Mitraliur Lanchester dengan tembakan otomatis, dan pistol mitraliur dalam bentuk modifikasi.
- Senjata laras panjang berupa senapan Lantak RI dalam berbagai bentuk
- Senjata otomatis, yaitu Senapan Mesin Ringan (SMR) modifikasi
- Senjata lintas lengkung yaitu mortir yang jumlahnya terbatas yang merupakan buatan pabrik senjata darurat di Medari
- Granat gombyok buatan Demakijo, ranjau darat/trekbom yang dimodifikasi ir. Yohannes di bengkel Karang Barepan, Kalasan.
- Senjata-senjata hasil rampasan dari Jepang dan sekutu, antara lain Senapan Lee Enfield (LE) MK III (Belanda), Karaben Ariska (Jepang), Barnasent (Belanda), Simonov (Rusia), Thesmij (Belanda), Springfield (USA), dan senapan 2 laras.⁸³

82) Oemar Sanoesi, *op. cit.*, hlm 56

83) Sigit Wroehantoro, dkk., *Sejarah Perjuangan Pada Kles*

Sebagaimana senjata api, amunisi yang digunakan oleh pasukan *Wehrkreise* III kebanyakan merupakan hasil rampasan dari pasukan Jepang maupun Sekutu. Amunisi yang dimiliki cukup memadai untuk melakukan penyerangan, bahkan untuk latihan. Hanya saja kebanyakan amunisi itu sudah berumur tua yang seharusnya sudah dimusnahkan. Sementara itu, granat tangan, ranjau darat dan bahan peledak juga dipunyai pasukan di WR III dengan jumlah yang terbatas.⁸⁴

Salah satu sarana yang penting untuk dipersiapkan adalah alat komunikasi dan transportasi. Selama ini, alat komunikasi yang masih sering digunakan dan masih bisa dipercaya adalah tenaga manusia yaitu penggunaan kurir. Kurir memegang peranan penting dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Sultan Hamengku Buwono IX seringkali menggunakan kurir untuk berhubungan dengan pemimpin-pemimpin republik lainnya. Sejak pemindahan ibu kota, ijin melakukan serangan umum terdapat Pak Dirman, hingga koordinasi dengan Soeharto dalam membicarakan masalah serangan umum, jasa kurir selalu dilakukan oleh Sultan. Kurir-kurir tersebut berperan penting dalam menyebarkan perintah-perintah serangan termasuk rencana serangan umum yang akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949. Perhubungan antar SWK dilakukan oleh para kurir dengan cara beranting dari pos satu ke

pos yang lain yang rata-rata berjarak 4 km. Tempat-tempat yang biasa dilakukan kurir dalam bertukar informasi adalah warung makan, seperti Warung Sate “Puas” di desa Gamelan, pasar-pasar tradisional, seperti pasar Beringharjo, maupun tempat-tempat tertentu yang telah disepakati bersama.⁸⁵

Alat komunikasi lain yang sering dan penting digunakan adalah pesawat radio. Untuk memonitor berita-berita penting dari luar negeri, pesawat radio sangat efektif menghantarkan informasi, seperti pesawat radio milik Sulta dan radio komando WK III. Pesawat pemancar radio milik RRI ditempatkan di desa Balong Gunung Lawu Surakarta. AURI mempunyai pesawat pemancar radio jarak jauh yang semula berada di Terban Yogyakarta, kemudian dipindah ke rumah Mardjono di Playen, Wonosari sejak agresi Belanda 19 Desember 1948. Di dalam AURI terdapat Jawatan perhubungan yang dipimpin Kapten Budihardjo yang bertanggung jawab mengelola dan mengoperasikan pemancar radio jarak jauh tersebut. Melalui Balong dan Wonosari, berita dapat dikirim ke stasiun penerima pemerintah PDRI di Sumatera. Kapten Budihardjo nantinya berperan penting mengabarkan berita Serangan Umum ke pemerintah PDRI yang kemudian dilanjutkan ke luar negeri.⁸⁶

Alat transportasi yang digunakan dalam persiapan Serangan Umum adalah tenaga manusia dan hewan. Pengangkutan oleh

II di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Sleman: PEMDA Sleman, nt), hlm. 21.; Lihat pula: Seskoed, *op. cit.*, hlm. 189-190.

84) *Ibid.*, hlm. 190.

85) Balai Kajian Sejarah, “Video Kesaksian Djoewariah Sebagai Anggota PMI”, Yogyakarta, Balai Kajian Sejarah, 2017

86) Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, “Munumen Radio PHB AURI PC-2 Dalam Lintasan Sejarah”, Balai

manusia dilakukan dengan cara digendong, dipikul ataupun dijinjing, tergantung berat dan banyaknya barang yang diangkut. Angkutan dengan manusia dipandang lebih efektif selama gerilya karena dapat menyelinap dengan cepat dan tidak memerlukan jalan yang khusus. Sementara itu, penggunaan hewan seperti sapi dan kuda biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang banyak dan berat. Sapi dan kuda dipergunakan untuk menari gerobak dan dokar yang bisa membawa muatan yang banyak, tetapi harus melewati jalan terbuka dan relatif lebih lambat. Untuk mengangkut pejuang-pejuang yang sakit lebih sering digunakan tandu oleh tenaga medis, PMI, atau pejuang lainnya.⁸⁷

Dalam menyusun rencana serangan, penggunaan baju seragam juga diperhatikan. Pakaian seragam yang digunakan TNI terutama WK III menggunakan bahan *kambar* (kain kasar sejenis blacu) warna hitam, hijau, dan putih kekuning-kuningan (krem). Kancing dibuat dari tempurung kelapa atau tanduk. Pada saat sedang menyamar atau berbaur dengan penduduk, pasukan TNI lebih sering menggunakan baju seadanya atau baju yang sama dengan penduduk, bahkan banyak yang bertelanjang dada. Pada saat itu terkenal istilah *tokji biji* (*kathok siji*, klambi siji yang artinya celana satu dan baju satu). Tanda pangkat hanya digunakan pada saat upacara atau parade saja. Pemakaian tutup kepala tanpa aturan yang jelas, ada yang memakai topi baja bekas tentara Jepang, Sekutu, dan Belanda, ataupun menggunakan tutup kepala yang lain. Beberapa anggota TNI

memakai ikat kepala warna merah putih, ada yang memakai ikat kepala tradisional, tetapi banyak pula yang tidak memakai ikat kepala maupun tutup kepala. Demikian juga sepatu, ada pejuang yang menggunakan sepatu yang sebagian besar hasil rampasan, tapi tidak kalah banyaknya pejuang yang tidak memakai alas kaki apapun.⁸⁸

Dalam penyerangan yang besar dan skala yang luas, dibutuhkan kesiapan Soemiaty dan Sri Redjeki yang berasal dari Rumah Sakit Petronela (Sekarang Bethesda). Peralatan kesehatan dan obat-obatan didapat dari rumah sakit milik misi Katolik di Boro. Poliklinik lainnya terdapat di Kedung Pring, Kali Gesing, Kalasan, Karungan, Berbah, Jebukan, dan lain-lain. Sementara itu untuk pos-pos kesehatan terdapat di Piyungan, Bojong, Selorejo, dan Klatak. Sementara itu untuk bekal makanan atau nuk (nasi bungkus) dipercayakan kepada SWK 101 yang berada di dalam kota. Pusat-pusat dapur umum ditentukan di Kampung Ngadiwinatan dan Purwodiningratan dengan pimpinan Ibu Darmo Wisastro dan Ibu sastro Oetomo. Dapur umum lainnya terletak di Kampung Pajeksan dipimpin oleh Ibu Soewartinah, Kampung Sosrowijayan dipimpin Ibu Soeripto, dan Kampung Kemetiran Kidul yang dipimpin Ibu Soemardjo. Selain itu, makanan-makanan banyak didapat pula dari penduduk yang bersimpati pada perjuangan TNI.

2. Pelaksanaan Serangan

Pada tanggal 28 Februari 1949, sehari sebelum rencana Serangan Umum dilaksanakan, pada pukul 06.00 pagi setelah tanda sirine berbunyi

Pelestarian Cagar Budaya DIY, 2014.

87) Seskoad, *op. cit.*, hlm. 190

88) *Ibid.*, hlm. 191

terdengar suara tembakan dari arah Kantor Pos besar sebelah utara alun-alun utara. Tembakan berasal dari peleton Komaroedin yang salah memperhitungkan tanggal serangan. Serangan yang begitu gencar dari pasukan Komaroedin memaksa Belanda mengeluarkan Tank dan Panser untuk menghadapinya. Letnan Soegijono yang berada dekat dengan posisi peleton Komaroedin menjelaskan kepada Komaroedin bahwa hari itu masih tanggal 28 Februari hari senin dan meminta peleton Komaroedin untuk segera menarik pasukan ke luar kota. Pasukan Komaroedin mengundurkan diri dengan cara berpencar, ada yang menyusup ke Masjid Kauman, ada yang ke Tamansari, ke arah timur menuju Gondomanan, sebagian lagi bertahan di pojok tenggara alun-alun utara.⁸⁹

Kesalahan menentukan waktu serangan terjadi pula di daerah Giwangan Yogyakarta. Pada tanggal 28 Februari 1949 pukul 18.00 atau 06.00 sore, terdapat beberapa pasukan di desa Giwangan memutus jaringan telepon yang menghubungkan Yogyakarta dengan Kotagede. Aksi ini diketahui Belanda, sehingga terjadi tembak menembak. Akhirnya para gerilyawan mengundurkan diri berpencar ke segala arah. Rupanya, serangan itu terjadi akibat kesalahpahaman beberapa pasukan yang mengira bahwa waktu serangan adalah jam 06.00 sore, sebagaimana kebiasaan serangan yang pernah dilakukan. Bagi orang Jawa, setelah sholat ashar itu dianggap ikut pada hari berikutnya, yang artinya tanggal 06.00 sore

tanggal 28 Februari dianggap sudah masuk tanggal 1 Maret.⁹⁰

Sebagaimana yang disampaikan Soeharto dalam biografinya, serangan-serangan salah tanggal tersebut sempat membuatnya cemas dan khawatir akan menggagalkan rencana serangan. Akan tetapi, kenyataannya justru membuat Belanda lengah dan tidak mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang akan terjadi.⁹¹ Hal itu sangat dimungkinkan bahwa Belanda sudah mendengar isu akan terjadi serangan yang akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 1949 yang merupakan rencana semula dari pembicaraan Sultan dan Soeharto. Belanda menganggap bahwa serangan TNI hanya seperti itu sebagaimana isu yang berkembang, sehingga Belanda tidak berpikir akan ada serangan lagi. Bahkan dalam film “Janur Kuning”, Soedirman setelah memeluk Komarudin berkata, “Tidak semua kesalahan berakibat buruk”.⁹²

Setelah insiden penyerangan salah tanggal berakhir, seluruh pasukan dalam WK III bergerak menuju pinggiran kota Yogyakarta. Mengingat begitu banyaknya pasukan yang akan mengadakan serangan dan dari posisi yang berbeda-beda, maka ada pasukan yang siap di posisi lebih awal, bahkan ada yang baru siap menjelang serangan pukul 06.00 pagi. Sambil menunggu aba-aba penyerangan, pasukan-pasukan yang sudah sampai di posisi tinggal

89) “Kisah Lucu Letnan Komarudin Salah Lihat Tanggal Serang Belanda” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-lucu-letnan-komarudin-salah-lihat->

tanggal serang-belanda.html; lihat pula: G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989); lihat pula Seskoed, *op. cit.*, hlm 221.

90) Seskoed, *op. cit.*, hlm. 221-222.

91) G. Dwipayana dan Ramadhan KH, *log. cit.*,

92) Film Janur Kuning

sementara di rumah-rumah penduduk atau *ngantong* agar tidak diketahui pihak musuh dan mata-matanya.⁹³

SWK 101 pimpinan Lettu Marsoedi yang sudah berada di dalam kota diinstruksikan tetap dalam posisi dan membantu SWK-SWK lainnya. SWK 102 yang dipimpin Mayor Sardjono bergerak dari wilayah Bantul menuju kota Yogyakarta melalui Gading, masuk gorong-gorong menuju kompleks Kraton, yaitu alun-alun selatan, dan akhirnya berada di Pagelaran. Pada pukul 04.00 pagi pasukan Mayor Sardjono sudah siap di posisi dan pasukan Kompi Soemarmo yang juga bagian dari SWK 102 sudah siap di Bangsal Keben. SWK 103A di bawah komando Mayor H.N. Soemoeal bergerak dari Godean melewati Kali Winongo dan memposisikan pasukan di daerah Ngampilan dan Notoyudan. SWK 104 pimpinan Mayor Soekasno bergerak dari daerah Kalasan menuju ke utara kota Yogyakarta. Beberapa pasukan dari SWK 104 tersebar di beberapa daerah di sebelah utara kota Yogyakarta, seperti peleton Soeparno, Nawawi, dan Arman dari Pasukan A berada di Demangan; Pasukan B terdiri dari 5 peleton dari Pakem menuju Lempuyangan dan akhirnya berada di posisi Jembatan Kewek; Pasukan C terdiri dari 3 Peleton bergerak dari Rejodani menuju Blunyah, Pesiraman, dan akhirnya berada di Jetis. SWK 105 yang dipimpin Mayor Soedjono bergerak dari markasnya di Srimartani menuju Pangkalan Udara Maguwo. Beberapa yang lain, seperti Peleton Pratelo

memperkuat pasukan di posisi sebelah timur kota Yogyakarta. SWK 106 yang dipimpin Letkol Soedarto bertugas mengikat kedudukan Belanda di Jembatan Bantar.⁹⁴

Beberapa pasukan tambahan juga dikerahkan untuk membantu posisi dan kedudukan SWK-SWK yang telah mengepung kota Yogyakarta dari 4 penjuru. Batalyon 3 pimpinan Mayor Sroehardjojo mengirimkan Kompi Darsono yang diperkuat peleton satuan AL dan peleton bantuan masuk kota Yogyakarta melalui desa Mangil dan akhirnya berada di posisi Tungkak. Mobil Brigade (MB) memperkuat posisi WK III bergerak ke kota Yogyakarta dari 3 penjuru. Dari arah barat, Kompi polisi MB Soebroto bergerak dari Moyudan menuju Ngampilan dan Notoyudan memperkuat posisi Mayor Soemoeal. Kompi Polisi MB Ajimin bergerak dari Ngijon menyeberangi Kali Winongo dan memposisikan pasukannya di Pathuk. Dari arah selatan, Kompi polisi MB Moesiman meninggalkan markasnya di Ganjuran bergerak menuju pojok benteng timur dan mengambil posisi di pojok Plengkung Gading. Dari arah utara, Kompi Polisi Soemardjan yang merupakan gabungan dari TNI, Pasukan Polisi Pelajar (P3), TP, dan laskar meninggalkan kedudukannya di Rejodani menuju Blunyahgede. Sementara itu, Letkol Soeharto selaku komandan WK III sejak tanggal 24 Februari sudah bergerak menuju kota Yogyakarta sambil melakukan koordinasi. Soeharto yang dibantu SWK 106, SWK 103A, dan Yon 151 menyerang jembatan Bantar di Kulon Progo. Setelah itu menuju Sangonan, lalu ke Kuncen, dan selanjutnya

93) "Ide Sultan, Pak Dirman Acc, Pak Harto Lapangan", Wawancara Adaby Darban, BERNAS, edisi 7 Maret 1999.

94) Seskoad, *op. cit.*, hlm. 225-226

menuju Notoyudan, dan akhirnya memposisikan pasukannya di Pathuk.⁹⁵ Hal ini seperti yang dikatakan Soeharto:

“... Saya pimpin serangan itu dari sebelah barat masuk lewat kuncen terus ke Pathuk ...”⁹⁶

Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 yang ditandai suara sirine yang menandakan berakhirnya jam malam, seluruh pasukan yang sejak malam dan pagi telah berada di posisi bergerak menyerang sasaran yang telah ditentukan. Yogyakarta diserang dari 4 jurusan yang melibatkan seluruh pasukan dalam SW III dengan tanggung jawab dari sebelah selatan SWK 102, sebelah barat swk 103A, sebelah utara SWK 104, dan sebelah timur SWK 105. SWK 101, SWK 103, SWK 106, Mobil Brigade, dan kesatuan pasukan lainnya membantu keempat SWK tersebut dalam menggempur posisi-posisi Belanda di Yogyakarta. Keseluruhan pasukan yang terlibat diperkirakan sebanyak 2000 tentara.⁹⁷

Pertempuran di sektor selatan dilakukan oleh SWK 102 pimpinan Mayor Soedjono yang dibatasi jalur jalan sepanjang Wirobrajan, Ngabean, Secodiningrat, dan Sayidan. Mayor Sardjono memimpin dan mengendalikan pasukannya dari Pagelaran dan Keben setelah berhasil menaklukkan pasukan Belanda di

daerah tersebut. Tank dan panzer Belanda yang keluar dari Benteng Vredenburg menuju alun-alun utara tertahan tembakan dari para pejuang dan terpaksa kembali ke Benteng. Bahkan tiga buah tank rusak akibat terkena ranjau darat yang dipasang para pejuang malam sebelumnya. Kompi Widodo yang merupakan bagian dari SWK 102 bergerak dari Mangkuyudan menuju pasar Sentul, kemudian belok ke arah barat yaitu Pakualaman dan akhirnya menggempur kedudukan Belanda di Pabrik Watson dan Kotabaru.⁹⁸ Saat menggempur Pabrik Watson, kompi Widodo bertemu dengan Kompi Rakido yang bergerak dari arah timur. Mendapat gempuran hebat dari 2 kompi pasukan TNI, pasukan KNIL yang menjaga pabrik tersebut justru berperang setengah hati melihat kegigihan pejuang-pejuang yang sebenarnya adalah bangsanya sendiri. Menurut beberapa kesaksian, para KNIL itu terlihat pura-pura mempertahankan pabrik dan dengan cepat menyerah terhadap gempuran TNI.⁹⁹ Penyerangan terhadap pabrik Watson ini merupakan kemenangan yang besar karena berhasil merampas 5 ton amunisi yang tersimpan di pabrik tersebut. Sebagaimana dilaporkan Pierre Heijboer dalam bukunya.

“... dan di bagian timur kelompok Kapten Rakido berhasil mengepung pabrik Watson di mana tersimpan sejumlah amunisi ...”¹⁰⁰

95) *Ibid.*, hlm. 226-228

96) Soebagijo IN, *op. cit.*, hlm. 62

97) Bathara Hutagalung, *op. cit.*, hlm. 155

98) Seskoed, *op. cit.*, hlm. 232.

99) Pramoedya Ananta Toer, *op. cit.*, hlm. 46

100) Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda:*

Masih dari sektor selatan, Kompi Ali Affandi bergerak dari kedudukannya di Wonokromo menyerang pasukan Belanda yang berada di Kotagede. Kompi Ali Affandi yang berhadapan dengan 1 kompi Belanda dari Yonif 5-5RI tidak berhasil menguasai Kotagede, tetapi berhasil mengikat pasukan Belanda untuk tidak membantu pasukan-pasukan Belanda lainnya. Kompi Soemarmo yang merupakan bagian dari SWK 102 bergerak dari Krapyak menuju Kantor Pos dan Benteng Vredeburg berhadapan dengan pasukan Yonif 1-15 RI yang dibantu kesatuan Tank dan Panser. Sementara itu, Kompi Soedarmo melakukan serangan terhadap pasukan Belanda di Bakulan, Barongan, Bantul, dan Gesikan. Kompi Soedarmo juga mengerahkan 1 peleton pasukan untuk merebut Pabrik Aniemi yang berada di Wirobrajan. Kompi Darsono dengan kekuatan 3 Peleton tempur dan 1 peleton bantuan menyerang Yogyakarta dari arah tenggara dengan sasaran pos-pos Belanda di Alun-alun utara dan Wirogunan. Sampai tengah hari, pasukan Kompi Darsono berhasil menguasai alun-alun utara. Kompi polisi P3 pimpinan Djohan Soeparno menyerang pojok benteng timur. Pada akhirnya pasukan Djohan tidak berhasil menguasai wilayah pojok Benteng timur dan terpaksa mengundurkan diri ke arah timur dan selatan.¹⁰¹

Pertempuran di sektor barat dipimpin Mayor H.N. Soemoeal komandan SWK 103A yang dibatasi oleh jalur jalan sepanjang

Malioboro ke barat. Sasaran utama pasukan SWK 103A adalah pos-pos Belanda di sepanjang jalan Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka, dan benteng Vredeburg. Pasukan-pasukan pendukung SWK 103A adalah Kompi Polisi MB. Ajatimin, Kompi Polisi MB Soebroto, Batalyon 151 pimpinan Harjo Soedirdjo, Kompi Yon Andi Matalatta, dan Kompi Yon Peloepepsy. Kompi Polisi Ajatimin menyerang kedudukan Belanda di Lempuyangan dan terjadi pertempuran hebat dengan pasukan Belanda dari arah Sosrowijayan. Kompi Polisi Soebroto yang terdiri 2 peleton pasukan menyerang 1 regu pasukan Belanda di Patuk. Sampai tengah hari, pasukan Belanda berhasil dipukul mundur dan masuk ke Benteng Vredeburg. Batalyon 151 pimpinan Harjo Soedirdjo menyerang pasukan Belanda yang bermarkas di Hotel Tugu. Pertempuran di Hotel Tugu tersebut dilaporkan sebagai pertempuran yang paling hebat dan sengit, sehingga memakan banyak korban dari kedua belah pihak.¹⁰²

Pertempuran di sektor Utara di bawah kendali dan tanggung jawab SWK 104 pimpinan Mayor Soekasno yang dibatasi oleh jalur jalan kereta api Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Bengkel Kereta Api Pengok. Mayor Soekasno memberi mengendalikan dan memberi komando pertempuran di Mrican setelah merebut kawasan itu dari Belanda. Pasukan SWK 104 terdiri dari Pasukan A, Pasukan B, dan Pasukan C. Peleton Vandrig Kadet Soedjanadi yang merupakan bagian dari Pasukan A bersama pasukan SWK 105 bertugas mengikat pasukan Belanda di Maguwo agar tidak masuk kota.

Memperebutkan Pending Zambrut Sepanjang Katulistiwa, 1945-1949 (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 172

101) Seskoad, *op. cit.*, hlm. 235.

102) *Ibid.*, hlm. 239-240; Lihat pula Pramoedya Ananta Toer, *loc. cit.*

Peleton Nawawi yang juga bagian dari Pasukan A menyerang kedudukan Belanda di MBT yang terletak di Sagan. Oleh karena mendapat perlawanan yang sengit, pada pukul 11.00 peleton Nawawi mengundurkan diri ke arah timur dan utara. Pasukan A lainnya bertugas menggempur pasukan Belanda di MBT dan kedudukan Belanda di daerah Gondokusuman. Pasukan Belanda di MBT dan Gondokusuman melakukan perlawanan yang gigih, sehingga Pasukan A bergerak ke Klitren dan berhasil menguasai Klitren hingga sore bersama pasukan Wiyogo.¹⁰³

Pasukan B dengan komandannya Mayor Sakri Soenarto mendapat tugas menyerang kedudukan Belanda di Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pasukan Mayor Sakri Soenarto yang terdiri 2 Peleton menyerang pasukan Belanda di Jembatan Kewek, kemudian menyerang Hotel Merdeka. Pertempuran di Hotel Merdeka berlangsung sangat sengit. Pasukan B tertahan Brencarrier Belanda, sehingga Mayor Sakri Soenarto memutuskan untuk mundur ke arah Lempuyangan.¹⁰⁴

Pasukan C yang terdiri dari 3 peleton organik berugas menyerang pasukan Belanda yang berkedudukan di Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Pasukan C dengan cepat dapat menguasai Pingit dan Jetis, tetapi mendapat perlawanan hebat dari Belanda di Gondolayu. Setelah mendapat bantuan dari pasukan B, Pasukan C berhasil menduduki daerah Gondolayu. Sementara itu, Kompi TP Martono berhasil mengikat pos Belanda di Medari dan

Tempel, sedangkan Peleton I yang dipimpin Lettu Soedarsono mengikat pos Belanda di Beran. Seksi Polisi MB Soemardjan juga berhasil mengikat pasukan Belanda di desa Bangirejo, sehingga sampai pukul 11.00 tidak berhasil membantu kedudukan pasukan Belanda di kota Yogyakarta.¹⁰⁵

Medan tempur sektor timur di bawah tanggung jawab SWK 105 yang dipimpin Mayor Soedjono dengan jalur jalan sepanjang malioboro ke timur. Tugas utama SWK 105 adalah mencegah bantuan Belanda agar tidak bisa masuk ke Kota Yogyakarta. Pos komando Mayor Sardjono di Srimartani, sebelah utara Berbah. Sasaran utama pasukan SWK 105 adalah Lapangan Udara Maguwo, Tanjungtirto, Kalasan, dan Prambanan. Pasukan SWK 105 berhasil mengikat pasukan Belanda yang berada di lapangan Udara Maguwo, Tanjungtirto, Kalasan, dan Prambanan agar tidak bisa membantu pasukan induknya yang berada di kota Yogyakarta. Bahkan pasukan SWK 105 berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang berada di Maguwo, sehingga mundur ke wilayah Wonocatur.¹⁰⁶

SWK 101/Kota Yogyakarta pimpinan Lettu Marsoedi, SWK 103/Gamping yang dipimpin Letkol Soehoed, dan SWK 106/Kulon Progo yang dipimpin Letkol Soedarto bertugas mengikat pasukan Belanda di wilayah masing-masing, membantu menggempur pos-pos Belanda bersama SWK lain, dan membantu menyediakan logistik, amunisi, bagi SWK lain yang sedang bertempur. SWK

103) Seskoad, *op. cit.*, hlm. 241

104) *Ibid.*, hlm. 243

105) *Ibid.*, hlm. 243-244

106) *Ibid.*, hlm 244

101 dalam kota pimpinan Lettu Marsoedi membantu pasukan lain dengan menyediakan informasi, mempersiapkan penunjuk jalan, dan mengkoordinasikan bantuan administrasi termasuk logistik. SWK 101 mengerahkan ibu-ibu dan para wanita menyediakan nug (nasi bungkus) dan minuman yang dibagikan kepada para pejuang yang bertempur. Banyak penduduk dan bangsawan-bangsawan kraton yang wilayahnya jadi ajang pertempuran menyediakan makanan, minuman dan tempat perlindungan bagi para pejuang. Beberapa pasukan di bawah SWK 101 seperti Satuan Sember gelap yang bermarkas di Keparakan Lor dan Hantu Maut pimpinan Basuki Widodo mampu mencegah tentara Belanda dari pos Plered dan Kotagede memasuki kota Yogyakarta. Pasukan Hantu Maut yang berkedudukan di Pujokusuman menghadang konvoi tank Belanda di Pakel. Mengingat kalah senjata dan perlengkapan, Pasukan Hantu Maut menyingkir ke arah kuburan di Nitikan.¹⁰⁷

SWK 106 pimpinan Letkol Soedarto yang berkedudukan di Kulon Progo, bertugas mengikat pasukan Belanda yang berada di daerah itu. Kekuatan pasukan Belanda yang paling besar berada di Jembatan Bantar, karena dilengkapi persenjataan brencarrier. Letkol Soedarto mengerahkan Seksi Staf Pengawal menyerang pasukan Belanda dari arah barat dan Seksi Noer Moenir dari arah timur. Serangan ini

memaksa pasukan Belanda tidak bisa ke luar dari markasnya, sehingga tidak bisa membantu pasukan induk yang berada di Yogyakarta.

Dengan kegigihan pasukan TNI menyerang kedudukan Belanda di kota Yogyakarta dan kedisiplinan pasukan di luar Yogyakarta yang mengikat pasukan Belanda, maka pada waktu singkat kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Jalan sepanjang Malioboro dari Kantor Pos hingga tugu dipenuhi pasukan gerilya. Beberapa rakyat sipil memberanikan diri keluar rumah berbaur dengan pasukan gerilya. Serangan umum ini benar-benar mengejutkan Belanda, sebagaimana yang ditulis Pierre Heijboer dalam bukunya:

yang sudah berdiri sejak awal proklamasi. Senjata-senjata dari pasukan Sember Gelap yang kemudian juga Pasukan Hantu Maut didapat dari rampasan dari pihak Jepang pada saat serangan ke Kotabaru 7 Oktober 1945. Pasukan Hantu Maut terdiri dari pemuda-pemuda dari Kampung Brontokusuman, Prawirotaman, dan Karangkejèn dengan seragam kaos oblong berwarna hijau dengan celana berwarna putih. Pada tanggal 29 Juni 1949, Pasukan Hantu Maut mendapat tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sebelah utara rel kereta api (stasiun Tugu) samapai batas kota sebelah utara. Setelah pemerintahan kembali pada pemerintahan sipil, maka pasukan Hantu Maut yang dulunya yang telah dimiliterisasi diberi kesempatan untuk kembali ke instansi, sekolah atau bagi yang meneruskan ke pendidikan militer dan sudah lulus tes maka akan ditempatkan di Batalion yang sudah ditentukan dan bagi yang tidak lolos tes akan dikembalikan kepada masyarakat dengan surat penghargaan. Lihat: "Pasukan Hantu Maut" dalam <https://gudeg.net/direktori/1145/pasukan-hantu-maut.html>; Lihat pula. Seskoad, *op. cit.*, hlm. 246.

107) Pasukan Hantu Maut bermarkas di Dalem Pujokusuman yang didirikan oleh GBPH Pujokusumo yang merupakan putra Sultan Hamengku Buwono VIII. Pasukan Hantu Maut didirikan pada tanggal 9 Januari 1949 yang merupakan pecahan dari Pasukan Sember Gelap

“Ketika bangsa Indonesia benar-benar melancarkan serangannya pada tanggal 1 Maret, bagi pasukan Van Langen serangan itu sungguh mengejutkan.”¹⁰⁸

3. Akhir Serangan

Serangan pasukan TNI yang terencana, terstruktur, dan terpadu membuat pasukan Belanda terdesak dan kewalahan. Dengan kondisi yang demikian, pasukan Belanda di bawah komando Van Langen ini harus meminta bantuan pasukan di kota lain, yaitu pasukan dari Magelang dan Semarang. Pasukan Belanda yang berada di Magelang berkekuatan satu Brigif pimpinan Kolonel Van Zenten. Brigif ini mampu mengerahkan 1 Yonif yang diperkuat dengan Satuan Tank dan Panser. Batalyon yang terkenal adalah Gajah Merah dan Anjing NICA yang mempunyai banyak pengalaman bertempur di Burma, Bali, dan Palembang. Sementara itu pasukan dari Semarang setidaknya dapat mengerahkan 1 Yonif yang diperkuat Tank dan Panser.

Pada pukul 11.00, pasukan Belanda dari Magelang yang terdiri Batalyon Gajah Merah dan Anjing NICA yang diperkuat 1 Kompi Panser dan 1 Peleton Tank tiba di kota Yogyakarta.¹⁰⁹ Walaupun pasukan ini mendapat hambatan dari Peleton I dan III Kompi Martono

sepanjang jalan Magelang-Yogyakarta, tetapi Batalyon Gajah Merah dan Anjing NICA tetap melaju dan berhasil memasuki kota Yogyakarta. Dengan pasukan bantuan, kekuatan pasukan Belanda mulai pulih dan berbalik menyerang pasukan gerilya yang mulai mengundurkan diri menuju kedudukannya masing-masing. Sesuai dengan rencana, pasukan TNI tidak bermaksud menduduki kota Yogyakarta, tetapi memberi serangan kejutan dan menunjukkan bahwa kekuatan TNI masih ada. Oleh karena itu, pada pukul 12.00 pasukan TNI mulai meninggalkan kota Yogyakarta, walaupun mendapat pengejaran dari pasukan Belanda. Oleh karena menduduki kota Yogyakarta hanya kurang lebih 6 jam, maka Serangan Umum 1 Maret 1949 sering disebut juga “peristiwa 6 jam di Jogja”.

Pasukan SWK 101 berperan penting dalam menunjukkan jalan dan ikut melindungi SWK-SWK lain dalam mengundurkan diri menuju markas mereka masing-masing. SWK 102 pimpinan Mayor Sardjono meninggalkan kota Yogyakarta melalui Sitihinggil ke selatan menuju Krapyak sampai Beji di sebelah selatan Bantul. SWK 102 memilih Beji sebagai markas baru, setelah sebelumnya berada di desa Pandak. Kompi Widodo yang mundur tidak bersama-sama dengan pasukan SWK 102 terkepung di Klitren. Baru malam harinya berhasil sampai di markas, walaupun meninggalkan banyak korban. SWK 103A pimpinan Mayor H.N. Soemoelal meninggalkan kota Yogyakarta melalui Ngampilan. Di sepanjang jalan Ngampilan, pasukan 103A mendapat perlawanan dan tembakan dari Belanda. Untuk menghindari banyaknya korban, mereka mundur melalui

108) Pierre Heijboer, *op. cit.*, hlm. 173.

109) Pramoedy Ananta Toer, *op. cit.*, hlm 46

gorong-gorong dan selokan air yang tembus ke Kali Winongo. Pada akhirnya, pasukan SWK 103A berhasil sampai di Godean.

Pasukan SWK 104 yang dipimpin Mayor Soekasno kembali ke markas tidak secara serempak. Saat sebagian besar pasukan SWK 104 sudah sampai di Rejodani, pasukan TP Arief Soeratno dan pasukan SSKODM pimpinan Zidmi Noeri terlibat tembak menembak dengan pasukan Belanda di Gondanglutung. Akhirnya pada pukul 17.00, pasukan TP dan SSKODM berhasil sampai di markas Rejodani. Pasukan SWK 105 pimpinan Mayor Soedjono sampai pukul 12.00 bertahan di Maguwo dan Tanjungtirto, kemudian mengundurkan diri ke markasnya di Srimartani. Pasukan SWK 106, pada pukul 12.00 mulai mengendurkan serangan ke Bantar dan mulai mengundurkan diri ke Kulon Progo. Komandan SW III yang juga pimpinan Serangan Umum 1 Maret Letkol Soeharto mengundurkan diri ke arah barat sampai di Klaci (sebelah timur Godean) bertemu dengan Batalyon 151 Harjo Soedirdjo dan sore harinya baru menuju ke Sangonan.

Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan serentak yang dilakukan TNI dalam wilayah pertahanan WK III yang memperlihatkan dunia internasional bahwa TNI dan negara Indonesia masih ada. Dalam Serangan Umum ini, pihak TNI kehilangan 353 tentara yang meninggal dunia, sedangkan pihak Belanda kehilangan 150 tentara yang meninggal dunia. Berita mengenai Serangan umum ini disebarkan melalui pemancar radio jarak jauh milik AURI di Playen Wonosari Gunungkidul. Kapten Boediardjo mengirim berita lewat morse, dengan menggunakan teks berita yang diterima

dari Pejabat kepala Staf Angkatan Perang RI, Kolonel TB Simatupang dari kedudukannya di Kulonprogo, barat Yogyakarta. Teks berita ini dikirimkan ke markas PDRI di Sumatera barat dengan terlebih dahulu diterima oleh Sersan Mayor Udara Umar Said Noor. Umar Said, kemudian melaporkan penerimaan berita itu kepada Kapten Penerbang Dick Tamimi, dan Bersama-sama menghadap Pjs. Presiden Pemerintah Darurat RI, Syafruddin Prawiranegara. Oleh Pjs Presiden disuruh meneruskan ke pos pemancar di Takengon, Aceh agar dikirimkan ke radio di Burma (Myanmar), yang kemudian diterima oleh AII India Radio New Delhi, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.¹¹⁰

Serangan umum yang begitu mendadak tentu saja mengagetkan dan mengejutkan pasukan Belanda. Mengenai serangan itu, pihak Belanda mengemukakan.

“Hari Selasa pagi tanggal 1 Maret lebih kurang pukul 04.00 pos-pos Belanda yang berada di perbatasan kota Yogya telah ditembaki. Tepat pukul 06.00 pelbagai tempat di dalam kota telah terjadi penembakan secara gencar. Dua serangan telah dilakukan oleh gerombolan-

110) "SO 1 Maret diprakarsai Sri Sultan HB IX: Kesaksian Boedihardjo dan sabar Wiyonomukti", *BERNAS*, edisi 2 Maret 1999.

gerombolan dari jurusan barat, sedang percobaan serangan ketiga dilakukan dari jurusan selatan, di mana terletak Kraton.¹¹¹

Dari pengumuman itu terlihat bahwa Belanda menaruh curiga yang besar terhadap Sultan Hamengku Buwono IX membantu perjuangan para gerilyawan. Pihak Belanda memang menaruh curiga yang besar terhadap Sultan. Pada siang harinya setelah serangan umum berakhir, Kolonel Van Langen bersama dengan Residen Stok mendatangi kraton. Kedua pejabat Belanda itu langsung melempar tuduhan bahwa selama serangan berlangsung terdapat tembakan yang datang dari kraton. Tuduhan itu ditangkis oleh Sultan dengan menunjukkan situasi di kompleks kraton yang tidak memungkinkan apa yang dituduhkan itu. Dua hari kemudian datang Jenderal Meier yang menuduh Sultan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pimpinan “gerombolan teroris” dan memberikan instruksi kepada mereka. Meier juga menuduh bahwa Sitihiinggal sering menjadi sarang dari para penyerang dan apabila diserang akan berlindung di tembok kraton dan menembak dari atas tembok yang tinggi. Sultan membantah semua tuduhan tersebut dan beragumen bahwa selama ini Sultan tidak bisa ke luar kraton dan bertindak dengan leluasa. Dari pembicaraan itu, Jenderal meier gagal menundukkan Sultan dan gagal membujuk Sultan untuk bekerja sama dengan

Belanda. Mereka akhirnya meninggalkan kraton dengan sopan dengan terlebih dahulu melakukan jabat tangan.¹¹²

Keberhasilan Serangan umum 1 Maret 1949 banyak diapresiasi oleh banyak tokoh nasional bahkan oleh para pejuang sendiri. Sultan Hamengku Buwono IX dengan nada penuh gembira mengatakan bahwa.

“Ternyata berhasil sekali. Kita dapat menduduki Yogyakarta itu sampai jam 3, oleh karena jam 2 siang saya dapat informasi bahwa kavaleri yaitu berupa tank-tank dari Magelang telah berangsur menuju Yogyakarta. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Pak Harto agar supaya korban jangan sampai terlalu banyak, untuk mengundurkan diri, dan persis jam 3, TNI mengundurkan diri. Dan menurut pendapat saya, sudah cukup untuk menarik perhatian dari Security council. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar kita yang ada di Gunung Kidul, di Playen ke Bukittinggi, dan dai Bukittinggi ke India, dan dati India ke PBB. Dan ternyata ini mempunyai pengaruh yang besar sekali, sehingga terjadi keputusan daripada security council bahwa republik harus kembali. Dan akibat dari keputusan ini diadakan perundingan antara Van Royen dan Rum”.¹¹³

111) Bathara Hutagalung, *op. cit.*, hlm 454

112) Atmakusuma, *op. cit.*, hlm. 81-82

113) Colin Wild dan peter Carey, *op. cit.*, hlm. 191

Komando Brigade mencatat peristiwa itu dalam buku peringatannya sebagai berikut:

“Di antara beberapa serangan umum (SO), maka yang mendapat hasil yang sebaik-baiknya adalah penterangan umum tanggal 1 Maret. Terutama kemenangan politis. Karena dengan penyerangan itu segala propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI telah hancur, Yogya telah dikuasai seluruhnya, pemerintahan mereka sudah berjalan dan lain sebagainya dapat diberantas seketika itu juga,.....”¹¹⁴

Setelah serangan umum 1 Maret 1949, upaya-upaya untuk melaksanakan KMB semakin terbuka lebar. Soekarno yang berada di Bangka mendapat undangan untuk segera melaksanakan KMB. Soekarno menjawab dalam surat tgl 4 Maret 1949, perundingan baru bisa dilaksanakan bila kekuasaan RI dikembalikan seperti semula. Upaya diplomasi menemui keberhasilan dan kemajuan setelah diadakan persetujuan Rum-Roijen yang ditandatangani 7 Mei 1949 di hotel Des Indes Jakarta. Perundingan itu memutuskan untuk terselenggaranya KMB yang direncanakan bulan Agustus-November 1949. Dalam perundingan itu juga disepakati bahwa Belanda menyetujui pemerintah RI bebas melaksanakan jabatannya di Yogyakarta dan pemerintah Belanda akan membebaskan tanpa syarat pemimpin-pemimpin RI yang ditawan



Foto 2.4. Presiden Soekamo dan Walik Presiden Moh. Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari Bangka. (1949-07-06/ IPHHOS)

114) Nasution, *op. cit.*, hlm. 95



Foto 2.5. T.R.I (Tentara Republik Indonesia) memasuki Yogyakarta dalam rangka pengambilan Republik Indonesia. (1949-06-29/ IPHHOS)

sejak tgl 19 Desember 1948. Atas persetujuan Rum-Ruijen ini, pemerintah Darurat RI di Bukittinggi memerintahkan kepada Sultan HB IX untuk mengambil alih pemerintahan sementara bila Belanda mengundurkan diri dari Yogyakarta

Pada tanggal 29 Juni 1949 pasukan Belanda meninggalkan dan secara berangsur-angsur TNI masuk kota Yogyakarta, Oleh karena itu tanggal 29 Juni diperingati sebagai “Hari Yogya Kembali”. Penarikan pasukan Belanda dan masuknya TNI tidak menimbulkan insiden karena kuatnya pemerintahan sipil yang dipegang oleh Sultan HB IX. Setelah Yogyakarta dikuasai TNI dibawah kendali Sultan HB IX, maka pada tgl 6 Juli 1949 Presiden dan wakil presiden bertolak dari pangkal pinang menuju Yogyakarta dan pemimpin-pemimpin lainnya yang ditawan di Bangka. Setelah kedatangan Pemimpin-pemimpin republik, kemudian tgl 10 Juli 1949 pukul 13.00, Jenderal Soedirman masuk ke alun-alun utara Yogyakarta dengan pasukannya setelah memimpin gerilya. §

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas universal-universal dalam Penyusunan Serangan Umum 1 Maret adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan;

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret memiliki tujuan menulis kembali fakta-fakta sejarah yang selama ini belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya khususnya terkait keterlibatan tokoh-tokoh penting Soekarno, Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta tokoh-tokoh penting lainnya.

Peringatan Peristiwa Serangan Umum 1 Maret juga dapat mengingatkan kembali masyarakat Indonesia, untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret perlu mendapat persetujuan pejabat untuk ditetapkan menjadi Hari Besar Nasional, dilihat dari materi muatan/ substansinya. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret dapat diperingati sebagai Hari Besar Nasional melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden menjadi Hari Besar Nasional yang dilihat dilihat secara hierarki perundang-undangan berdampak nasional untuk diperingati sebagai Hari Besar Nasional.

d. Dapat dilaksanakan;

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Besar Nasional dapat dilaksanakan/ diperingati secara nasional untuk menjadi momentum peringatan bersejarah.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Penetapan Serangan Umum 1 Maret sebagai peringatan Hari Besar Nasional berdampak pada penyajian peristiwa sejarah yang edukatif bagi masyarakat.

f. Kejelasan rumusan; dan

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang selanjutnya ditetapkan menjadi Hari Besar Nasional melalui Keputusan Presiden memiliki rumusan penetapan yang pada prinsipnya menyatakan sebagai Hari Besar Nasional.

Perumusan Keputusan Presiden terkait penetapan Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional yang diperingati oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dan bukan merupakan hari libur nasional.

g. Keterbukaan.

Materi muatan/ substansi dalam Keputusan Presiden tentang Hari Kedaulatan Negara berisikan keterbukaan informasi bagi publik/ masyarakat dalam memahami peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret.

Keputusan Presiden terkait Penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional harus mencerminkan asas kebangsaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, dan keadilan. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Besar Nasional merupakan implementasi dari kekuasaan negara untuk memberikan penghormatan bagi para tokoh-tokoh besar yang terlibat dalam perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan negara Indonesia secara utuh oleh dunia internasional, yang selama ini secara tidak adil masih sengaja direduksi perannya.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga Keputusan Presiden ini diharapkan dapat semakin menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai

sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang diinformasikan kepada masyarakat saat ini belum menggambarkan fakta yang sebenarnya, antara lain:

1. Mengedepankan tokoh tertentu dan mereduksi peranan tokoh-tokoh besar lainnya.
2. Rangkaian peristiwa 1 Maret merupakan peristiwa pemicu dari munculnya peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya pasca kemerdekaan Indonesia baik secara diplomasi maupun secara gerilya yang kemudian berakhir pada pelaksanaan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 yaitu Penyerahan Kedaulatan Negara oleh Belanda kepada Indonesia.

Kondisi ini sebagaimana yang termuat di dalam buku yang berjudul *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat* yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat, tahun 1972. Dalam buku ini disebutkan bahwa Letkol Soeharto adalah inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat itu komandan Brigader X/Wehkreise III mengatakan merasa perlu sebuah serangan di siang hari untuk menunjukkan TNI masih ada.¹ Klaim bahwa Letkol Soeharto adalah pencetus ide Serangan Umum 1 Maret 1949 dipertegas dan dipopulerkan dalam film *Janur Kuning* yang disutradarai oleh Alam Rengga Rasiwan Surawidjaja pada tahun 1980.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa banyak tokoh-tokoh penting lain yang terlibat dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret dan bermuara pada Penyerahan Kedaulatan Negara secara utuh oleh Belanda kepada Indonesia dan Pengakuan dunia Internasional atas kedaulatan Negara Indonesia.

1) Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat* (Bandung: Disjarah, 1972)

Makna dari Serangan Umum 1 Maret adalah

1. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan masih mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang mengklaim sudah menguasai Indonesia sepenuhnya;
2. Serangan ini membuka peluang kuat untuk dilakukan pembahasan kembali pada Sidang Keamanan PBB mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang tidak diakui oleh Belanda dan negara-negara lain;
3. Perbedaan serangan ini dengan serangan yang lain adalah pada sisi momentum yang tepat, dimana akan diselenggarakan sidang PBB sehingga dapat memberikan penguatan perjuangan diplomasi Indonesia di ranah internasional;
4. Serangan umum ini menjadi dasar politik dan diplomasi untuk menghentikan rangkaian upaya sepihak dari Belanda, untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II serta pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville.
5. Serangan Umum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa (di antaranya para Laskar Sabrang yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, dan Bali) serta dalam pelibatangannya telah melibatkan berbagai komponen bangsa lainnya, dari rakyat biasa, pelajar, pejuang, Keraton, TNI, dan Kepolisian, sehingga menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam rangka menyukseskan tujuan untuk menunjukkan penegakan kedaulatan negara paska proklamasi.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Keputusan Presiden

Kajian akademis yang baru tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 ini telah diseminarkan pada lingkut daerah dan lingkup nasional dalam berbagai seminar lokal dan nasional yang melibatkan para pakar sejarah dari berbagai universitas di Indonesia, antara lain: Dr. Sri Margana, M.Phil (UGM); Julianto Ibrahim, M.Hum (UGM); Prof. Dr. Nina Herlina Lubis (UNPAD); Prof. Dr.

Gusti Asnan, M.A. (UNAND); Dr. Suryadi Mapangara, M.Hum (UNHAS); Dr. Abdul Syukur, M.A. (UNJ); Dr. Hilmar Farid (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat); Prof. Dr. Mahfud MD (Menkopolhukam); Prof. Dr. Dadan Wildan (Staf Ahli Sekneg) merekomendasikan agar Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dijadikan sebagai Hari Nasional.

Dan sebagai hasil dari sosialisasi pengusulan ini telah didapatkan banyak dukungan dari berbagai komponen masyarakat dan Lembaga negara antara lain:

1. Rekapitulasi Perolehan Dukungan Tertulis dan Rekaman Video adalah Total dukungan tertulis dan rekaman video: 244 dukungan.
 - a) Dukungan dari Kementerian dan lembaga berjumlah 9 dukungan, dengan Kementerian Dalam Negeri yang bertindak selaku Kementerian Pemrakarsa:
 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Kementerian Pertahanan;
 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Kementerian Sosial;
 8. Badan Informasi Geospasial;
 9. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
 - b) Dukungan dari instansi pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 107 dukungan.
 - c) Dukungan dari instansi pemerintah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 32 dukungan.
 - d) Dukungan dari organisasi nonpemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 48 dukungan
 - e) Dukungan dari organisasi nonpemerintah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 40 dukungan.
 - f) Dukungan dari pihak swasta berjumlah 12 dukungan.
10. Dukungan Twibbon Masyarakat umum dapat mengakses twibbon ini melalui tautan [twb.nz/1maretharibesar](https://www.instagram.com/twb.nz/1maretharibesar) per 12 November 2021 mencapai 10.530 pengguna.
11. Dukungan Piagam Otomatis Masyarakat umum dapat mengakses

piagam dukungan otomatis ini melalui tautan tinyurl.com/DukunganSU1Maret per 12 Desember 2021 berjumlah 194 dukungan.

12. Dukungan Deklarasi ini merupakan bentuk dukungan dibacakan secara bersama-sama antara pembicara, panitia, dan peserta seluruhnya ketika seminar nasional berjumlah 680 orang.
13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa telah mengirimkan buku naskah akademis kepada Gubernur dan Dinas Kebudayaan-Pendidikan seluruh Indonesia.
14. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kementerian Dalam Negeri selaku pemrakarsa telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengundang seluruh kementerian, gubernur, bupati, walikota, universitas, komunitas sejarah, dan masyarakat umum pada 16 November 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 680 orang.
15. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2021 juga telah menyiapkan media pembelajaran berupa infografik Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Penetapan Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional dengan nomenklatur Hari Penegakan Kedaulatan Negara memiliki dampak terhadap pembebanan keuangan negara, yaitu dalam bentuk kegiatan ceremonial pelaksanaan upacara dan kegiatan pemberian edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan dimaksud, memberikan dampak yang positif dimana informasi terkait sejarah Serangan Umum 1 Maret sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat dengan utuh dan komprehensif dalam konteks sejarah nasional Indonesia.



Upacara pelantikan pucuk pimpinan T.N.I. oleh Presiden Soekarno di Istana Yogyakarta. [Presiden Soekarno sedang membacakan pelantikan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman di Istana Negara Yogyakarta]. (1947-02-15/ IPHHOS)

Bab III

EVALUASI DAN ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan yuridis dari pembentukan Keputusan Presiden.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Keputusan Presiden antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.

2. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini menjadi dasar untuk menjalankan kewenangan eksekutif yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk menetapkan Keputusan Presiden.

B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selaras dengan tujaun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Adanya pemahaman yang utuh terkait nilai historis dan kebangsaan serangan umum 1 Maret menjadi salah satu perwujudan pendidikan nasional sesuai tujuan negara.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Keputusan Presiden ini mengakomodir nilai kesejarahan dan merupakan bentuk kristalisasi nilai budaya nasional, menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Dengan demikian substansi Keputusan Presiden ini merupakan wujud Kedaulatan budaya sehingga mampu untuk meminimalisir tantangan dari gempuran gelombang budaya asing yang masuk ke Indonesia dalam konteks globalisasi.

E. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, Keputusan Presiden tentang Hari penegkan Kedaulatan Negara merupakan salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen serta instrument kebijakan lainnya.

F. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Substansi utama yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 yaitu mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini pimpinan lembaga negara diminta untuk membangun karakter bangsa. Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

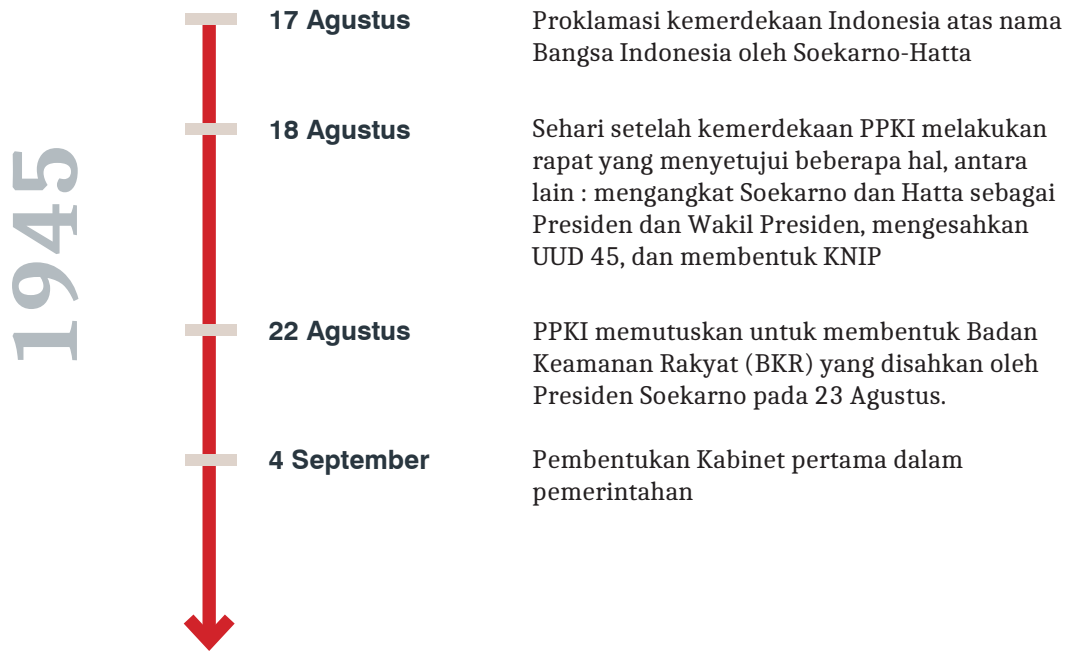
Berbagai peristiwa sejarah yang terjadi selama periode setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, memiliki makna sejarah yang penting dan telah diperingati sebagai Hari Nasional, antara lain:

1. 17 Agustus 1945 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan
2. 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2018
3. 5 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi TNI dengan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999
4. 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan dengan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959

5. 1 Juli 1946 sebagai Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969
6. 19 Desember 1948 Pembentukan PDRI sebagai Hari Bela Negara dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006

Sementara itu, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 memiliki makna yang sangat penting bagi penegakan kedaulatan negara belum ditetapkan sebagai Hari Nasional. Peristiwa ini, sebenarnya adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sejak proklamasi hingga pengakuan kedaulatan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilihat pada *timeline* di bawah ini.

TIMELINE SERANGAN UMUM 1 MARET 1949



1945

- 
- 5 September** HB IX dan PA VIII mengeluarkan amanat 5 September yang berisikan pernyataan bahwa Kasultanan dan Pakualaman masuk dan menjadi bagian dari Indonesia
 - 8 September** Tujuh orang perwira Inggris dari Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) mendarat dengan terjun payung di Bandara Kemayoran Jakarta
 - 27 September** Pasukan Sekutu dipimpin oleh Philips Christison mendarat di Tanjung Priok
 - 4 Oktober** Letnan Jenderal H.J. Van Mook tiba di Batavia. Pada masa pendudukan Jepang, Van Mook pergi ke Australia untuk menghindari invasi Jepang.
 - 5 Oktober** Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat
Pembentukan TKR
 - 6—7 Oktober** Di Jogja terjadi peristiwa penyerbuan Kota Baru oleh TKR dikarenakan pelucutan senjata tentara Jepang tidak berjalan mulus
 - Oktober—November** Pasukan Sekutu mulai masuk dan menguasai kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Beberapa kali pecah pertempuran antara sekutu dengan tentara dan rakyat, antara lain seperti yang terjadi di Semarang dan Surabaya

1945

10 November Pertempuran Surabaya (Hari Pahlawan)

4 Januari Ibukota Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, selain dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, perpindahan ini juga diikuti oleh para menteri dan alat kelengkapan negara yang lain

7 Januari Tentara Keamanan Rakyat berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat

21 Januari Tentara Keselamatan Rakyat melalui Penetapan Pemerintah diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia

31 Januari Jenderal Spoor menggantikan Jenderal Van Oyen sebagai Komandan KNIL

1946

7 Februari Sidang DK PBB di London membahas masalah antara Belanda dengan Indonesia

1 Juli Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

15 November Disetujuinya Perjanjian Linggarjati, antara Indoensia dengan Belanda. Dalam perjanjian ini disepakati beberapa hal antara lain gencatan senjata kedua belah pihak, pengakuan secara de facto wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera masuk ke dalam wilayah Republik oleh Belanda

30 November Tentara Sekutu meninggalkan Indonesia

1947

3 Juni

Tentara Republik Indonesia berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia

21 Juli

Agresi Militer Belanda I

4 Agustus

Dikeluarkannya perintah gencatan senjata oleh kedua belah pihak disemua wilayah pertempuran

18 September

Komisi Tiga Negara secara resmi terbentuk

1948

9 Januari

Belanda mengeluarkan ultimatum agar Republik segera meninggalkan wilayah selain wilayah yang diakui dalam Perjanjian Linggarjati dan meminta TNI agar menarik diri ke wilayah Yogyakarta


11 Januari

KTN tiba di Yogyakarta dan berunding dengan Pemerintah Indonesia. Pada 13 Januari disetujuinya kesepakatan awal antara Indonesia dengan KTN sebelum diadakannya perundingan dengan pihak Belanda

17 Januari

Disetujuinya Perjanjian Renvill. Hasil kesepakatan perjanjian ini sangat tidak menguntungkan pihak Indonesia. Atas dasar perjanjian tersebut maka pada 19 Januari dilakukan gencatan senjata oleh kedua belah pihak

1948

- 
- Februari** Belanda kembali merencanakan serangannya kepada wilayah Republik. Rencana dan aksi serangan ini dikomandoi oleh Jenderal Spoor, serta beberapakali Jenderal Spoor menuduh TNI melakukan serangan di wilayah kekuasaan Belanda
- 12 Juni** Panglima Soedirman mengeluarkan perintah siasat no. 1 kepada seluruh jajaran TNI, yakni mengenai strategi perang gerilya
- 15 Desember** Panglima Soedirman memerintahkan agar dilakukan latihan perang-perangan guna melatih dan mempersiapkan serangan dari pihak Belanda
- 19 Desember** Agresi Militer Belanda II. Tentara Belanda menyerang ibukota Yogyakarta
- Persiapan Agresi yang dilakukan oleh tentara Belanda di Lapangan Udara Andir Bandung. Serangan Agresi Militer II ini menitikberatkan pada serangan pendadakan dan kekuatan udara untuk melumpuhkan Yogyakarta.
- Pembentukan PDRI
- 19 Desember** **4.30 Pagi:** Pesawat pertama yang membawa pasukan baret merah Belanda yang berspesifikasi para (terjun payung) mulai diberangkatkan dan pesawat terakhir terbang 15 menit kemudian
- 6 Pagi:** Lapangan Udara Maguwo diserang oleh pesawat tempur Belanda, selanjutnya pasukan terjun payung mendarat untuk mengamankan lapangan tersebut

1948

19 Desember


8—9 Pagi: Lapangan Udara Maguwo berhasil dikuasai dan pesawat pengangkut pasukan baret hijau Belanda dari Semarang mulai mendarat

9 Pagi—5 Sore: Pasukan Belanda mulai masuk dan menguasai Kota Yogyakarta, terjadi perlawanan dengan TNI. Tempat-tempat strategis mulai dikuasai oleh Belanda, hingga pukul 5 Kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda, serta para pemimpin Republik dijadikan tahanan politik oleh Belanda


Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta segera menyelenggarakan sidang mempersiapkan berbagai skenario untuk menyelamatkan Indonesia. Keputusan sidang itu adalah:

- a) Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang akan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara di Sumatera Barat.
- b) Menunjukkan A. A. Maramis membentuk pemerintahan darurat di luar negeri jika PDRI gagal dilaksanakan.
- c) Memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri untuk memantau perkembangan politik di dalam dan di luar negeri khususnya tentang nasib Indonesia, dan melaporkannya kepada presiden.
- d) Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan diri untuk bertahan di ibu kota negara dan melanjutkan perjuangan secara diplomatik.
- e) Memerintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk terus melakukan perlawanan dengan siasat perang gerilya.

1948

- 
- 19 Desember** Presiden, Wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sejak itu Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada.
- 22 Desember** Panglima Tentara dan Komando Teritorial Jawa, Nasution, mengeluarkan perintah pemerintahan sipil diseluruh Jawa
- Sebagian pemimpin Republik diberangkatkan untuk diasingkan
- DK PBB melakukan rapat darurat untuk membahas Agresi Militer II
- PDRI di Bukit Tinggi didirikan dan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara.
- PDRI di Bukit Tinggi didirikan dan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara.
- 24—25 Desember** DK PBB mengeluarkan dua kali resolusi untuk meminta Belanda menghentikan serangannya atas wilayah Republik
- 29 Desember** Pasukan TNI melakukan penyerangan pos-pos pasukan Belanda pada malam hari di Yogyakarta

1949

- 
- 1 Januari**

Panglima Divisi III Bambang Soegeng mengeluarkan Perintah Siasat 4 kepada semua komandan werkhkreis di daerahnya untuk melakukan penyerangan serentak kepada Belanda
 - 9 Januari**

TNI kembali melakukan serangan terhadap pos-pos tentara Belanda. Serangan Umum yang kedua ini menindak lanjuti Perintah Siasat No. 4
 - 16 Januari**


Untuk ketiga kalinya TNI melakukan serangan pada pos-pos penjagaan Belanda yang berada disekitar Kota Yogyakarta
 - 28 Januari**

DK PBB kembali mengeluarkan resolusi untuk meminta Belanda menghentikan agresinya dan mengembalikan pimpinan Republik yang ditangkap
 - 4 Februari**


Kembali dilakukan Serangan Umum yang ke-4. Serangan ini juga bertujuan untuk melihat persiapan sebelum dilakukan Serangan Umum pada siang hari
 - 8 Februari**

Komisi Tiga Negara kembali mengeluarkan pernyataan agar Belanda segera membebaskan pemimpin Republik yang ditawan

1949

- 
- 28 Februari** Dikarenakan kesalahan komunikasi antar pasukan terjadi insiden penyerangan oleh TNI pada pagi dan sore hari. Mereka salah mengartikan waktu Serangan Umum yang seharusnya dilakukan esok hari
- 1 Maret**
- 6 Pagi:** Saat sirine tanda berakhirnya jam malam berbunyi, hal tersebut juga merupakan tanda dimulainya Serangan Umum pada pagi hari
- Pagi—Siang:** Pasukan TNI mulai menyerang dan masuk ke dalam Kota Yogyakarta. Terjadi perlawanan dengan tentara Belanda, namun TNI dapat menguasai tempat-tempat penting yang strategis di Kota Yogyakarta.
- 11 Siang:** Pasukan bantuan Belanda dari Magelang mulai datang dan membantu melawan TNI
- 1 Siang:** Pasukan TNI mulai keluar dan menarik diri dari dalam kota untuk kembali ke markas masing-masing
- Sore Hari:** Yogyakarta kembali dikuasai Belanda, dan mulai melakukan pembersihan. Meskipun demikian dengan berhasil dikuasainya Yogyakarta pada siang hari telah membuka mata dunia bahwa Republik dan TNI masih ada.
- 2 Maret** Jenderal Spoor berada di Jogja untuk melihat kondisi pasca Serangan Umum

1949

- 
- 10 Maret**

Pasukan terjun payung menyerang Wonosari yang dianggap sebagai basis Panglima Soedirman dan tempat pemancar radio berita mengenai Serangan Umum
 - 23 Maret**

Dalam sidang DK PBB usulan Kanada untuk sebuah resolusi mengenai Belanda-Indonesia disetujui
 - 14 April**

Dimulainya perundingan awal antara Belanda-Indonesia atas prakarsa KTN untuk menindaklanjuti resolusi DK PBB
 - 7 Mei**

Disepakatinya Perjanjian Roem-Roijen
 - 24 Juni**

Pasukan Belanda yang diterjunkan di Wonosari mulai ditarik mundur

Safrudin Prawiranegara sebagai Pejabat Presiden PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali di Yogyakarta.
 - 29 Juni**

Pasukan Belanda yang menguasai Yogyakarta mulai ditarik mundur dan meninggalkan kota

Ibukota Negara RI resmi kembali ke Yogyakarta.

1949



30 Juni	Sri Sultan Menyerahkan Kembali Mandat dari Presiden Syafrudin Prawiranegara setelah proses Pengembalian Ibukota Yogyakarta dari Bukit Tinggi selesai.
6 Juli	Soekarno & Hatta serta pemimpin Republik lain yang ditangkap Belanda kembali ke Yogyakarta
10 Juli	Panglima Soedirman kembali ke Yogyakarta setelah perang gerilya
13 Juli	Sidang Kabinet pertama kali digelar setelah peristiwa Agresi Militer Belanda II. Pada tanggal 24 Juli terbentuk delegasi Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar
23 Agustus	Konferensi Meja Bundar dilaksanakan. Hingga pada 2 November hasil KMB disetujui oleh kedua belah pihak
27 Desember	Belanda Mengakui Kedaulatan Indonesia. Dokumen penyerahan Kedaulatan diterimakan dari delegasi Indonesia Muhammad Hatta dkk kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX



Panglima Besar Soedirman tiba di Istana disambut oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dengan hangat. (1949-07-09/ IPHHOS)

Bab IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Landasan Sosiologis

Serangan Umum 1 Maret (selanjutnya disebut SO1) di Yogyakarta pada penghujung revolusi fisik tidak hanya menghadirkan dampak signifikan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta melainkan bagi Republik Indonesia dalam upaya dekolonisasi dan membuktikan eksistensinya di dunia. Seperti halnya perang dan pertempuran lain, SO1 tidak dilakukan dengan tujuan semata-mata menciptakan aksi kekerasan massal dan menghabiskan nyawa prajurit

lawan melainkan dengan kalkulasi pencapaian politik yang jelas.¹ Politik dalam kasus ini tidak hanya berdampak bagi politik dalam negeri, seperti relasi antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX (dan Yogyakarta) dengan pemimpin republik lain maupun dengan pemimpin Belanda di Indonesia kala itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah dorongan yang diberikan bagi posisi tawar Republik Indonesia di dunia internasional.

Pertempuran sebagai suatu peristiwa politik selalu berdampak bagi berbagai aspek kehidupan unit politik yang melaksanakannya (dalam hal ini Republik Indonesia) dan masyarakat yang secara umum merasakan dampaknya. Naskah ini akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh SO1 dalam aspek diplomasi yang berkaitan dengan isu kedaulatan Republik Indonesia dan aspek strategi.² Aspek strategi yang akan dibahas dalam naskah ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh SO1 terhadap keputusan Belanda dalam penggunaan kekuatan militer dalam mencapai tujuan politiknya.

Eksistensi Republik Indonesia sebagai Kunci

Secara umum, dampak SO1 dapat dirangkum dalam dua kata; pembuktian eksistensi. Secara *de facto* namun masih bersifat sepihak (*self-centered*), Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut berperan sebagai pernyataan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai negara berdaulat dengan hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain.³

Berkaitan dengan negara-negara lain ini, pernyataan kemerdekaan tidak bisa semata-mata bersifat sepihak dan harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Tidak sulit bagi Indonesia untuk mendapat dukungan dari negara-negara berdaulat yang sejak lama menaruh perhatian pada proses dekolonisasi. Sebagai contoh, atas keteguhan perjuangan Monseigneur Soegijapranata, sebagai putra bangsa pertama yang menjabat sebagai Uskup Agung, Tahta Suci Vatikan menjadi salah satu negara

1) Lihat Pramoedya Ananta Toer, et. al., *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 47-48.

2) Lihat Carl Von Clausewitz, *On War*. (Princeton: Princeton University Press, 1967), hlm. 75.

3) Juti, *Arti Proklamasi dan K.M.B.*, (Jakarta: Penerbit Logika, 1949), Hlm. 23.

berdaulat pertama yang mengakui Republik Indonesia secara *de facto*.⁴

Mewakili negara-negara Arab, Palestina memberikan pengakuan kedaulatan sebelum Indonesia satu tahun sebelum proklamasi kemerdekaan pada 6 Desember 1944. Disusul oleh Mesir yang memberikan pengakuan kedaulatan setelah Proklamasi yang juga mendorong negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi, Suriah, Irak, Yaman, Afghanistan, Iran dan Turki untuk mengirim diplomatnya ke Yogyakarta.⁵ Sementara mewakili negara ex-koloni dari Asia, India juga banyak menaruh perhatian pada proses kemerdekaan Indonesia hingga penyerahan kedaulatan pada Desember 1949.⁶

Tidak ubahnya pengakuan oleh negara-negara yang telah disebutkan di atas, Republik Indonesia “membutuhkan” pengakuan kedaulatan oleh penjajahnya sendiri; Belanda meskipun akan menghadapi jalan yang lebih sulit. Sebelum pembicaraan mengenai kedaulatan yang kelak akan berkenaan dengan nama negara, hukum/undang-undang, dan isu simbolik lainnya dimulai, Republik Indonesia harus terlebih dahulu diakui keberadaannya. Bagi Belanda yang telah lama berada di wilayah Indonesia, sejak nenek moyangnya yang berlayar sebagai kongsi dagang dengan *oocroi* (VOC) hingga kehadirannya sebagai negara sejak awal abad ke-19, mengakui negara ex-koloni menjadi negara merdeka bukanlah perkara mudah. Lebih dari pengalaman Belanda yang telah lama berada di wilayah Indonesia, Belanda juga memiliki harapan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai koloni yang akan mereka diami selama-lamanya.⁷

Setelah perjanjian Renville yang mempersempit wilayah republik dan Agresi Militer II dengan tujuan untuk menimbulkan kelumpuhan strategis (*strategic paralysis*) bagi Republik, Belanda cenderung mengeksklusi Republik dari pembicaraan-pembicaraan yang sesungguhnya bertujuan

-
- 4) F. X. Murti Hadi Wijayanto, *Soegija In Frames*, (Yogyakarta: Puskat Pictures, 2012), hlm. 138; Ayu Utami, *Soegija 100% Indonesia*, (Yogyakarta: Puskat Pictures, 2012), hlm. 180.
 - 5) Suranta Abd. Rahman, “Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947”, *Wacana*. Vol. 9, No. 2, Oktober 2007, hlm. 154.
 - 6) Andrik Purwasito & Kundharo Saddhono, *Imajeri India: Studi Tanda dalam Wacana*, (Jakarta: Pustaka Cakra, 2002), hlm. 245; Departemen Penerangan, *Lukisan Revolusi, 1945-1950: Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1954), hlm. 412.
 - 7) J. B. Soedarmanta, *Politik Bermartabat: Biografi IJ. Kasimo*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 320.

untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada kondisi tersebut, pemimpin-pemimpin republik terutama yang berada di Yogyakarta pada kondisi ketika pemimpin republik diasingkan di Muntok, Bangka merencanakan tindakan signifikan namun terarah untuk mendobrak eksklusi yang dilakukan.

Tindakan mendobrak kondisi ini yang kemudian menjadi ruh SO1 dan “mengawal” serangan ini menjadi suatu aksi militer yang tidak semata-mata bertujuan untuk membunuh dan membantai manusia melainkan suatu tindakan politis. Keberhasilan mencapai tujuan politik ini yang kemudian menggolongkan SO1 sebagai suatu aksi militer yang berhasil.

Kawat Diplomatik dari Yogyakarta: Diplomasi Republik Indonesia Pasca Serangan Umum 1 Maret

Berbeda dengan strategi perang simetris, perang gerilya yang digunakan oleh pihak Republik dalam menghadapi Belanda pada periode 1945-1949 menekankan transmisi pesan politik kepada lawan maupun pihak ke-3. SO1, lebih dari sekedar serangan mendadak (*surprise offensive*) kepada pihak Belanda, sesungguhnya berperan sebagai “kawat diplomatik” para gerilyawan terhadap dunia. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Letkol Soeharto menyepakati suatu pandangan bahwa serangan yang terjadi di Yogyakarta tersebut adalah pernyataan sikap mengenai eksistensi republik sebagai entitas politik yang berdaulat.

Pesan yang paling utama dari “kawat diplomatik” ini adalah eksistensi Republik



Foto 3.1. Radio Rimba Raya di Ronga-Ronga, Bireun. Aceh



Foto 3.2. Radio PC-2 Milik AURI di Playen, Gunungkidul. Yogyakarta

Indonesia sebagai negara berdaulat yang siap melanjutkan perjuangannya melalui jalan diplomasi maupun militer. “Kawat diplomatik” para gerilyawan ini mencapai New York melalui berita-berita berbagai Bahasa yang ditransmisikan dari radio perjuangan di Playen, Gunungkidul, ke Bukitttinggi dan kemudian diteruskan ke India dan akhirnya diterima oleh PBB.⁸ Radio Rimba Raya di Ronga-Ronga, Bireun, Aceh serta RRI Aceh juga turut mengabarkan berita SO1 kepada All India Radio (AIR) di New Delhi.⁹

Sebelum diadakan sidang khusus untuk membahas kelanjutan isu kedaulatan Republik Indonesia, Utusan PBB dari UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia*) telah hadir di Yogyakarta yang diwakili oleh *military observers* dari Amerika Serikat dan Prancis.¹⁰ Sebagai awalan, kedatangan utusan UNCI telah menunjukkan keberhasilan di pihak republik bahwa tujuan politik dari SO1 telah setengah tercapai. Selain *military observers* dari UNCI, utusan Kanada juga berinisiatif menyampaikan resolusi baru dalam menghadapi persoalan antara Republik Indonesia dengan Belanda dengan Komisi Tiga Negara sebagai pelaksana utamanya. Inisiatif Kanada ini berisi: 1.) pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 2.) penghentian permusuhan, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong Konferensi

8) Pramoedya Ananta Toer, et. al., *ibid.*, hlm. 58.

9) Pramoedya Ananta Toer, et. al., *ibid.*, hlm. 49.

10) Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, (Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1991), hlm. 259.

Meja Bundar di Den Haag.¹¹

Klaim bahwa pesan politik dari SO1 telah setengah tercapai dibenarkan oleh sikap Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda, Mr. J.H. Van Maarseveen dan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia Dr. L.J.M. Beel. Kedua pejabat Belanda tersebut mengirimkan kawat kepada utusan Belanda di PBB, Van Royen, untuk memulai pembicaraan mengenai sikap pemerintah Belanda yang melarang pemerintah RI untuk kembali ke Yogyakarta dan sikap Sultan yang dianggap menyalahgunakan otonominya dalam memberi ruang perlawanan bagi Republik.¹²

Dalam menandingi suplai informasi Van Maarseveen dan L.J.M. Beel yang ditujukan kepada Van Royen di PBB, Lambertus Nicodemus Palar selaku delegasi RI di PBB dengan segera mendeskripsikan kondisi di Yogyakarta dari kacamata Republik Indonesia. Lambertus Nicodemus Palar, delegasi Republik Indonesia di PBB, antara lain menekankan bahwa gerilyawan dan rakyat preman bekerjasama dalam memaksa Belanda untuk bertahan. Di sisi lain, dengan penuh perhitungan, gerilyawan Republik Indonesia tetap solid dan dapat mempertahankan logistik.¹³ Pihak Republik Indonesia di PBB juga merayakan keberhasilan strategi mereka dalam melancarkan pertempuran yang hemat waktu, dalam hal ini hanya enam jam dan selanjutnya berkeputusan untuk tidak meladeni pertempuran tak seimbang dengan pasukan lapis baja Belanda yang datang dari arah Magelang.¹⁴

Rangkaian pembuktian mengenai eksistensi republik ini berdampak bagi diselenggarakannya sidang oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 10 Maret 1949. Sebagai negara adidaya yang juga berkuasa di Dewan Keamanan PBB, kondisi dalam negeri Amerika Serikat mengambil langkah untuk menekan Belanda dengan ancaman tidak dilanjutkannya Marshall

- 11) Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran R.I. & Badan Penerbit Alda c.v., *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950: Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*, (Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran R.I. & Badan Penerbit Alda c.v., 1975), hlm. 404.
- 12) GBPH Prabuningrat, "Ketika Terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949" dalam Atmakusumah (ed.), *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 169-171.
- 13) Center for Information Analysis, *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949: Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 74-75.
- 14) Pramoedya Ananta Toer, et. al., *ibid.*, hlm. 46.

Plan.¹⁵ Dari sudut pandang Amerika Serikat, Belanda menyalahgunakan bantuan keuangan yang mereka terima untuk lebih banyak membiayai perang daripada rekonstruksi Belanda yang hancur karena perang dunia II.¹⁶

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan oleh SO1 dalam ranah diplomatik adalah diadakannya Persetujuan Roem Royen yang utamanya diadakan untuk mengirim pesan politik mengenai eksistensi Republik Indonesia sebagai entitas politik berdaulat yang berhak untuk berunding secara diplomasi di tingkat PBB. Persetujuan Roem Royen ini juga menegaskan bahwa tujuan politik Belanda dari Agresi Militer II atau yang mereka namai sebagai aksi polisional; gagal dalam tataran strategis meskipun pada ranah operasi maupun taktis; banyak keberhasilan yang dicapai.

Selain itu, SO1 mematahkan dukungan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) yang merupakan institusi pengikat negara-negara federal bentukan Belanda terhadap rencana Beel. Beel, selaku wakil tinggi kerajaan, mengajukan suatu rencana yang mengesklusi Republik Indonesia pada proses transisi menuju Republik Indonesia Serikat. Soekarno dan Hatta yang terdaftar sebagai undangan tidak akan datang sebagai pemimpin RI melainkan “tokoh terkemuka”. SO1 memaksa BFO menganulir pendiriannya terhadap rencana Beel dan condong pada sikap melibatkan kembali Republik Indonesia sebagai entitas politik yang masih berdaulat ke dalam setiap pembicaraan.¹⁷

Muhammad Roem, selaku ketua delegasi RI pada persetujuan ini, mengawali komunikasi kepada pihak UNCI dengan pesan yang sekali lagi memberi penekanan pada kedaulatan Republik Indonesia. Roem menyatakan bahwa syarat pra-perundingan adalah pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan ke Muntok, Bangka diperkenankan untuk kembali ke Yogyakarta. Selain itu, Muhammad Roem meminta izin untuk mengunjungi Jakarta dalam rangka pertemuan pendahuluan. Di pertemuan ini, Muhammad Roem, secara implisit menekankan kegagalan Belanda

15) Sekolah Staf dan Komando TNI AD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1991), hlm. 270-271.

16) *Ibid.*, hlm. 271.

17) Sekolah Staf dan Komando TNI AD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, *ibid.*, hlm. 275.

dalam Agresi Militer II dan pengajuan prasyarat perundingan yang berlawanan dengan sikap L.J.M. Beel.

Muhammad Roem mengatakan; meskipun Agresi Militer II bertujuan untuk membungkam kedaulatan dan merendahkan posisi tawar RI berakhir dengan ketidakberhasilan. Agresi tersebut justru meruntuhkan kepercayaan pihak Republik Indonesia terhadap niat baik Belanda dalam menjalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Selanjutnya, ia mengajukan kembali prasyarat mengenai keberlangsungan persetujuan Roem Royen berkenaan dengan diizinkan para pemimpin Republik Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta. L.J.M. Beel yang bersikukuh dengan pelarangan bagi pemimpin-pemimpin republik untuk kembali ke Yogyakarta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia.¹⁸ Niat Muhammad Roem memperjuangkan kembalinya para pemimpin Republik ke Yogyakarta kelak disetujui oleh Muhammad Hatta yang dapat mencapai Jakarta atas saran Merle Cochran, seorang diplomat AS.

Pihak Belanda yang trauma dengan serangan kejutan SO1 mengajukan prasyarat yang kemudian disetujui oleh Roem meskipun menimbulkan polemik di kalangan pemimpin militer Republik Indonesia. Van Royen menyatakan bahwa perundingan hanya akan dimulai jika gerilyawan-gerilyawan Republik bisa menahan diri dalam melakukan serangan

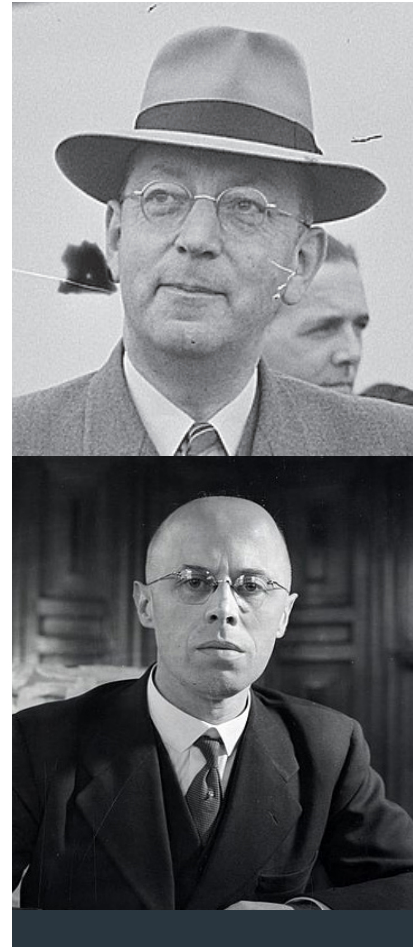


Foto 3.3. Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda, Mr. J.H. Van Maarseveen (atas) dan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia Dr. L.J.M. Beel (bawah).

18) Iin Nur Isnawati, *Muhammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya*, (Jakarta: Yayasan Indonesiatara, 2002), hlm. 80-82.

kepada militer Kerajaan Belanda. Prasyarat ini akhirnya dijalankan oleh pemimpin militer seperti Nasution dengan berat hati dan diiringi oleh upaya membesarkan hati para komandan di kantong-kantong gerilya dengan memerintahkan mereka untuk tetap berjaga Bersama pasukan mereka di tempat masing-masing.

Dalam pidatonya, Muhammad Roem menekankan bahwa perintah penghentian perang gerilya akan dikeluarkan oleh para pemimpin Republik Indonesia. Keputusan untuk mengakomodasi keinginan Belanda tersebut diseimbangkan oleh tuntutan enam tuntutan yaitu; dikembalikannya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, angkatan perang kerajaan Belanda tidak boleh melakukan operasi militer dan harus membebaskan tahanan politik, Belanda menyerahkan kedaulatan RI tanpa syarat, Belanda menghargai Indonesia sebagai kekuasaan yang berdaulat dengan memberikan hak dan kewajibannya dalam menegakkan perdamaian di kemudian hari, Belanda hadir dalam Konferensi Meja Bundar sebagai itikad baik dalam proses peralihan kekuasaan.¹⁹

Van Royen di sisi lain menjawab pidato Muhammad Roem melalui empat butir pernyataan; Pemerintah Belanda menyetujui kembalinya para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta, Tentara Kerajaan Belanda tidak akan melakukan operasi militer dan akan membebaskan tahanan politik, dan setelah seluruh pemimpin Republik berada di Yogyakarta, Konferensi Meja Bundar akan segera diadakan di Den Haag. Namun, tuntutan Muhammad Roem agar penyerahan kedaulatan

kepada RI dilakukan tanpa syarat masih harus menghormati kerangka yang telah disiapkan oleh Belanda kala itu; negara-negara federal yang tergabung dalam BFO. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Van Royen bahwa Belanda setuju menjadikan Republik Indonesia sebagai satu bagian dari Republik Indonesia Serikat.²⁰ Setelah ditandatangani pada 7 Mei 1949, perjanjian ini dikenal dengan persetujuan Roem Royen atau *Roem Van Royen Statement*.²¹

Persetujuan Roem-Royen sebagai pertemuan diplomatik pertama pasca agresi militer telah membawa Republik Indonesia setengah jalan menuju pengakuan kedaulatan yang kelak akan ditentukan pada akhir tahun 1949. Sikap delegasi Belanda yang sangat akomodatif dan cenderung banyak menoleransi sikap delegasi RI menimbulkan krisis luar biasa di dalam tubuh perwakilan-perwakilan Belanda. Seperti telah disebutkan di atas, Dr. Beel mengundurkan diri pada 8 Mei 1949. Jenderal Simon H. Spoor sebagai arsitek dari serangan-serangan militer Belanda ke kantong-kantong Republik untuk menekuk perjuangan Republik meninggal dunia secara mendadak. Berita resmi yang beredar menyebutkan bahwa Jenderal Spoor meninggal karena sakit; namun tak sedikit perwira tinggi Belanda dan KNIL yang percaya bahwa Simon meninggal akibat bunuh diri atau diracun.²²

19) Iin Nur Isnawati, *Muhammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya*, *ibid.*, hlm. 80.

20) Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 482-483.

21) Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, (Jakarta: CV Nugraha, 1981), hlm. 544.

22) T. B. Simatupang, *Pelopop dalam Perang, Pelopop Dalam Damai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 165-166.

Moral TNI yang sedang sangat tinggi justru membuat pelaksanaan butir-butir hasil persetujuan Roem-Royen menjadi kompleks. Jenderal Soedirman yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata sangat tersinggung dengan anggapan Mohammad Roem bahwa TNI tidak lain adalah semata-mata “pengikut-pengikut Republik Indonesia yang bersenjata”. Suatu istilah yang menempatkan TNI sebagai angkatan perang yang liar dan tidak berkomando. Muhammad Roem kelak merevisi redaksional pernyataannya dan meminta bantuan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk membujuk Jenderal Soedirman agar dapat bekerjasama dengan pemimpin republik yang lain dalam menaati persetujuan Roem-Royen. Soedirman sangat sulit dibujuk bukan hanya disebabkan oleh rasa ketersinggungannya melainkan oleh krisis kepercayaan beberapa perwiranya terhadap proses diplomasi yang berjalan. Pada awal Juli 1949, Soedirman baru memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta atas bujukan Kolonel Gatot Subroto.²³

Semangat pihak Republik Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatannya yang telah dihidupkan kembali oleh SO1 berlanjut ke sidang internal yang diadakan antara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah Menteri. Pada pertemuan yang dikenal dengan nama Konferensi Inter-Indonesia ini,

Purnawan Tjondronegoro. *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, *ibid.*, hlm. 544. & J. A. De Moor, *Jenderal Spoor; Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 1-3.

23) Batara R. Hutagalung, *ibid.*, hlm. 499.

diputuskan hal-hal teknis dan simbolis seperti nama negara yang kala itu adalah Republik Indonesia Serikat (R.I.S) yang didirikan berdasarkan demokrasi dan perserikatan. Selanjutnya, komisi tehnik akan dibentuk untuk membahas perihal operasionalisasi sistem dan kedaulatan tersebut dengan lebih terperinci.

Butir yang lain adalah penentuan bahwa kepala R.I.S. adalah seorang Presiden yang dibantu oleh menteri-menteri. Disebabkan oleh R.I.S yang merupakan sebuah negara federal, pemimpin-pemimpin BFO-lah yang akan memilih presiden R.I.S. dengan teknis yang juga akan dibicarakan di kemudian hari. Perihal yang berkenaan dengan isu legislatif, konferensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa R.I.S akan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selain tiga butir persetujuan di atas, Konferensi Inter-Indonesia juga membicarakan mengenai isu kewarganegaraan dan proses naturalisasi, Bendera, dan wakil-wakil tiap delegasi yang berhak atas satu suara dalam segala bentuk pemilihan dan proses persidangan di hari depan.²⁴

Puncak keberhasilan diplomatik Republik Indonesia yang didorong oleh SO1 adalah terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949.²⁵ Hanya berselang lima bulan setelah SO1, Republik Indonesia telah kembali menjadi entitas politik yang berdaulat dan siap menghadapi mantan penjajahnya di meja persidangan. Selain

24) Batara R. Hutagalung, *ibid.*, hlm. 503-504.

25) Rosihan Anwar, *Napak Tilas Ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 4.



Foto 3.4. Persetujuan Roem-Royen yang diadakan pada 14 April 1949 adalah pertemuan diplomatik pertama pasca-SO1. SO1 berperan dalam membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang masih mampu berunding.

Belanda, BFO yang dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung juga hadir dalam KMB.

Konferensi Meja Bundar secara umum membahas; ketatanegaraan dan hukum negara, keuangan dan perekonomian, kemiliteran, kebudayaan dan sosial. Lima isu pertama mendapat sorotan paling serius dan berbuah persidangan yang berjalan dengan beberapa hambatan. Pada persoalan ketatanegaraan dan hukum negara, sebagai contoh, terganjal pada pembahasan mengenai Irian Barat. Utusan BFO dan RI menuntut agar Irian Barat secara otomatis dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara Belanda, jelas menolak putusan tersebut. Kondisi ini bertahan hingga akhir konferensi tanpa membuahkan hasil. Oleh

sebab itu, keadaan Irian Barat dikembalikan kepada *status quo* (di bawah administrasi Belanda) yang bermakna kemenangan di pihak Belanda.²⁶

Dalam bidang keuangan, Belanda juga mendapatkan kemenangan di dalam persidangan disebabkan oleh dikabulkannya permintaan mereka untuk mengganti hutang perang pemerintah Hindia-Belanda sejak tahun 1932 yang di dalamnya termasuk periode 1949-1949. Pada periode itu, Belanda yang turut terangkat oleh angin kemenangan AS di Perang Dunia ke-II memutuskan untuk kembali ke ex-jajahannya. Dalam bidang kemiliteran, Belanda juga mendapat keuntungan dari Konferensi Meja Bundar sebab dapat mendorong agenda perekrutan perwira ex-KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Keputusan ini tidak hanya menambah beban pembiayaan dan perluasan organisasi melainkan juga memiliki risiko intelijen-keamanan.

Konferensi Inter-Indonesia yang dilaksanakan di antara persetujuan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar juga dilanjutkan di Scheveningen, Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai hasil, utusan-utusan negara anggota BFO yang di dalamnya termasuk Republik Indonesia menandatangani Piagam Persatuan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 29 Oktober 1949.²⁷

Sementara Konferensi Meja Bundar yang berakhir pada bulan November 1949

menghasilkan keputusan besar yaitu persiapan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang sesuai perjanjian harus dilakukan sebelum 30 Desember 1949. Keputusan Belanda untuk mempersiapkan pengakuan kedaulatan memang mengundang sentimen positif dan negatif. Sentimen negatif yang hadir disebabkan oleh terlalu besarnya toleransi delegasi Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda dalam hal ketatanegaraan, keuangan, dan militer.

Bagaimanapun, Konferensi Meja Bundar telah mempertegas pesan yang sejak SO1 telah berusaha disampaikan oleh Republik Indonesia kepada dunia; eksistensi. Dampak yang ditimbulkan oleh SO1 dalam ranah strategis dan taktis hanya menimbulkan gaung sementara yang tak akan berarti jika tidak ditanggapi oleh tindakan diplomatik yang cekatan dan tepat sasaran sebagaimana yang telah ditempuh oleh pemimpin Republik Indonesia sejak persetujuan Roem Royen hingga Konferensi Meja Bundar.

Lebih dari penekanan atas eksistensi, Konferensi Meja Bundar telah menerjemahkan “kawat diplomatik para gerilyawan” menjadi langkah nyata dalam peneguhan kedaulatan. Pada pasal 1 ayat 1 hasil Konferensi Meja Bundar disebutkan bahwa:

**“Kerajaan Belanda
menyerahkan kedaulatan
atas Indonesia yang
sepenuhnya kepada
Republik Indonesia Serikat
dengan tidak bersyarat**

26) Baskara T. Wardaya, *Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin, 1953-1963, ibid.*, hlm. 89.

27) Pramoedya Ananta Toer, et. al., *ibid.*, hlm. 288-289.

lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat”²⁸

Kelanjutan dari Konferensi Meja Bundar adalah pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang ditujukan untuk mengawal proses transisi kekuasaan meskipun dengan batu ganjalan besar berupa persoalan Irian Barat. Ganjalan berupa isu Irian Barat ini tidak terselesaikan hingga akhirnya Republik Indonesia kembali menggunakan kekuatan militer dalam merebut wilayah tersebut pada awal tahun 1960an.²⁹

Bagaimanapun, proses penyerahan kedaulatan tetap dilaksanakan sesuai amanat (sebelum 30 Desember 1949) dan terlaksana pada tanggal 27 Desember 1949. Proses penyerahan kedaulatan diawali dengan upacara simbolik penurunan bendera triwarna (bendera Belanda) dan dikibarkannya Sang Saka Merah Putih sebagai tanda berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Peristiwa ini juga baru pertama kali terjadi setelah ratusan tahun bendera Belanda berkibar di penjuru Jawa dan Sumatera.³⁰

Di Belanda, terjadi pertemuan antara

Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan yang baru Mr. A.M.J.A. Sassen dan Muhammad Hatta selaku ketua delegasi RIS. Di dalam pertemuan itu ditandatangani piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS.³¹ Sementara di Jakarta, A.H.J. Lovink menandatangani naskah penyerahan kedaulatan Bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi oleh Kolonel T.B. Simatupang dan Letnan Kolonel Daan Jahja.³²

Penandatanganan nota penyerahan kedaulatan tersebut menandai akhir dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah secara mandiri diproklamasikan oleh Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. 27 Desember 1949 adalah puncak gunung es dari perjuangan yang telah dilakukan sejak tahun 1945 meskipun masih menyisakan persoalan berupa status Irian Barat. Berbagai perlawanan militer dan diplomasi telah berkontribusi bagi terlaksananya pengambilalihan kedaulatan secara penuh dari tangan Belanda.

Serangan Umum 1 adalah merupakan sebuah batu pijakan yang berperan melesatkan posisi Republik Indonesia dari negara yang telah dianggap musnah menjadi negara utuh yang berdaulat dan sanggup memperjuangkan dirinya di meja perundingan internasional. Lebih dari pertempuran di tingkat lokal, Serangan Umum 1 Maret menunjukkan kecemerlangan strategis dan taktis pihak Republik. Kecemerlangan ini dibuktikan oleh gaung serangan tersebut pada tingkat divisi yang berhasil mendorong

28) Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, *ibid.*, hlm. 521.

29) *Ibid.*

30) Pramoedy Ananta Toer, et.al., *ibid.*, hlm. 588.

31) Batara R. Hutagalung, *op.cit.*, hlm. 522.

32) Pramoedy Ananta Toer, *ibid.*, hlm. 589.

kelanjutan penentuan nasib negara pada lapisan tertinggi.

Pelajaran Strategi dari Si Lemah: Dampak Serangan Umum 1 Maret pada Aspek Strategi Militer

Penggunaan strategi perang gerilya secara tersurat menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan pada aspek teknis (persenjataan, jumlah personil, dan teknologi) di antara kedua belah pihak. Pihak Republik secara jelas mengakui ketidakseimbangan ini dan kecilnya kemungkinan mengalahkan lawan jika menempuh jalan perang konvensional.³³ Berbeda dengan perang simetris/konvensional, perang gerilya menggunakan prinsip “ekonomis” dimana penggunaan energi (dalam hal ini adalah sumberdaya) sekecil mungkin harus menimbulkan efek maksimal dengan capaian ideal berupa *strategic paralysis* (kelumpuhan strategis).³⁴ Efek maksimal juga dapat didefinisikan sebagai akumulasi dari efek-efek jangka menengah (*medium effects*).

Serangan Umum 1 Maret yang menekankan aspek kejutan strategis (*strategic surprise*) adalah satu contoh aplikasi kalkulasi ekonomis dari perang asimetris seperti dituliskan di atas. Sebagaimana pertempuran pada umumnya, SO1 memiliki pencapaian politik yang jelas (dan kelak terbukti berhasil tersampaikan) yaitu menegaskan eksistensi

Republik Indonesia sebagai unit politik yang masih teguh berdiri dan berdaulat. Kalkulasi ekonomisnya nampak pada pembatasan durasi serangan yang hanya berlangsung selama enam jam dengan disusul penarikan pasukan untuk kepentingan taktis (*tactical retreat*) setelah Belanda mengerahkan pasukan lapis baja dari Magelang dan Gombong.³⁵

Aplikasi strategi yang berdurasi pendek namun memiliki hasil maksimal bertolakbelakang dengan strategi anti-gerilya Belanda yang seringkali berujung pada penggunaan kekerasan yang eksekutif dan tak terarah seperti yang terjadi di Rawagede dan peristiwa pembantaian yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling yang memakan 40.000 jiwa dalam satu operasi di Sulawesi Selatan.³⁶ Kapten Westerling yang kemudian dipecah oleh Jenderal Spoor pasca-pembantaian tersebut membuktikan bahwa pemimpin tentara Belanda tidak merasakan adanya manfaat politik dari 40.000 jiwa yang hilang tersebut. Sebaliknya, Jenderal Spoor justru merasakan adanya kerugian bagi pihaknya sendiri.³⁷

Di dalam strategi perang gerilya yang meleburkan sekat antara kombatan dan non-kombatan, penganut strategi perang konvensional seperti Belanda pada konteks Revolusi Indonesia dapat dengan mudah

33) A. H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Masa yang Akan Datang*, (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 10.

34) Che Guevara, *Guerilla Warfare*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1998), hlm. 18-19.

35) Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, *ibid.*, hlm. 494.

36) Her Suganda, *Rengasdengklok: Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 128; Maulwi Saelan, *Kesaksian Wakil Komandan Tjagrabirawa dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*, (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008), hlm. 77.

37) Julius Pour, *Doorstot Naar Djokja: Pertikaian*



Foto 3.5. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini adalah pertemuan puncak antara Republik Indonesia, Belanda, dan BFO dalam membahas kedaulatan RI.

mencapai titik frustrasi untuk menemukan dan menghancurkan gerilyawan tanpa melukai warga sipil.³⁸

Meski memiliki pengalaman ratusan tahun dalam memadamkan resistensi-resistensi lokal, Belanda tak mampu menduplikasi pengalaman tersebut dalam menghadapi perang kemerdekaan yang dijalankan oleh Republik. Ketidakmampuan negara ex-kolonial dalam menghadapi perjuangan kemerdekaan oleh

Pemimpin Sipil Militer. (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 3.

38) Gérard Chaliand, "Introduction" in Gérard Chaliand (Ed.), *Guerilla Strategies: An Historical Anthology from the Long March to Afghanistan*, (Berkeley: University of California Press, 1982), hlm. 7.

negara bekas jajahannya tidak hanya dihadapi oleh Belanda di Indonesia melainkan juga Prancis di Vietnam, Aljazair, dan Malagasy.³⁹

Sebelum gamang dalam menghadapi strategi gerilya republik, reputasi Belanda sebagai pelindung Hindia Belanda pernah dijatuhkan oleh tentara Jepang pada awal decade 1940an. Bersama dengan Inggris dan Prancis di bagian lain Asia Tenggara, Belanda harus bertekuk lutut kepada Jepang yang meniru strategi serangan kilat (*blitzkrieg*) dalam menduduki kota-kota di Asia Tenggara kontinen, Kepulauan Indonesia, dan Kepulauan Filipina.⁴⁰ Kekalahan ini membebani reputasi Belanda sebagai kekuatan kolonial Eropa dengan sejarah penjajahan dan penjelajahan di seluruh wilayah dunia.

Keberhasilan pihak Republik dalam mewujudkan kejutan strategis juga ditunjang oleh kemampuan pihak Republik dalam mengguguli Belanda pada perang informasi. Perang informasi yang terjadi pada konteks SO1 adalah keberhasilan Republik dalam menjaga kerahasiaan operasi dan keputusan untuk memperbesar gaung SO1 melalui corong radio tanpa mampu dihentikan oleh aksi tandingan (serangan terbuka terhadap fasilitas komunikasi maupun informasi tandingan) yang signifikan dari pihak Belanda.

Kesuksesan Republik dalam menjaga kerahasiaan operasi dapat diterjemahkan dari dua sisi; sisi pertama adalah pihak Republik yang dengan rapih dan rapat menjaga kerahasiaan



Foto 3.6. *Still* dari film “Enam Djam di Djogja” karya Usmar Ismail. Selain dikenal sebagai SO1, Seangan Umum 1 Maret 1949 juga dikenal dengan nama serangan enam jam di Jogja yang menggambarkan durasi pertempuran yang relatif singkat.

39) Anthony Clayton, *The Wars of French Decolonization*, (New York: Routledge, 1994), hlm. 79-81.

40) *Soerabaijasch Handelsblad*, 30 Januari 1942.

serangan umum 1 Maret. Salah satu bentuk paling terkenal dari upaya penjiagaan rahasia tersebut dilakukan dengan penggunaan janur kuning di bahu kiri tentara Republik. Meskipun identik dengan SO1, janur kuning telah dikenakan sebelumnya pada tahun 1948 oleh *sub-wehrkreise* III.⁴¹ Selain janur kuning, pihak Republik juga menggunakan sandi mengacungkan kepal tangan kiri ke udara sambil memekikkan kata “Mataram” yang harus dijawab dengan kata “Menang!”. Jika pihak Republik tidak mengenakan janur kuning atau tidak hafal sandi yang telah ditentukan, pihak WK III tidak bertanggungjawab jika terjadi kontak tembak antar pejuang (*friendly-fire*).⁴²

Dengan upaya menjaga rahasia yang cukup rapih, celah bagi kebocoran informasi masih tak terelakkan seperti ditunjukkan oleh Letnan Komarudin. Letnan Komarudin yang lupa bahwa tahun 1949 adalah tahun kabisat melancarkan serangan lebih cepat daripada perintah yang diberikan.⁴³ Kelalaian Letnan Komarudin dapat menunjukkan sisi lain dari isu kerahasiaan operasi. Jika sisi pertama dari kerahasiaan operasi adalah kemampuan pihak A (dalam hal ini adalah Republik) menjaga informasinya, maka sisi kedua adalah ketidakmampuan pihak B (dalam konteks ini adalah Belanda) dalam menggali atau memahami secara menyeluruh petunjuk-petunjuk yang secara sengaja maupun tidak sengaja

ditampakkan oleh pihak Republik.

Sebagaimana negara besar pada umumnya, Belanda mengalami sindrom superioritas yang mendorong sikap merendahkan (*underestimation*) terhadap kekuatan dan strategi lawan.⁴⁴ Sikap merendahkan ini yang secara umum mampu menghalangi kewaspadaan terhadap rencana-rencana lawan untuk melancarkan serangan kejutan seperti yang terjadi pada konteks SO1. Bahkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Komarudin, pihak Belanda tetap tak berhasil mendapatkan gambaran besar dari rencana yang sedang disiapkan Republik.

Selain isu kerahasiaan informasi terkait operasi, pihak Republik juga berhasil dengan cekatan memperbesar gema SO1 ke penjuru dunia melalui fasilitas radio yang secara kualitas dan kuantitas cenderung terbatas. Radio-radio sebagai sarana komunikasi yang dimiliki oleh Republik kala itu adalah milik AURI dan RRI. Dalam kategori radio penerima (*radio receiver*) terdapat radio milik Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan radio komando WK III. Pesawat pemancar RRI terletak di Gunung Lawu Surakarta sementara radio milik jawatan perhubungan AURI terletak di Wonosari. Unit radio milik AURI yang semula berlokasi di Terban adalah pemancar jarak jauh yang dapat mengirim berita ke Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera untuk kemudian diteruskan ke dunia internasional dalam konteks ini adalah India dan Birma (sekarang

41) Center for Information Analysis. *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949: Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan*, *ibid.*, hlm. 48.

42) *Ibid.*, hlm. 48.

43) Pramoedya Ananta Toer, et al., *Kronik Revolusi Indonesia*, *ibid.*, hlm. 49.

44) Sekolah Staf dan Komando TNI-AD. *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, hlm. 280.

Myanmar).⁴⁵

Penyiaran berita mengenai SO1 bukanlah semata-mata respon unit perhubungan/komunikasi atas serangan umum melainkan sesuatu yang telah disiapkan oleh pihak Republik sebagai sebuah metoda peperangan informasi. Kolonel T.B. Simatupang sendiri yang membawa naskah berita berbahasa Inggris ke Playen untuk menyiarkan berita berkenaan dengan serangan umum. Sebagaimana yang telah ditulis pada bagian sebelumnya, berita yang ditransmisikan oleh radio-radio di Playen diterima oleh radio di Sumatera (terutama Sumatera Barat dan Aceh) kemudian diteruskan kepada radio-radio di India.⁴⁶ Segera setelah mencapai India, berita tersebut disebarkan ke belahan dunia lain termasuk New York, Amerika Serikat. Penerimaan berita tersebut oleh perwakilan Republik Indonesia di PBB ditanggapi dengan diadakannya rapat terkait nasib Republik Indonesia setelah SO1.⁴⁷

Menghadapi keunggulan pihak Republik dalam perang informasi, Belanda melancarkan dua bentuk serangan balasan. Serangan balasan pertama dilakukan dalam bentuk pesan kontra (*counter message*) oleh Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda, Mr. J.H. Van Maarseveen dan Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia Dr. L.J.M. Beel yang ditujukan kepada Van Royen sebagai perwakilan Belanda di PBB. Secara umum, pesan kontra tersebut ditujukan untuk menandingi pesan dari Republik yang dirumuskan oleh L.N. Palar bersumber dari



Foto 3.7. Poster film Janur Kuning: film ilustrasi sejarah yang menceritakan tentang serangan umum 1 maret 1949 dan digunakannya Janur Kuning sebagai sandi antara pasukan republik

45) *Ibid.*, hlm 190.

46) Pramoedya Ananta Toer, et. al., *ibid.*, hlm. 48.

47) *Ibid.*



Foto 3.8. Korps Speciale Troepen: Pasukan khusus Belanda dengan kualifikasi lintas udara berpose di sebuah sudut kota Yogyakarta. Pasukan KST adalah unit utama yang ditugaskan dalam serangan *countervalue* terhadap radio perlawanan di Gunungkidul.

berita yang disiarkan oleh radio-radio republik.⁴⁸

Serangan balasan kedua dilaksanakan melalui operasi militer berkarakter *countervalue* yang merupakan serangan militer dengan tujuan menghancurkan instalasi non-militer namun memiliki potensi membantu pihak lawan dalam memenangkan perang.⁴⁹ Meskipun Radio PC-2 dimiliki dan dioperasikan oleh Angkatan Udara RI, instalasi radio tersebut tidak tergolong senjata yang dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap perang konvensional. Namun, dalam konteks perang informasi, radio PC-2 adalah senjata yang ampuh.

Serangan militer tersebut dilaksanakan pada 10 Maret 1949 oleh pasukan terjun payung Belanda yang diberangkatkan dari Lapangan Udara Andir di Bandung. Serangan lintas udara tersebut adalah serangan dengan skala besar karena melibatkan hampir 20 unit pesawat Dakota untuk merebut dan melumpukan Radio PC-2 AURI. Skala operasi yang besar juga didorong oleh asumsi Belanda bahwa Jenderal Soedirman sebagai panglima berada di sekitar lokasi pemancar radio tersebut. Operasi tersebut berakhir sia-sia disebabkan oleh ketiadaan

48) *Ibid.*

49) *Countervalue* adalah bentuk serangan udara yang bertujuan untuk merebut, melumpuhkan, atau menghancurkan aset non-militer / non-senjata milik lawan yang memiliki *value* (peran) dalam mendukung atau bahkan memenangkan peperangan. Aset ini dapat berupa alat komunikasi yang digunakan untuk merebut simpati seperti radio dan mesin propaganda lainnya. Lihat George Herman Quester. *Counterforce, Countervalue: The Early History of a Distinction in Air Strategy, 1900-1945*. Tahun penerbitan 1965, Hlm. 13. Donald Arthur Wells. *An Encyclopedia of War and Ethics*. (Greenwood Press, 1996), hlm. 109-111.

Jenderal Soedirman di lokasi dan radio pemancar yang telah dipindahkan ke Brosot, Kulon Progo.⁵⁰

Dua kegagalan operasi tandingan tersebut dapat diterjemahkan sebagai kekalahan Belanda dalam aspek perang informasi yang terjadi di sekitar dan setelah SO1. Kegagalan pada peperangan informasi tidak hanya berdampak bagi utuhnya unit radio PC-2 dan radio-radio perjuangan lainnya secara fisik melainkan tersampainya pesan tentang SO1 kepada dunia yang merespon dengan pengakuan atas eksistensi republik dan simpati terhadap perjuangan yang sedang dilaksanakan setelah pernyataan kemerdekaan.

Dalam aspek strategi militer, Belanda juga menelan pil pahit berkenaan dengan pengamanan wilayah Yogyakarta yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan imunitas yang dimiliki oleh pemimpinnya; Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dari kacamata Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dianggap menyalahgunakan otonominya untuk memberikan ruang bagi pejuang republik dalam mempersiapkan SO1. Penyalahgunaan otonomi di pihak kesultanan sesungguhnya adalah suatu kecerdikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam bermanuver untuk menguntungkan Republik dan rakyat Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.⁵¹

Serupa dengan perang informasi yang dimenangkan oleh pihak Republik, respon Belanda terhadap ketidakmampuannya sendiri dalam memelihara pengamanan Yogyakarta dilakukan secara terlambat dan tanpa hasil. Selain sebagai pasukan pemukul dan pendukung, kavaleri lapis baja Belanda dari Gombong dan Magelang datang untuk menggertak Keraton dengan cara mengepung Siti Hinggil. Meskipun memiliki daya tembak yang destruktif, kendaraan-kendaraan lapis baja tersebut “tidak mampu” menembus gerbang keraton yang ditutup atas perintah Sultan. Rencana gertakan tersebut hanya berujung pada inspeksi komandan kesatuan lapis baja di dalam Keraton yang juga tak mampu mengidentifikasi kurir-kurir Jenderal Soedirman yang menyamar. Kesaksian Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahkan menunjukkan bahwa beliau dapat menggunakan identitasnya sebagai alumni Universitas Leiden untuk menghadapi

50) Pramoedya Ananta Toer, *et. al., ibid.*, hlm. 49.

51) Sekolah Staf dan Komando TNI-AD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya, ibid.*, hlm. 276

salah seorang perwira pasukan lapis baja yang berkuliah di Universitas Delft. Tradisi senioritas antar universitas di Belanda membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX percaya diri untuk dapat mendominasi pembicaraan di hadapan perwira tersebut.⁵²

Dilihat dari sudut pandang strategi, Serangan Umum 1 Maret adalah operasi militer yang berhasil karena tidak semata-mata menjadi ajang pembantaian melainkan sebagai kendaraan bagi pihak Republik untuk mencapai tujuan politiknya berupa pembuktian atas eksistensi di mata dunia. Selain itu, Serangan Umum 1 Maret merupakan sebuah episode kegagalan negara besar dalam memahami strategi asimetris/gerilya yang diaplikasikan oleh negara ex-koloni dalam konteks perang dekolonisasi.

Pada lapisan operasi-taktis, SO1 telah mengajarkan Belanda tentang banyak hal yang seharusnya tidak mereka anggap sepele. Kejutan pertama adalah keberhasilan Republik dalam menerapkan prinsip dasar gerilya; penggunaan energi sekecil mungkin dalam mencapai tujuan sebesar mungkin. Durasi SO1 yang hanya berlangsung kurang lebih enam jam dengan hasil yang dapat mengubah nasib sebuah bangsa adalah perwujudan dari dikta gerilya tersebut.

Selain itu, Belanda juga mendapatkan pengingat mengenai pentingnya opini publik terutama publik internasional terhadap perang. Pihak Republik terbukti berhasil menggunakan teknologi komunikasi yang amat sederhana untuk memenangkan opini publik internasional. Serangan balasan Belanda dalam bentuk pesan tandingan (*counter message*) dan serangan terhadap fasilitas radio (*counter value*) terbukti terlambat dan sia-sia. Berkat jaringan radio yang terhubung antara Yogyakarta, Sumatera, dan India; pesan Serangan Umum 1 Maret berhasil menggema dengan sangat cepat.

Belanda juga harus mengkaji kembali strategi pengamanan daerah-daerah imun seperti Yogyakarta. Imunitas yang dimanfaatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah memecundangi Belanda yang dalam tindakan-tindakan balasan juga tak dapat berbuat banyak. Pembelaan Belanda yang memberi penekanan pada “penyalahgunaan wewenang oleh Sultan” tidak diterima oleh dunia internasional. Diakui atau tidak,

52) Kustiniyati Mochtar. “Pak Sultan dari Masa ke Masa” dalam Atmakusumah (ed.), *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 79-80.

dengan menyalahkan Sultan, Belanda mengakui keteledorannya dan ketidakmampuannya dalam menjaga pemimpin dengan otonomi seperti Sri Sultan untuk tidak merugikan Belanda.⁸

C. Landasan Yuridis

Upaya untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dapat terakomodir. Selain itu keberadaan dasar yuridis dapat memperkuat dan mengingatkan kembali peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Soekarno dan Mohammad Hatta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, dalam menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan harmonisasi. Dalam penyusunan Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu di harmonisasi yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
6. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas digunakan sebagai rujukan terhadap substansi yang tertuang dalam menyusun Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Bab V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN KEPUTUSAN PRESIDEN

A. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, dan Frasa

Mengapa Kedaulatan?

- 1) Bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan kedaulatan negara Indonesia yang baru merdeka. Kedaulatan negara (*state sovereignty*) memiliki makna ke-dalam (nasional) dan ke-luar (internasional). Dalam konteks nasional kedaulatan dimaknai sebagai pengakuan terhadap dasar dan idiologi negara (Pancasila), konstitusi dasar negara (UUD 1945), lambang/motto bangsa (Bhineka Tunggal Ika), wilayah teritorial Indonesia (NKRI) dan makna ke-luar (Internasional) berupa pengakuan dunia internasional atas kedaulatan nasional.
- 2) Upaya memperoleh pengakuan kedaulatan negara dari dunia internasional mengalami hambatan karena Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda melalui Agresi Militer I dan II.
- 3) Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi titik balik di mana Penegakan Kedaulatan Negara ditegakkan baik di level internasional dan nasional

dengan pengakuan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949.

- 4) Pengakuan dunia internasional atas kedaulatan negara diikuti di dalam negeri dengan dibubarkannya negara-negara boneka/federal dan kembali ke Indonesia.
- 5) Pengakuan kembali dunia internasional dan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaknai sebagai "Penegakan Kedaulatan Negara" yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga syarat-syarat teoritis dan yuridis sebagai negara yang merdeka dan berdaulat terpenuhi.

B. Materi yang Akan Diatur

1. Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
2. Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara setiap tanggal 1 Maret.

Bab VI

PENUTUP

SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 SEBAGAI HARI NASIONAL “PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA”

Berdasarkan pada uraian di atas maka sangatlah penting jika peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk dapat ditetapkan sebagai Hari Nasional dengan nama “Hari Penegakan Kedaulatan Negara” dengan mempertimbangkan berbagai alasan:

1. Penulisan kembali sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang selama ini telah mengesampingkan peran para tokoh utama bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan tokoh-tokoh penting lainnya baik sipil maupun militer.
2. Bangsa Indonesia memerlukan momentum historis yang relevan untuk mengingatkan kembali aspirasi-aspirasi liar yang menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti upaya mengganti ideologi negara dan separatisme dan bentuk-bentuk pemecah belah lainnya.
3. Nilai-nilai penegakan kedaulatan sangat relevan untuk terus

direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara masih tampak gejala-gejalanya dalam masyarakat. Tantangan dan ancaman kontemporer terhadap kedaulatan negara itu adalah:

- a) Sejak pemerintah Orde Baru, Indonesia telah terjebak dalam praktik neo-imperialisme yang hendak mengambil alih kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memaksakan negara menandatangani berbagai kontrak pengelolaan sumberdaya ekonomi yang vital yang sangat merugikan bangsa dan negara. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedaulatan ekonomi Indonesia perlahan-lahan dapat diambil alih dari tangan asing. Namun perjuangan ini belum selesai, upaya menegakan kedaulatan ekonomi nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur masih sangat perlu dilakukan.
 - b) Gerakan separatisme dari dalam masih menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh negara, sedangkan dari luar dukungan internasional atas upaya separatisme masih ada, misalnya gerakan Papua Merdeka dan dukungan dari beberapa negara di Pasifik.
 - c) Gerakan dari dalam mengganti ideologi negara untuk digantikan dengan ideologi asing masih dilakukan, misalnya upaya megusung ideologi khilafah.
 - d) Ancaman asing terhadap kedaulatan negara juga tampak pada kecaman-kecaman terhadap cara-cara penanganan pelanggaran HAM di Indonesia.
 - e) Kedaulatan budaya juga masih terus mendapat tantangan dari gempuran gelombang budaya asing yang masuk ke Indonesia dalam konteks globalisasi.
4. Makna pokok peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini adalah untuk mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen bangsa untuk setia pada cita-cita dan kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai Ideologi negara dan bangsa, UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebaga motto dan semangat kebangsaan, Merah Putih dan NKRI sebagai simbol-simbol persatuan dan kesatuan bangsa.

Saran

1. Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) dirumuskan tanpa penokohan terhadap figur tertentu yang dianggap memainkan peran sentral dimaksudkan untuk memberikan kejernihan berfikir bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa.
2. Diperlukan pemakluman yang dalam berdasarkan landasan historis yang kuat bahwa aspirasi-aspirasi yang di luar kesepakatan nasional tidak bisa diterima.
3. Makna dan harapan dari peringatan hari besar nasional ini adalah bahwa tata nilai yang terkandung dalam instrumen-instrumen kesepakatan nasional itu (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Merah Putih dan NKRI) itu mampu menjadi referensi pokok dari pola pikir kebangsaan yang selanjutnya tercermin dalam perilaku berbangsa dan bernegara.
4. Hari besar nasional yang dilandaskan pada makna penegakan kedaulatan negara ini hendaknya dapat menjadi dasar membangun karakter dan mengembangkan identitas kebangsaan.
5. Kegiatan Pokok Peringatan Hari Penegakan kedaulatan Negara
 - a) Melaksanakan upacara bendera setiap 1 Maret, untuk menghormati jasa para pahlawan dan mengingatkan kembali nilai kesatuan dan nasionalisme untuk menegakkan kedaulatan negara.
 - b) Dapat pula membunyikan sirene atau semacamnya pada pukul 6 pagi selama 1 menit setiap 1 Maret sebagai tanda mengenang dimulainya Serangan Umum 1 maret 1949.
 - c) Melakukan aktivitas nyata dalam pemeliharaan tempat bersejarah seperti tugu, monumen, tetenger dan situs.
 - d) Melakukan identifikasi, analisis, dan dokumentasi peristiwa sejarah di tingkat lokal, regional dan nasional agar sejarah lestari dan pendokumentasiannya dapat meningkatkan literasi masyarakat.
 - e) Menyelenggarakan berbagai aktivitas terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan/atau peristiwa sejarah lainnya.

- f) Membuat media informasi dan edukasi terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan/atau peristiwa sejarah lainnya.

Daftar Pustaka

Buku, Monograph, Jurnal

- A.H. Nasution. *Pokok-Pokok Perang Gerilya: Dan Pertahanan republik Indonesia Di Masa Yang lalu dan Akan Datang*. Jakarta: Narasi. 2013.
- _____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II*. Bandung: DISJERAH-AD dan Angkasa Bandung. 1979.
- Adam, Cindy. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* (Edisi revisi). Jakarta: Media Presindo. 2011.
- Ali sastroamidjojo. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT. Kinta. 1974.
- Andrik Purwasito Saddhono & Kundharo. *Imajeri India: Studi Tanda dalam Wacana*. Jakarta: Pustaka Cakra. 2002.
- Asvi Warman Adam. *Menguak Misteri Seharah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2010.
- Atmakusumah (ed.). *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia; Jakarta, 1982.
- Ayu Utami. *Soegija 100% Indonesia*. Yogyakarta: Puskat Pictures. 2012.
- Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacat Veteran R.I. & Badan Penerbit Alda c.v., *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950: Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*. Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat

- Korps Cacat Veteran R.I. & Badan Penerbit Alda c.v.; 1975.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. *Munumen Radio PHB AURI PC-2 Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. 2014.
- Baskara T. Wardaya. *Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin, 1953-1963*. Jakarta: Galang Press. 2008.
- Batara R. Hutagalung. *Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Center for information analysis. *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret: Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2000.
- Chaliand, Gérard. "Introduction" in Gérard Chaliand (Ed.). *Guerilla Strategies; An Historical Anthology from the Long March to Afghanistan*. Berkeley: University of California Press. 1982.
- Clausewitz, Carl Von. *On War*. Princeton: Princeton University Press. 1967.
- Clayton, Anthony. *The Wars of French Decolonization*. New York: Routledge. 1994.
- De Moor, J.A.. *Jenderal Spoor; Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia*. Kompas: Jakarta. 2015.
- Departemen Penerangan. *Lukisan Revolusi, 1945-1950: Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*. Jakarta: Departemen Penerangan. 1954.
- Dharmono Hardjowidjono, et. al. *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Kedua)*. Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1984-1985.
- Dinas Sejarah Militer TNI-AD. *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*. Bandung: Disjarah. 1972.
- F.X. Murti Hadi Wijayanto. *Soegija In Frames*. Yogyakarta: Puskat Pictures. 2012.
- G. Dwipayana dan Ramadhan KH. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada. 1989.
- Guevara, Che. *Guerilla Warfare*. Lincoln: University of Nebraska Press. 1998.
- Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo. *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: Galang Press. 2011.

- Heijboer, Pierre. *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zambrut Sepanjang Katulistiwa, 1945-1949*. Jakarta: Gramedia. 1998.
- Her Suganda. *Rengasdengklok; Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945*. Jakarta: Kompas. 2009.
- Himawan Soetanto. *Yogyakarta: Jenderal Spool (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Indriastuti. *Pemerintahan Militer di Daerah Gerilya Gunung Sumbing Pada Tahun 1948-1949*. Semarang: Fak. Sastra Undip Press. 1988.
- Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, ANRI, no. 985.
- Isnawati, Iin Nur. *Muhammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya*. Yayasan Indonesiatara; Jakarta. 2002.
- J.B. Soedarmanta.. *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Kompas. 2011.
- Julianto Ibrahim. *Dinamika Sosial Politik Masa Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- Julius Pour. *Daarstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Juti. *Arti Proklamasi dan K.M.B*. Jakarta: Penerbit Logika. 1949.
- Kahin, George M.C. Turnan. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Ismail Bin Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka. 1980.
- _____. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2013.
- Kerukunan Anggota Detasemen II Be 17. *Pertempuran Empat Hari di Solo dan Sekitarnya: Bunga Rampai Cuplikan-Cuplikan Sejarah*. Jakarta: Kerukunan Anggota Detasemen II Be 17. 1993.
- Kustiniyati Mochtar. "Pak Sultan dari Masa ke Masa" dalam Atmakusumah (ed.). *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia; Jakarta, 1982.
- Mahtisa Iswari. "Perempuan, Pasar, dan Revolusi: Beringharjo Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)", *Skripsi S1*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Manuel Kaisiepo. "Murba di tengah Persaingan: Tan Malaka dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949". *Prisma* no. 9, September 1982.
- Masyarakat Sejarawan Indonesia. *PDRl (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang*. Jakarta: MSI. 1990.

- Maulwi Saelan. *Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*. Jakarta: Visi Media Pustaka. 2008.
- Mohamad Roem; Mochtar Lubis; Kustiniyati Mochtar; S.Maimoen. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Muhammad Hatta. *Kumpulan Karangan IV*. Jakarta: Balai Buku Indonesia. 1954.
- _____. *Kumpulan Pidato dari Tahun 1942-1949*. Jakarta: Yayasan Idayu. 1981.
- NN. *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan*. Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korps Cacad Veteran Republik Indonesia & Badan Penerbit ALDA. 1975.
- Oemar Sanusi, dkk. *Api Segoroyoso*. Yogyakarta: Dinas Sosial DIY. 1981.
- Onghokham. "Revolusi Indonesia: Mitos dan realitas". *Prisma* no. 8 1985.
- Prabuningrat, GBPH. "Ketika Terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949". dalam Atmakusumah (ed.). *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia; Jakarta, 1982. P. 169-171.
- Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagjo Toer, dan Ediati Kamil. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V 1949*. Jakarta: KPG. 2014.
- Purnawan Tjondronegoro. *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*. Jakarta: CV Nugraha. 1981.
- Quester, George Herman. *Counterforce, Countervalue: The Early History of a Distinction in Air Strategy, 1900-1945*. 1965.
- R. Eddy Soekamto. *Yogyakarta Ibukota Perjuangan*. Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2005.
- Reid, Anthony. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Rosihan Anwar. *Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950*. Jakarta: Grafiti Press. 1985.
- Rosihan Anwar. *Napak Tilas Ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949*. Kompas; Jakarta, 2010.
- S. Margana, et. al. *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY. 2017.
- Sartono Kartodirdjo. "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivme Struktural". *Prisma* no. 8 Agustus 1981.
- SESKOAD. *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta, Latar Belakang*

- dan Pengaruhnya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991.
- Sigit Wroehantoro, dkk. *Sejarah Perjuangan Pada Kles II di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*. Sleman: PEMDA Sleman. Tanpa tahun.
- Soe Hok Gie. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun, September 1948*. Yogyakarta: Bentang. 1997.
- Soebagijo IN. *Pengalaman Masa Revolusi*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1982.
- Sudjarwo. "Potret Diri Pemuda dalam Revolusi Kita". *Prisma*, no.8, 1981.
- Suhartono, et. al. *Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia, 4 Januari 1946- 27 Desember 1949*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.
- Suhartono, WP.. *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia*. Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko. 2002.
- Suranta Abd. Rahman. "Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947" *Wacana*. Vol.9, No.2, Oktober 2007 pp. 154-172.
- T. B. Simatupang. *Pelopor dalam Perang, Pelopor Dalam Damai*. Jakarta: Sinar Harapan. 1981.
- _____. *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1981.
- Talsya, TA.. *Sekali Republikan Tetap Republikan: Perjuangan kemerdekaan di Aceh, 1949*. Medan: Lembaga Sejarah Aceh. 1990.
- Tashadi, dkk. *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1992.
- Tim Lembaga Analisis Informasi. *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Media Presindo. 2000.
- Wells, Donald Arthur. *An Encyclopedia of War and Ethics*. Greenwood Press. 1996.
- Wild, Colin dan Peter Carey. *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia. 1986.
- Yayasan 19 Desember 1948. *Dokumen RIPRESS dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Surat Kabar, Cetak Berkala, Wawancara, Video :
Antara, 27 Desember 1945
- Balai Kajian Sejarah. "Video Kesaksian Djoewariah Sebagai Anggota PMI". Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah. 2017.

BERNAS, edisi 2 Maret 1999. "SO 1 Maret diprakarsai Sri Sultan HB IX: Kesaksian Boedihardjo dan sabar Wiyonomukti",
BERNAS, edisi 7 Maret 1999. "Ide Sultan, Pak Dirman Acc, Pak Harto Lapangan", Wawancara Adaby Darban.
Soerabaijasch Handelsblad. 30 Januari 1942.

Arsip

Djogdja Documenten 1945-1949, ANRI, no. 214
Djogdja Documenten 1945-1949, ANRI, no. 215
Djogdja Documenten 1945-1949, ANRI, no. 217
Djogdja Documenten 1945-1949, ANRI, no. 270

Website

<http://angkasa.grid.id/sejarah/mengenang-68-tahun-agresi-militer-belanda-ii-di-yogyakarta/>
<http://djokja1945.blogspot.com/2014/11/perlawanan-terhadap-belanda-di-tahun.html>
<http://kakakpintar.com/sejarah-agresi-militer-belanda-1-dan-2-latar-belakang-peristiwa-tujuan/>
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-lucu-letnan-komarudin-salah-lihat-tanggal-serang-belanda.html>
<http://sejarahmula.blogspot.co.id/2017/02/sejarah-agresi-militer-belanda-i-dan-ii.html>
<http://www.artikelsiana.com/2015/11/sejarah-agresi-militer-belanda-i.html>
<https://tirto.id/mengapa-bung-karno-tak-ikut-gerilya-bersama-soedirman-b9ZJ>
<https://www.kompasiana.com/pantjewa/57d2e4f23793736377eef84b/mengenang-71-tahunrri?page=all>

Lampiran

RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN



RANCANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kcsatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Belanda berupaya menghalangi upaya Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia Internasional dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa Bangsa;
- c. bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta **disetujui dan digerakkan** oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

-2-

Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

- d. bahwa dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, memperkuat sikap pantang menyerah, patriotisme, rela berkorban, wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

KEDUA : Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur.

KETIGA : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen bangsa dan rakyat Indonesia memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara setiap tanggal 1 Maret.

-3-

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO



**Dinas Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta
2022**